



RENCANA STRATEGIS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2025-2029



Website

<https://jateng.kemenag.go.id/>



KemenagJateng



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunannya, Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode dan kerangka berpikir yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan Rencana Strategis satuan kerja pada Kementerian Agama tahun 2025-2029.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 memuat hasil evaluasi dari pelaksanaan Renstra tahun 2020 – 2024 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, Target dan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 menjadi acuan penyusunan Renstra di Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Renstra Satuan Kerja Madrasah se-Provinsi Jawa Tengah. Dengan telah selesainya disusun Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat dijadikan panduan dalam mengambil kebijakan – kebijakan dalam pelaksanaan rencana kinerja, rencana kegiatan maupun rencana anggaran di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Satuan Kerja Madrasah.

Semarang, 5 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Saiful Mujab



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3482 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Rencana Stategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930)
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1030);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1361 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Atas Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penyusunan :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja;
2. Rencana Kerja Tahunan;
3. Rencana Kerja Anggaran;
4. Perjanjian Kinerja;
5. Pohon Kinerja Organisasi;
6. Sasaran Kinerja Pegawai;
7. Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Desember 2025

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,**

SAIFUL MUJAB





DAFTAR SINGKATAN

ASN	= Apratur Sipil Negeri
EWS	= Early Warning System
IMB	= Indeks Moderasi Beragama
IKUB	= Indeks Kerukunan Umat Beragama
BMN	= Barang Milik Negara
BOP	= Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	= Bantuan Operasional Sekolah
DIPA	= Daftar Isian Pelaksana Anggaran
FKUB	= Forum Kerukunan Umat Beragama
Perkin	= Perjanjian Kinerja
PIHK	= Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
PIPK	= Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
PLHUT	= Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu
PPIU	= Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
PNBP	= Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPG	= Pendidikan Profesi Guru
PTKN	= Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
RB	= Reformasi Birokrasi
RKA-K/L	= Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
SAKIP	= Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
SBSN	= Surat Berharga Syariah Negara
SMART	= Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
SIMKAH	= Sistem Informasi Manajemen Nikah
SOP	= Standar Operasional Prosedur
SPBE	= Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	= Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
UPG	= Unit Pengendali Gratifikasi
WTP	= Wajar Tanpa Pengecualian
ZI	= Zona Integritas



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR SINGKATAN	6
DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR TABEL.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 Kondisi Umum.....	9
1.2 Potensi dan Permasalahan	26
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	38
2.1 Visi dan Misi.....	38
2.2 Tujuan.....	38
2.3 Sasaran Kegiatan	45
2.4 Identifikasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.....	52
2.5 Rumusan Pengukuran / Metadata	59
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	61
3.1 Target Kinerja.....	61
3.2 Kerangka Pendanaan.....	68
BAB IV PENUTUP	70
Lampiran I : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN	71
Lampiran II : MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA,.....	126
Lampiran III : METADATA INDIKATOR KINERJA	127





DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jumlah Penyuluh Agama
- Tabel 2 Jumlah Pemeluk Agama
- Tabel 3 Rasio Penyuluh Agama dengan Jumlah penduduk
- Tabel 4 Jumlah kelompok sasaran Penyuluhan
- Tabel 5 Jumlah Rasio kelompok sasaran penyuluh dan rasio penyuluh tiap agama
- Tabel 6 Nilai Indeks Kerukunan Dari Tahun 2020 – 2024
- Tabel 7 Data Penanganan Konflik Antar Umat Beragama Jawa Tengah
- Tabel 8 Rumah Ibadah
- Tabel 9 Peristiwa Nikah
- Tabel 10 Revitalisasi KUA di Kanwil Kemenag Prov. Jateng
- Tabel 11 Jumlah Penghulu menurut tingkat dan jabatan
- Tabel 12 Jumlah KUA berdasarkan Tipologi
- Tabel 13 Jumlah Sertifikasi halal yang terbit di Provinsi Jawa Tengah
- Tabel 14 Sertifikat Halal Skala Usaha
- Tabel 15 Jumlah Jamaah Haji Kanwil Kemenag Prov. Jateng
- Tabel 16 Jumlah Organisasi Pengelola Zakat
- Tabel 17 Jumlah Izop Lembaga Pengelola Zakat
- Tabel 18 Jumlah RA Dan Madrasah Se Jawa Tengah
- Tabel 19 Data Pondok Pesantren, MDT dan LPQ





BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan kondisi umum, potensi, dan tantangan berdasarkan evaluasi pencapaian Renstra Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 2020-2024, mencakup pembangunan bidang agama dan pendidikan, dengan fokus pada kualitas pemahaman agama, moderasi beragama, kerukunan, serta penguatan layanan dan ekonomi keagamaan, juga pendidikan berciri agama, pendidikan agama, keagamaan, dan pesantren. Pembangunan keagamaan merupakan pilar penting dalam memperkuat identitas dan kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat. Berbagai pencapaian positif telah diraih, seperti meningkatnya toleransi antarumat beragama, penguatan peran agama dalam kehidupan bermasyarakat, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta peningkatan budaya literasi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan harmoni sosial, partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya, serta penanganan konflik berbasis agama dan budaya. Oleh karena itu, upaya kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan pembangunan di bidang keagamaan terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat

1.1 Kondisi Umum

Sebagai Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi.

1.1.1 Bidang Agama

Kondisi umum bidang agama menggambarkan pencapaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melalui beberapa program untuk mendukung sasaran yang dirumuskan dari tujuan bidang agama dan keagamaan.

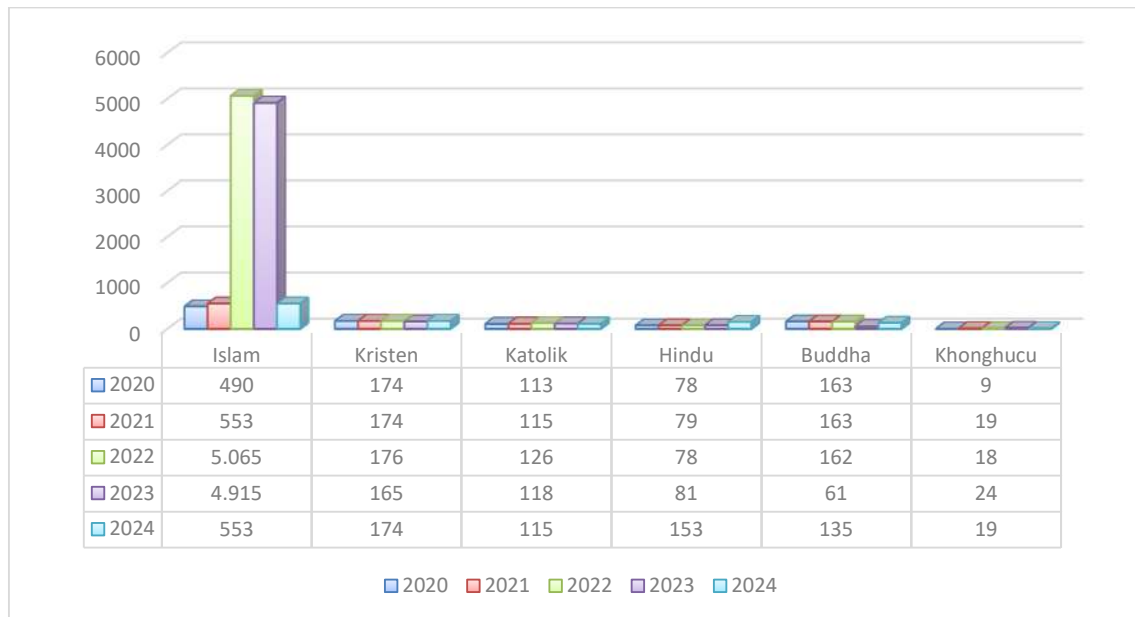
Pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang baik diperlukan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang heterogen di Jawa Tengah. Dalam hal ini, literasi keagamaan yang kuat menjadi fondasi penting untuk mendorong praktik keagamaan yang lebih bijak dalam kehidupan sosial. Dengan literasi yang memadai, masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian sosial, menjunjung tinggi etika dan budi pekerti di ruang publik, serta mematuhi aturan sosial maupun negara.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
 Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Provinsi Jawa Tengah

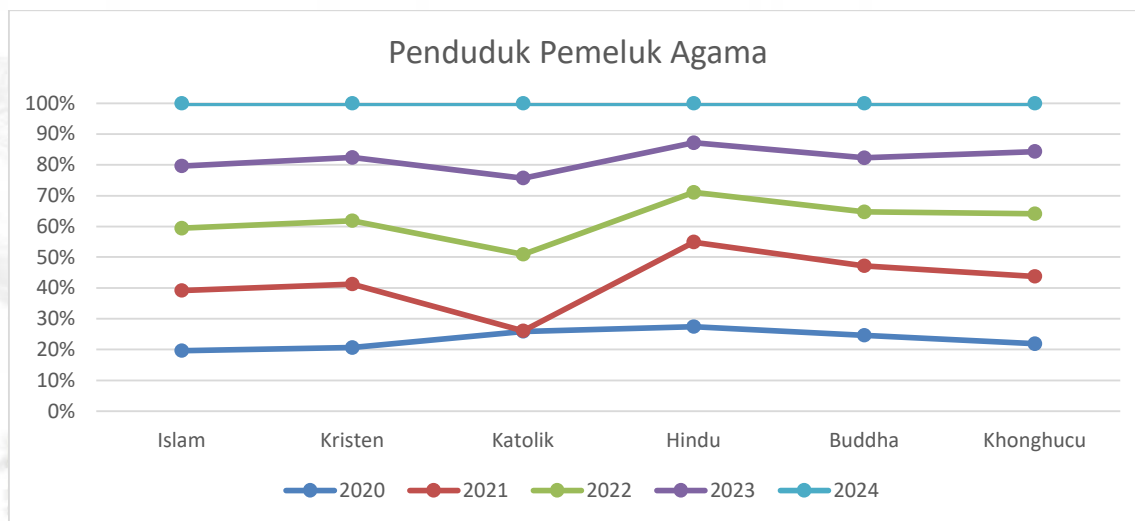
Kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama terkait aspek kepedulian dan solidaritas sosial, relasi antar manusia (kebhinekaan), kepedulian lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah. Dalam mendukung pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dilakukan kegiatan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama secara berkelanjutan. Pemenuhan rasio penyuluh dengan kelompok sasaran penyuluhan agama sebagai modal dasar dalam bimbingan dan penyuluhan agama

Tabel 1 Jumlah Penyuluh Agama



Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

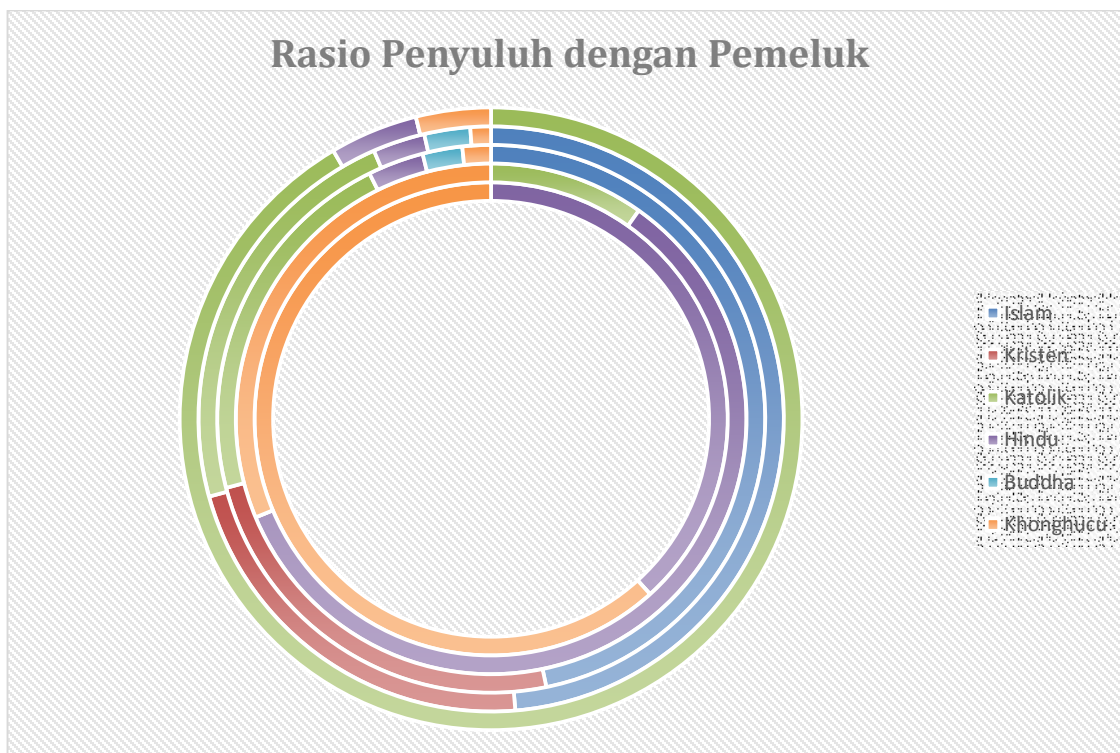
Tabel 2 Jumlah Pemeluk Agama



Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

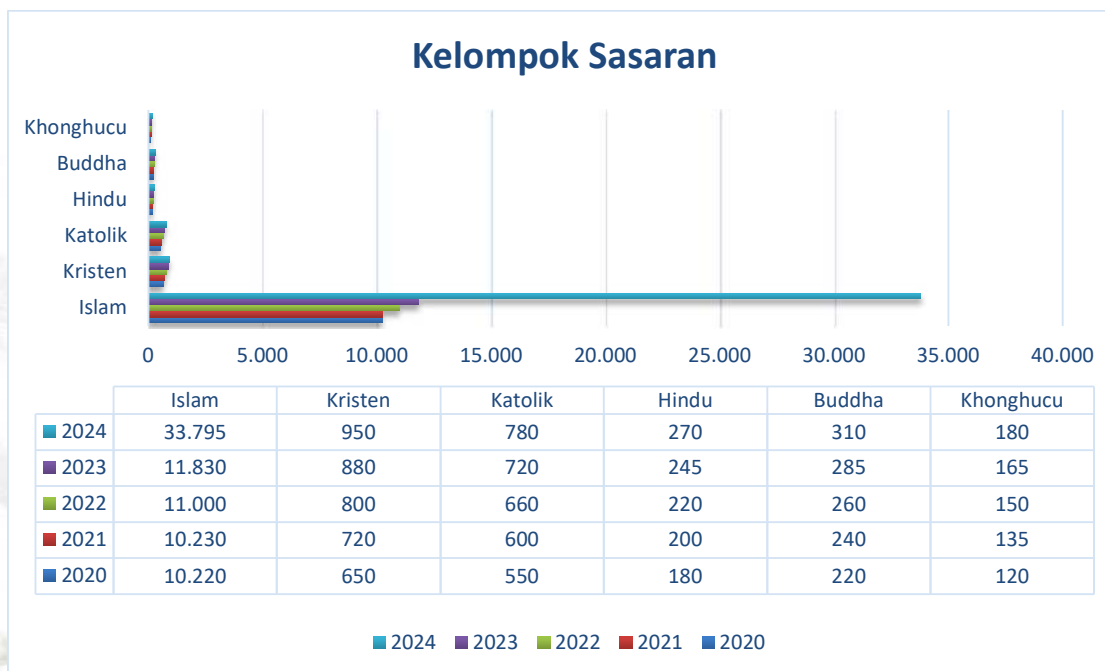


Tabel 3 Rasio Penyuluh Agama dengan Jumlah penduduk



Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

Tabel 4 Jumlah kelompok sasaran Penyuluhan



Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025



Tabel 5 Jumlah Rasio kelompok sasaran penyuluh dan rasio penyuluh tiap agama

No	Agama	Rasio Penyuluh dengan Kelompok Sasaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Islam	1 : 21	1:18	1 : 2	1 : 2	1 : 61
2	Kristen	1 : 3	1:4	1: 4	1 : 5	1 : 5
3	Katolik	1 : 5	1:5	1: 5	1 : 6	1 : 7
4	Hindu	1 : 4	1:4	1: 2	1 : 3	1 : 2
5	Buddha	1 : 44	1 : 60	1:2	1 : 2	1 : 78
6	Khonghucu	1 : 13	1 : 7	1:8	1 : 7	1 : 9

Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

Pembinaan Penyuluh Agama di provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas penyuluh agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan pelatihan dan pengembangan bagi penyuluh agama untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam bidang keagamaan dan penyuluhan. Pembinaan penyuluh ditekankan pada materi Dakwah Di *Era Society 5.0* (Penggunaan Media Sosial Sebagai tempat untuk berdakwah) dan penguatan moderasi beragama. Salah satu bentuk kegiatan pembinaan Penyuluh yaitu *Coaching Clinic* Pembuatan Konten Digital yang Inklusif Transformatif bagi Penyuluh Agama Islam.

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititik beratkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik antar dan intra umat beragama serta mempererat hubungan antar umat beragama maupun di dalam satu komunitas agama yang diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Dalam memperkuat moderasi dan kerukunan, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah membangun kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah, FKUB, Kesbangpol, TNI/Polri, dan lembaga pendidikan tinggi keagamaan. Melalui sinergi lintas sektor, Kemenag menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan Gerakan Moderasi Beragama di Sekolah, Madrasah, dan Kampus, serta kegiatan Kemenag *Goes to School* dan Kemenag *Goes to Campus* untuk memperkenalkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman kepada generasi muda.

Penguatan Kerjasama dan Kolaborasi Lintas Sektor, dilakukan dalam bentuk kerja sama Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI mendukung pelaksanaan survei dan pengukuran Indeks Moderasi Beragama (IMB) serta Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan hasil survei nasional, Indeks Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah mencapai 78,98 (kategori tinggi), mencerminkan efektivitas pelaksanaan program moderasi beragama dan pembinaan kerukunan di daerah.



Tabel 6 Nilai Indeks Kerukunan Dari Tahun 2020 – 2024



* Tahun 2020 Masa Pandemi Covid

Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

Capaian ini menegaskan bahwa pelaksanaan program moderasi beragama dan kerukunan umat beragama telah berjalan efektif, berdampak luas, dan memperkuat stabilitas sosial di daerah. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mengimplementasikan tujuan strategis penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama melalui strategi edukatif, kolaboratif, dan berbasis data. Tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman keberagamaan yang moderat, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dan kohesi antar umat beragama.

Tabel 7 Data Penanganan Konflik Antar Umat Beragama Jawa Tengah

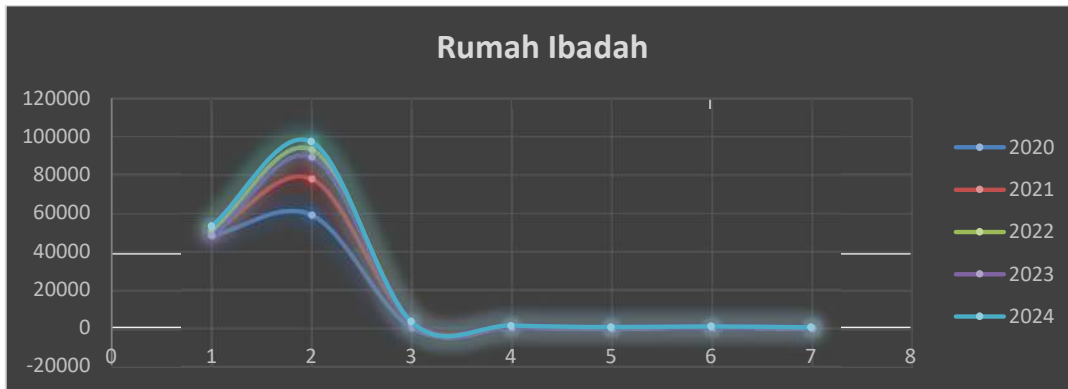


Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

Kementerian Agama berperan aktif dalam pemberdayaan dan pembangunan rumah ibadah sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan melalui dukungan infrastruktur, Pendampingan pengelolaan, dan fasilitasi sarana ibadah, Kemenag mendorong rumah ibadah menjadi pusat kegiatan keagamaan yang aman, nyaman, dan inklusif.



Tabel 8 Rumah Ibadah



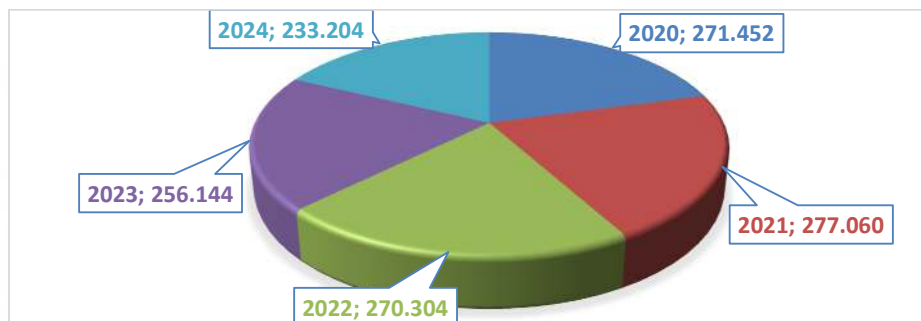
1. Masjid, 2. Mushola, 3. Gereja Kristen, 4. Gereja Katholik, 5. Pura, 6. Vihara, 7. Klenteng

Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

Kantor Urusan Agama (KUA) menyediakan berbagai layanan keagamaan yang diperlukan umat beragama. Layanan ini mencakup, antara lain, pendaftaran dan pencatatan pernikahan, penyuluhan agama, pengelolaan zakat dan wakaf, dan layanan bimbingan haji.

Jumlah peristiwa nikah sepanjang periode tahun 2020–2024 tercatat menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun. Tren ini terlihat jelas pada diagram berikut, yang menggambarkan perubahan angka peristiwa nikah selama lima tahun terakhir dan menjadi dasar analisis untuk melihat dinamika kebutuhan layanan pencatatan nikah di wilayah tersebut.

Tabel 9 Peristiwa Nikah



Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

Sejak tahun 2022, Kementerian Agama meluncurkan program prioritas Revitalisasi KUA. KUA diarahkan menjadi Pusat Layanan Keagamaan (KUA Pusaka) sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat beragama sebagai pengguna layanan KUA. Peningkatan kualitas layanan KUA yang dilakukan oleh Kementerian Agama meliputi perbaikan fisik KUA, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM KUA revitalisasi, Penguatan transformasi digital pelayanan KUA, dan Pengembangan layanan KUA untuk pemberdayaan ekonomi umat.



Tabel 10 Revitalisasi KUA di Kanwil Kemenag Prov. Jateng

Tahun	Jumlah KUA
2020	-
2021	-
2022	65
2023	64
2024	8

Sumber: SK Dirjen Bimas Islam Kemenag RI

Tabel 11 Jumlah Penghulu menurut tingkat dan jabatan

Tingkat Jabatan	2020	2021	2022	2023	2024
Pertama	177	182	131	138	211
Muda	493	534	283	295	320
Madya	249	212	385	360	477
Utama	0	0	0	0	6

Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

Tabel 12 Jumlah KUA berdasarkan Tipologi

Tahun	Berdasarkan Tipologi KUA				
	A	B	C	D1	D2
2020	10	130	440	0	2
2021	10	130	440	0	2
2022	10	130	440	0	2
2023	11	122	449	0	2
2024	5	96	479	0	2

Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

Layanan Sertifikasi Produk Halal merupakan salah satu layanan utama Kementerian Agama yang bertujuan memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam ajaran agama. Meski layanan sertifikasi halal kini berada di BPJPH, Kementerian Agama tetap mengawal kebijakan halal, memastikan tata kelola yang akuntabel, dan memperkuat literasi halal masyarakat melalui penyuluh agama, pengawas halal, serta jaringan 573 KUA di Prov. Jawa Tengah.



Tabel 13 Jumlah Sertifikasi halal yang terbit di Provinsi Jawa Tengah

TAHUN	JUMLAH SERTIFIKAT
2020	-
2021	1.870
2022	18.859
2023	149.400
2024	150.087

Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

Data tahun 2020 belum tersedia dikarenakan tahap awal penyesuaian sistem pencatatan layanan. Setelah fase tersebut, tercatat tren pertumbuhan penerbitan sertifikat halal yang meningkat pesat setiap tahunnya.

Tabel 14 Sertifikat Halal Skala Usaha

TAHUN	SKALA USAHA				
	MIKRO	KECIL	MENENGAH	BESAR	TOTAL
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	18.590	116	32	121	18.859
2023	140.416	8.903	17	64	149.400
2024	148.117	1.795	33	142	150.087

Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

Hal ini karena masifnya sosialisasi program Sehat (Sertifikat Halal Gratis) *Self Declare*, terjadi tren peningkatan capaian yang sangat signifikan (eksponensial) pada tahun-tahun berikutnya. Lonjakan drastis jumlah produk bersertifikat halal di Jawa Tengah ini berakibat pada meningkatnya daya saing (*competitiveness*) UMKM lokal di pasar global serta menguatnya kepercayaan publik terhadap jaminan produk halal di Jawa Tengah.

Kualitas penyelenggaraan ibadah haji terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2024 secara nasional mencapai angka 88,20 dengan predikat Sangat Memuaskan. Capaian ini menjadi indikator penting bagi Jawa Tengah, mengingat Embarkasi Solo (SOC) merupakan salah satu penyumbang jemaah terbesar di Indonesia. Tingginya angka kepuasan nasional ini merefleksikan keberhasilan manajemen layanan di tingkat daerah, mulai dari layanan akomodasi di Asrama Haji Donohudan, layanan katering, hingga bimbingan manasik yang



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

dilakukan oleh Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Angka 88,20 ini selanjutnya menjadi *baseline* (tolok ukur) bagi Kanwil Kemenag Jawa Tengah untuk mempertahankan standar layanan prima pada periode 2025-2029

Tabel 15 Jumlah Jamaah Haji Kanwil Kemenag Prov. Jateng

TAHUN	JUMLAH JAMAAH HAJI
2020	-
2021	-
2022	13.868
2023	30.377
2024	32.080

Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

Program pemberdayaan zakat memerlukan Langkah-langkah strategis mengingat capaian pengumpulan dana zakat masih jauh potensi yang ada saat ini. Oleh karena itu diperlukan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan capaian pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Langkah strategis yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat yang mencakup :
 - (a) persentase Lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah, (b) persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi, (c) persentase Lembaga yang dibina, (d) peningkatan validitas data pokok zakat dengan memperkuat peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi, (e) peningkatan kualitas perencanaan untuk mendorong tercapainya target pengumpulan zakat, (f) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan DSKL antara Lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk menjaga kesinambungan pengelolaannya, (g) peningkatan efektifitas zakat untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing ekonomi Islam, (h) pengendalian izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) baru, (i) peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintah dalam penguatan pengembangan ZIS dan DSKL.
- b. Meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi umat melalui;
 - (a) peningkatan partisipasi Masyarakat, industry dan ormas islam, (b) melakukan pendataan lembaga pengelola ZIS dan DSKL berbasis web, (c) pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan ZIS dan DSKL yang lebih baik, (d) peningkatan partisipasi organisasi pengelola zakat untuk pengentasan kemiskinan, (e) peningkatan sosialisasi pentingnya dana social keagamaan kepada Masyarakat.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan dari program ini diwujudkan dalam kegiatan yang berorientasi pada tata kelola organisasi pengelola zakat (BAZNAS dan LAZ) secara profesional, akuntabel, transparan dan patuh terhadap ketentuan syariah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya;

a) Supervisi kelembagaan zakat;

Supervisi kelembagaan zakat sasarannya adalah BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Skala Provinsi, Skala Kabupaten/Kota dan LAZ skala Nasional Perwakilan Provinsi di Jawa Tengah.

Tabel 16 Jumlah Organisasi Pengelola Zakat

NO	ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	BAZNAS Provinsi	1	1	1	1	1
2	BAZNAS Kabupaten/Kota	35	35	35	35	35
3	Provinsi	2	2	2	2	3
4	Kabupaten/Kota	9	9	9	16	21
5	LAZNAS Perwakilan Provinsi	10	10	10	13	13
Jumlah		57	57	57	67	73

Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

Selain itu pembinaan kelembagaan zakat juga dilakukan dengan penyelenggaraan berbagai rapat koordinasi.

b) Sosialisasi dan pendampingan audit syariah.

Sasaran kegiatan ini adalah diprioritaskan untuk Lembaga Amil Zakat yang akan melakukan perpanjangan ijin operasional dan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota yang periode kepemimpinannya baru atau akan habis.

c) Pelatihan dan Sertifikasi Amil;

Pelatihan dan sertifikasi amil pada tahun 2023 diperuntukan bagi 80 amil kerja sama dengan LSP BAZNAS RI.

Kantor Wilayah Kementerian Agama mendapatkan kewenangan pemrosesan perizinan untuk LAZ Skala kabupaten/kota dan LAZNAS Perwakilan Provinsi.

Tabel 17 Jumlah Izop Lembaga Pengelola Zakat

NO	LEMBAGA AMIL ZAKAT	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten/Kota	0	0	9	7	5
2	LAZNAS Perwakilan Provinsi	0	0	10	3	0

Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025



Ikhtiar keterlibatan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah dalam pengentasan kemiskinan melalui pendayagunaan zakat berkolaborasi dengan BAZNAS dan LAZ. Sinergi program program diimplementasikan melalui program Kampung Zakat dan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA. Adapun Lokasi program dan Lembaga kolabolator sebagai berikut:

Program berupa pembiarian langsung diantaranya;

1. Festival Ramadhan. Pemberian santunan dan bingkisan kepada fakir miskin.
2. Gebyar Muharam berupa pembirian beasiswa dan santunan kepada yatim piatu dan penyandang disabilitas.

Adapun program pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan adalah;

1. Program kampung Zakat;
Program Kampung Zakat merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis desa. Program ini bersinergi dengan BAZNAS, LAZ, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Terdapat 10 lokasi di Jawa Tengah. Program bidang garapannya pada 6 bidang yaitu Dakwah Islam, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Moderasi Beragama.
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA.
Merupakan program pemberdayaan ekonomi dalam skala kecamatan. Di Jawa Tengah terdapat 53 lokasi (kecamatan) program pada 24 Kabupaten/Kota. Adapun penerima manfaat program sebanyak 538 orang.

Pembinaan dan supervisi Lembaga Amil Zakat dilakukan berdasarkan data. Data lembaga amil zakat dapat diakses melalui laman simzat.kemenag.go.id. lama tersebut diperuntukan untuk pengelolaan:

1. Permohonan perizinan Lembaga amil zakat skala provinsi, LAZNAS Perwakilan Provinsi dan unit layanan.
2. Pengelolaan program pendayagunaan zakat;
3. Dukungan seleksi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten.

Dalam upaya mendorong peningkatan capaian pengumpulan dana ZIS dan DSKL telah dilaksanakan program literasi zakat kolaborasi dengan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Adapun sasaran program adalah dai, penyuluh agama Islam dan tokoh agama masing-masing Lokasi peserta 80 orang. Kegiatan telah diselenggarakan pada tahun 2025 diantaranya; Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten batang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo. Ekonomi keagamaan umat memiliki potensi strategis dalam



meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi sosial ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat pendidikan dan layanan keagamaan. Pemberdayaan dana sosial keagamaan menjadi salah satu instrumen penting yang dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu layanan tersebut.

Beberapa kebijakan dan program yang dijalankan Kemenag untuk memperkuat pemberdayaan umat dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan dan program tersebut mencakup, antara lain: (1) Program Kampung Zakat; (2) Pemberdayaan Ekonomi Umat berbasis KUA; (3) Inkubasi Wakaf Produktif, dan (4) Program Kota Wakaf. Selain itu, Kemenag juga berupaya meningkatkan literasi masyarakat tentang dana sosial keagamaan.

1.1.2 Bidang Pendidikan

Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang PAI, Bidang PD Pontren, Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, telah berhasil meningkatkan akses, mutu, serta pemerataan layanan pendidikan agama dan keagamaan bagi peserta didik di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ini menunjukkan komitmen Kementerian Agama dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, dan berkarakter religius, sesuai dengan mandat nasional untuk mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.

Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Madrasah yang dilaksanakan Bidang Pendidikan Madrasah, peningkatan jumlah peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan bermutu tercermin dari berkembangnya madrasah negeri dan swasta di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Melalui kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah, berbagai intervensi dilakukan untuk memastikan peserta didik memperoleh pembelajaran yang layak dan berkualitas, antara lain:

- Peningkatan sarana prasarana madrasah melalui pembiayaan SBSN, sehingga proses belajar mengajar berjalan nyaman dan representatif.
- Pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi guru madrasah (melalui kegiatan SCI) yang menjangkau ratusan guru di tingkat MI, MTs, dan MA.
- Pemberian bantuan operasional (BOS dan PIP) bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, yang menjamin tidak ada anak usia sekolah di madrasah yang putus pendidikan karena kendala ekonomi.

Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah juga berkolaborasi dengan Pemprov Jawa Tengah dalam hal peningkatan kesejahteraan pengajar keagamaan (Islam, Kristen, Katolik,



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

Hindu, Buddha dan Khonghucu) dengan memberikan Insentif setiap tahun. Untuk pembelajaran di jenjang Madrasah Aliyah juga diberikan BOSDA yang berasal dari Pemprov Jawa Tengah

Tabel 18 Jumlah RA Dan Madarasah Se Jawa Tengah

Tahun	Jenjang Pendidikan						
	RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS
2020	4.716	114	4.027	129	1.612	65	635
2021	4.740	114	4.054	129	1.631	65	655
2022	4.842	107	4.041	124	1.600	63	690
2023	4.863	107	5.065	409	1.890	63	700
2024	4.864	114	4.157	129	1.714	65	760

Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

Dalam hal Penguatan Kualitas Pendidikan Agama di Sekolah Umum, Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah juga memastikan seluruh peserta didik pada satuan pendidikan umum memperoleh pendidikan agama yang berkualitas, baik melalui kurikulum nasional maupun kegiatan keagamaan yang terintegrasi. Melalui program Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Kemenag memberikan tunjangan profesi kepada guru PAI Non-PNS, melatih guru melalui diklat dan workshop kompetensi pedagogik, serta menyusun materi ajar tematik moderasi beragama untuk jenjang SD hingga SMA.

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jawa Tengah telah memperoleh peningkatan kapasitas dan kesejahteraan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan karakter peserta didik di sekolah umum.

Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam dan Pesantren, melalui Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam juga melaksanakan program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam yang berfokus pada pembinaan pondok pesantren, madrasah diniyah, dan lembaga tahfidz. Melalui pemberian insentif bagi ustadz dan tenaga pendidik non-PNS, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, serta bantuan kelembagaan, kualitas pendidikan pesantren semakin meningkat.

Selain itu, kegiatan Supervisi Pembelajaran dan Akreditasi Madrasah memastikan proses belajar mengajar berjalan sesuai standar nasional pendidikan. Dampaknya, jumlah santri yang memperoleh layanan pendidikan keagamaan meningkat signifikan, disertai peningkatan kemandirian lembaga pesantren sebagai pusat pembinaan akhlak dan karakter bangsa.



Tabel 19 Data Pondok Pesantren, MDT dan LPQ

No	Jenis Lembaga	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pesantren	3,905	4,254	4,501	5,078	5,231
2	MDT	11,413	12,119	12,516	13,902	14,084
3	LPQ	28,339	35,327	35,926	42,252	42,658
4	SPM	9	11	12	15	37
5	PDF	15	11	11	12	37
6	PKPPS	205	189	213	273	247
7	Ma'had Aly	10	15	20	21	21

Sumber: Kemenag Jateng Dalam Angka tahun 2025

Adapun Penguatan Layanan Pendidikan Agama dan peningkatan akses layanan pendidikan juga terjadi di bidang Pendidikan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, di mana Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah memberikan pembinaan dan bantuan langsung kepada lembaga pendidikan keagamaan di bawah binaannya.

Beberapa capaian utama meliputi:

- Bantuan PIP dan BOS kepada peserta didik SMTK/SMAK dan lembaga pendidikan keagamaan Kristen dan Katolik.
- Bantuan sarana pendidikan keagamaan Hindu dan Buddha untuk mendukung pembelajaran yang layak.
- Pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan lintas agama agar mampu memberikan pembelajaran yang kontekstual dan moderat.

Upaya ini memastikan bahwa seluruh peserta didik, tanpa memandang agama, memperoleh kesempatan belajar yang sama dalam suasana toleran dan berkeadaban.

Melalui Penguatan Tata Kelola dan Sistem Informasi Pendidikan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah juga mengoptimalkan transformasi digital pendidikan melalui sistem EMIS 4.0 dan RDM (Raport Digital Madrasah), yang memungkinkan pengelolaan data peserta didik, tenaga pendidik, dan sarana prasarana secara terintegrasi.

Selain meningkatkan akurasi data pendidikan, sistem ini juga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*), serta memastikan proses akreditasi, sertifikasi, dan bantuan pendidikan tepat sasaran.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah berhasil meningkatkan jumlah peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan



agama, dan pendidikan keagamaan yang berkualitas melalui peningkatan akses, mutu, dan tata kelola lembaga pendidikan di seluruh jenjang. Program dan kebijakan yang dilaksanakan secara terpadu telah menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan profesionalitas guru, dan peningkatan mutu pembelajaran berbasis karakter dan moderasi beragama.

Dengan capaian tersebut, Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah berkontribusi besar dalam mewujudkan tujuan nasional pembangunan bidang pendidikan keagamaan yaitu mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global dalam bingkai kebinekaan.

1.1.3 Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik. Upaya ini merupakan bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan tujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi, Kemenag Jawa Tengah telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi.

Melalui Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Zona Integritas (ZI), seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil dan Kankemenag Kabupaten/Kota diwajibkan menandatangani Pakta Integritas, melaksanakan apel netralitas ASN, dan mengikuti sosialisasi anti-gratifikasi dan anti-korupsi. Selain itu, dibentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) serta Tim Agen Perubahan yang aktif melakukan edukasi integritas di seluruh lini pelayanan.

Sebagai upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyederhanaan Proses Layanan, Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi dan proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah menerapkan penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon, memperkuat fungsi jabatan fungsional seperti Perencana, Analis Kepegawaian, Analis Hukum, dan Pranata Keuangan. Selain itu, seluruh pelayanan publik kini dilaksanakan secara terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat, seperti layanan nikah, pendidikan, haji, dan bimbingan keagamaan. Transformasi digital melalui aplikasi Sakti, SIMPEG, e-Kinerja, SIRUP, LPSE, dan PTSP menjadikan proses pelayanan dan administrasi pemerintahan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama sebagai instansi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Sedangkan Peningkatan Kualitas SDM dan Budaya Melayani, Kemenag Jawa Tengah menempatkan penguatan SDM sebagai pilar utama perubahan budaya birokrasi. Seluruh ASN diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar ASN, Diklat Substantif, dan Bimtek Reformasi Birokrasi, dengan fokus pada penguatan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Hasil survei Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan peningkatan signifikan, sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jateng mencapai 90,91 (kategori sangat baik), menandakan budaya melayani telah melembaga di seluruh satuan kerja.

Dalam rangka memperkuat Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Publik, Kanwil Kemenag Prov. Jateng secara konsisten melaksanakan Perencanaan dan Pelaporan Berbasis Kinerja melalui e-Monev, SMART DJA, dan e-SAKIP. Capaian Nilai SAKIP Kanwil Kemenag Prov. Jateng sebesar 74,85 (kategori BB/Sangat Baik) menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan kinerja berbasis hasil (*result-based management*). Selain itu, informasi publik disediakan secara terbuka melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan portal resmi Kanwil Kemenag Prov. Jateng. Transparansi juga diwujudkan dalam pengelolaan keuangan, BMN, dan belanja publik melalui penerapan SPTJM, rekonsiliasi digital, dan audit internal reguler oleh Itjen Kemenag RI dan BPK. Temuan pemeriksaan yang bersifat administratif dapat ditindaklanjuti, mencerminkan komitmen tinggi terhadap akuntabilitas publik.

Secara keseluruhan, Kanwil Kemenag Prov. Jateng telah berhasil mewujudkan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, melalui penguatan integritas ASN, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Keberhasilan ini berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat, efektivitas layanan publik, serta terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil (*result-oriented government*). membuktikan bahwa budaya kerja aparatur di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jateng telah bertransformasi menuju birokrasi modern yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan publik

Kanwil Kemenag Prov. Jateng terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen ini merupakan bentuk nyata implementasi Reformasi Birokrasi di



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

lingkungan Kementerian Agama serta perwujudan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Langkah awal yang diambil adalah dengan menanamkan budaya kerja berintegritas di seluruh lini organisasi. Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah secara konsisten memberikan keteladanan dalam hal disiplin, transparansi, dan tanggung jawab publik. Setiap satuan kerja di bawah Kanwil diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan monitoring berkelanjutan.

Dalam aspek pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Kanwil Kemenag Prov. Jateng telah memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, serta optimalisasi Whistleblowing System (WBS) dan Layanan Pengaduan Masyarakat (LAPOR!). Seluruh proses pelayanan publik dilakukan secara transparan, dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan pasti, sejalan dengan semangat “*Kemenag Melayani*”.

Dari sisi pelayanan publik, Kanwil Kemenag Prov. Jateng terus berinovasi dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Berbagai layanan, seperti perizinan haji dan umrah, bimbingan masyarakat Islam, layanan pendidikan keagamaan, hingga pencatatan nikah, diarahkan menuju sistem pelayanan digital yang terintegrasi.

Selain itu, pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam proses pembangunan Zona Integritas. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah membuka ruang dialog, menerima masukan, serta melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala guna memastikan setiap layanan benar-benar memberikan manfaat dan memenuhi ekspektasi publik.

Komitmen ini tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi juga menyentuh pembentukan budaya kerja yang berorientasi pelayanan. Setiap ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah diharapkan menjadi *agent of change* dalam menumbuhkan semangat integritas, profesionalitas, dan kepedulian sosial. Upaya tersebut diperkuat dengan penegakan kode etik ASN, pengawasan internal yang efektif, serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi dalam reformasi birokrasi.

Dengan komitmen yang kuat, kerja kolektif, dan inovasi berkelanjutan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bertekad menjadi institusi publik yang terpercaya dan berintegritas tinggi, yang hadir melayani umat dengan sepenuh hati serta menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.



1.1.4 Aspirasi dan Isu Strategis

Hasil aspirasi masyarakat terkait kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 -2024 diantaranya :

1. Penguatan Moderasi Beragama dan Kerukunan Sosial

Tantangan intoleransi, polarisasi identitas agama, dan penyalahgunaan ruang publik untuk narasi ekstremisme masih terdapat mengemuka di tengah masyarakat.

Aspirasi Masyarakat:

Masyarakat mendambakan kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan saling menghargai, dengan peran aktif tokoh agama, Penyuluh, FKUB, dan lembaga pendidikan dalam menyebarkan nilai moderasi, toleransi, dan nasionalisme berbasis agama.

2. Optimalisasi Tata Kelola Dana Umat dan Aset Keagamaan

Potensi besar dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) belum sepenuhnya dikelola secara produktif, akuntabel, dan berbasis pemberdayaan umat.

Aspirasi Masyarakat:

Tersedianya sistem pengelolaan ZISWAF yang profesional dan transparan, serta pemanfaatan aset wakaf untuk program sosial dan ekonomi umat seperti pendidikan, dan usaha mikro.

3. Transformasi Digital Pelayanan Pemerintahan dan Pendidikan

Belum optimalnya adopsi teknologi digital dalam sistem layanan publik, perencanaan, dan pendidikan menyebabkan rendahnya efisiensi dan partisipasi.

Aspirasi Masyarakat:

Pemerintah melalui Kementerian Agama diharapkan dapat menyederhanakan layanan publik berbasis digital, memperluas literasi digital, serta menyediakan sarana dan pelatihan untuk mendukung transformasi digital di semua lapisan.

4. Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi SDM

Masih terbatasnya pengembangan kapasitas bagi ASN, guru, penyuluh, dan tenaga layanan publik, serta belum meratanya kesejahteraan pegawai di berbagai daerah.

Aspirasi Masyarakat:

Tuntutan terhadap layanan publik yang lebih berkualitas mendorong masyarakat untuk berharap pada peningkatan kompetensi SDM aparatur serta peningkatan insentif, penghargaan, dan jenjang karier yang adil dan terbuka.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan pencapaian-pencapaian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa kondisi yang memengaruhi pencapaian dari Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024. Kondisi-kondisi tersebut dapat berupa



potensi maupun permasalahan yang dihadapi sehingga target-target dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 dapat tercapai dengan baik, belum tercapai dengan maksimal bahkan tidak tercapai. Potensi merujuk pada segala sesuatu yang dapat mendukung pembangunan dan dapat dikembangkan kearah yang lebih baik, sedangkan permasalahan, merujuk pada segala sesuatu yang menghambat pembangunan dan pengembangan organisasi.

Potensi dan permasalahan tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk menjalankan tugasnya pada periode-periode berikutnya. Berikut merupakan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan Analisa jangka menengah selama periode 2020-2024.

1.2.1 Potensi yang Dimiliki

- a. Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam penguatan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan yang mencerminkan komitmen terhadap moderasi beragama dan penguatan karakter bangsa. Keberadaan lembaga keagamaan yang tersebar luas, seperti pesantren, madrasah, pendidikan diniyah, serta forum-forum dialog lintas agama seperti FKUB, menjadi modal sosial yang kuat dalam membangun harmoni dan toleransi antarumat beragama. Semakin meningkatnya peran tokoh agama dan organisasi keagamaan turut memperkuat daya jangkau program pembinaan umat, penyuluhan agama, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat yang beragam.
- b. Di bidang pendidikan, potensi besar terletak pada kebijakan yang mendukung pembelajaran inovatif dan penguatan kurikulum berbasis moderasi beragama. Program Merdeka Belajar, pendidikan prasekolah satu tahun, serta pendidikan keagamaan berbasis pesantren menjadi ruang strategis untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan pemahaman keberagaman. Ditambah dengan peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan profesi dan pelatihan berkelanjutan, kualitas pembelajaran pun semakin mampu menjawab tantangan zaman.
- c. Potensi dalam pengelolaan keuangan umat juga sangat menjanjikan, terutama melalui optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Lembaga-lembaga pengelola seperti BAZNAS dan BWI memiliki kapasitas dan jejaring yang luas, serta telah didukung sistem digital yang mempermudah transparansi dan akuntabilitas. Percepatan sertifikasi tanah wakaf, peningkatan jumlah akta ikrar wakaf, dan pembinaan nazhir menjadi indikator bahwa wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat mulai mengalami penguatan dan profesionalisasi dalam pengelolaannya.



- d. Dari sisi reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi, potensi besar terletak pada komitmen Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah dalam menerapkan sistem berbasis kinerja, digitalisasi layanan, dan integrasi data. Penerapan *e-planning*, *e-budgeting*, dan sistem informasi manajemen kinerja telah mempercepat transformasi manajemen publik menuju arah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kompetensi ASN, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan peran pengawasan internal semakin mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- e. Potensi penguatan sistem komunikasi publik dan kehumasan tidak kalah penting. Dengan memanfaatkan media sosial, kanal informasi digital, serta layanan keterbukaan informasi publik, instansi pemerintah dan lembaga keagamaan mampu menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan efektif. Tingginya partisipasi masyarakat dalam menerima, menanggapi, bahkan menyampaikan aspirasi melalui saluran resmi menjadi indikator bahwa keterbukaan informasi telah menjadi kekuatan baru dalam membangun pemerintahan yang partisipatif dan adaptif. Dengan memanfaatkan seluruh potensi tersebut secara maksimal, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk membangun tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial keagamaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Meskipun berbagai upaya peningkatan kualitas layanan publik dan keagamaan telah dilakukan, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya. Diantaranya sebagai berikut :

- a. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di berbagai sektor masih menjadi tantangan. Tidak semua aparatur sipil negara, tenaga pendidik, pengelola zakat dan wakaf, maupun petugas layanan publik memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan sistem digital dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola modern. Kesenjangan ini berdampak pada lambatnya transformasi layanan menuju pelayanan berbasis teknologi yang cepat, transparan, dan efisien. Di sisi lain, resistensi terhadap perubahan dan minimnya pelatihan lanjutan juga turut memperlambat laju reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja.
- b. Permasalahan lain yang krusial adalah rendahnya literasi masyarakat, khususnya dalam hal moderasi beragama, literasi digital, dan pemahaman hukum keagamaan seperti zakat dan wakaf. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program pembangunan sosial keagamaan, termasuk sertifikasi tanah wakaf, penyusunan akta ikrar wakaf, maupun pelaporan keuangan berbasis digital. Akibatnya, potensi besar



- dari aset wakaf dan dana ZIS belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan ekonomi umat.
- c. Dari sisi tata kelola organisasi dan sistem informasi, belum optimalnya integrasi data dan pengawasan menjadi kendala serius. Beberapa sistem informasi yang ada masih berjalan terpisah antar unit kerja, sehingga menyulitkan proses pemantauan dan evaluasi program secara menyeluruh. Selain itu, tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan evaluasi program belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga perbaikan layanan seringkali berjalan lambat dan tidak menasar akar permasalahan.
 - d. Ancaman intoleransi, hoaks, dan penyalahgunaan ruang publik untuk kepentingan sektarian juga menjadi tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama. Meskipun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah aktif melakukan dialog dan mediasi, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan program kerukunan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Minimnya literasi keberagaman dan kurangnya ruang dialog terbuka membuat masyarakat mudah terprovokasi oleh isu keagamaan yang sensitif. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan komunikasi publik yang efektif menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun harmoni sosial yang berkelanjutan.

1.2.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk membantu menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, maka tidak dapat mengetahui potensi yang dimiliki, kekuatan, kelemahan dan peluang yang bisa dimanfaatkan. Karena tujuan dari Analisis SWOT adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu organisasi atau instansi. Dengan empat aspek tersebut diharapkan mampu memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mereduksi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Sehingga dapat menentukan dan mengambil kebijakan strategi tepat yang dapat dilakukan untuk terus berinovasi agar dapat tercapai tujuan Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah yang diharapkan.

Analisis dari Tujuan : 1) Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial :

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Kapasitas SDM Keagamaan yang mumpuni Seluruh penyuluh agama ASN dan non-ASN aktif menjalankan fungsi bimbingan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat secara rutin di seluruh kabupaten/kota. Hal ini menjadi	1. Pemanfaatan Teknologi yang Belum Merata Meskipun layanan digital seperti SIMKAH dan e-PA telah berjalan, belum semua satuan kerja dan masyarakat mampu memanfaatkannya secara optimal karena keterbatasan literasi digital dan jaringan internet.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>modal kuat dalam memperluas jangkauan pembinaan keagamaan.</p> <p>2. Layanan Keagamaan yang Terstandarisasi dan Berbasis Digital Implementasi SIMKAH Web di seluruh KUA mempermudah masyarakat mengakses layanan nikah dan rujuk secara cepat, sah, dan transparan, sekaligus memperkuat tertib administrasi keagamaan.</p> <p>3. Kolaborasi Lintas Agama yang Solid Bidang-bidang Bimas lintas agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) memiliki sinergi dalam pembinaan rumah ibadah, fasilitasi lembaga keagamaan, dan peningkatan kualitas pelayanan keagamaan secara merata dan inklusif.</p> <p>4. Peningkatan Peran Sosial Keagamaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif semakin terarah dengan adanya pembinaan, sertifikasi tanah wakaf, serta dukungan bagi BAZNAS dan BWI. Ini memperkuat fungsi sosial ekonomi umat.</p> <p>5. Kerukunan dan Partisipasi Umat yang Tinggi Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan meningkat, disertai dengan terjaganya stabilitas dan harmoni antarumat beragama di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>6. Keterpaduan Program Ritual dan Sosial Keagamaan Sinergi antara pembinaan ibadah ritual dan penguatan fungsi sosial-keagamaan menciptakan keseimbangan antara kesalehan individual dan sosial, yang mendukung tujuan pembangunan nasional bidang agama.</p>	<p>2. Kapasitas Kelembagaan Keagamaan yang Belum Seragam Masih terdapat perbedaan kemampuan tata kelola antara lembaga keagamaan besar dan kecil, khususnya dalam hal administrasi, pelaporan, dan akreditasi.</p> <p>3. Keterbatasan Anggaran Pemberdayaan Umat Program zakat, wakaf, dan pemberdayaan ekonomi umat masih menghadapi keterbatasan dukungan anggaran, sehingga jangkauan penerima manfaat belum maksimal.</p> <p>4. Monitoring dan Evaluasi yang Belum Terintegrasi Pelaksanaan pembinaan keagamaan lintas bidang belum seluruhnya didukung oleh sistem monitoring kinerja yang terintegrasi secara digital dan berbasis indikator hasil (<i>outcome</i>).</p>

PELUANG	ANCAMAN
<p>1. Dukungan dan kepercayaan masyarakat yang meningkat Partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan layanan publik menjadi modal penting memperluas jangkauan pembinaan dan pemberdayaan umat.</p> <p>2. Penguatan kolaborasi lintas agama dan lembaga keagamaan Sinergi dengan BAZNAS, BWI, PGI, PHDI, WALUBI, dan lembaga lainnya membuka ruang percepatan peningkatan layanan dan kerukunan.</p>	<p>1. Perkembangan paham keagamaan ekstrem dan intoleransi Risiko munculnya konflik antarumat beragama bila pembinaan tidak terus dilakukan secara intensif dan masif.</p> <p>2. Disparitas akses dan kualitas layanan wilayah terpencil, Keterbatasan jaringan, sarana keagamaan, dan tenaga penyuluh di daerah pedalaman dapat menghambat pemerataan layanan.</p> <p>3. Ketergantungan masyarakat pada informasi agama di media sosial</p>



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

PELUANG	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none">3. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan Sistem seperti SIMKAH Web, layanan konsultasi digital, dan pelaporan online penyuluh membuka peluang efisiensi dan perluasan layanan keagamaan.4. Kontribusi sektor keagamaan terhadap penguatan ekonomi umat dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif menjadi potensi besar meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.5. Dukungan kebijakan nasional terhadap Moderasi Beragama Menjadi peluang untuk memperkuat harmoni sosial dan mencegah potensi radikalisme berbasis keagamaan.	<ol style="list-style-type: none">3. Berpotensi menyebarkan hoaks, narasi kebencian, dan pemahaman agama yang keliru jika tidak diimbangi edukasi resmi dari pemerintah.4. Keterbatasan dukungan anggaran terhadap pembinaan keagamaan lintas agama Dapat menghambat peningkatan layanan dan pemberdayaan ekonomi umat secara lebih luas.5. Kerentanan terhadap isu sensitif yang dapat memicu konflik sosial Rumah ibadah, aset wakaf, dan masalah keluarga/komunitas dapat menjadi sumber gesekan jika tidak tertangani cepat dan tepat.

Kekuatan-kekuatan tersebut menjadi modal dasar strategis untuk mempercepat akselerasi capaian Renstra Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah ke depan, terutama dalam:

- memperluas digitalisasi layanan keagamaan,
- memperkuat peran penyuluh berbasis wilayah binaan,
- mengembangkan zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen kesejahteraan sosial,
- serta meningkatkan sinergi lintas agama dalam memperkuat moderasi dan kerukunan.

Analisis dari Tujuan : 2) Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama :

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen kelembagaan yang kuat terhadap moderasi beragama, didukung oleh kebijakan, program, dan kegiatan lintas bidang serta lintas agama.2. Sumber daya ASN dan penyuluh lintas agama yang kompeten dan aktif sebagai agen moderasi di masyarakat.3. Peran FKUB yang solid dan berfungsi efektif sebagai wadah komunikasi dan mediasi kerukunan hingga tingkat kabupaten/kota.4. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tinggi menunjukkan stabilitas sosial dan harmoni antarumat beragama.	<ol style="list-style-type: none">1. Sebagian wilayah masih memiliki literasi moderasi beragama yang rendah.2. Belum meratanya pelatihan dan penguatan kapasitas penyuluh lintas agama, baik dari aspek metodologi maupun teknologi informasi.3. Keterbatasan anggaran pembinaan FKUB dan dialog lintas iman, sehingga intensitas kegiatan belum sebanding dengan luasnya wilayah provinsi.4. Pemanfaatan platform digital masih terbatas pada tingkat provinsi, belum sepenuhnya menjangkau seluruh kabupaten/kota.5. Belum optimalnya integrasi data dan pemantauan capaian moderasi



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none">5. Kemitraan strategis lintas sektor dengan Pemda, TNI/Polri, lembaga pendidikan, dan ormas keagamaan berjalan baik.6. Pemanfaatan media digital dan kampanye daring moderasi beragama menjangkau masyarakat luas, khususnya generasi muda.7. Pelayanan keagamaan lintas agama yang inklusif dan berkeadilan, ditunjukkan dengan dukungan terhadap rumah ibadah dan lembaga keagamaan berbagai agama.	<p>beragama lintas bidang, sehingga evaluasi masih bersifat sektoral.</p>

PELUANG	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan kebijakan nasional terhadap Moderasi Beragama menjadi peluang percepatan program hingga tingkat akar rumput dengan legitimasi kuat dari pusat.2. Kemitraan lintas sektor yang semakin solid Kolaborasi dengan Pemda, FKUB, Kesbangpol, TNI/Polri, dan kampus memperluas cakupan pembinaan dan pencegahan konflik sosial-keagamaan.3. Pemanfaatan media digital untuk edukasi moderasi, Kampanye digital yang sudah berjalan membuka peluang penguatan literasi keberagaman generasi muda dengan jangkauan luas.4. Kondisi sosial keagamaan daerah yang relatif kondusif, Tidak adanya konflik bernuansa agama dalam tiga tahun terakhir menjadi modal besar menjaga stabilitas.5. Peran strategis penyuluh dan rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat Menjadi peluang memperkuat toleransi dan dialog antarumat secara berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none">1. Potensi infiltrasi paham ekstrem dan intoleransi berbasis digital Penyebaran radikalisme melalui media sosial dapat mengganggu kerukunan jika tidak ditangani cepat dan tepat.2. Kerentanan wilayah terhadap isu sensitif bernuansa agama persoalan pendirian rumah ibadah, perbedaan aliran, dan gesekan sosial dapat memicu konflik laten.3. Ketimpangan kapasitas FKUB dan penyuluh antarwilayah. Wilayah terpencil berisiko tidak mendapatkan pembinaan moderasi yang seimbang dengan perkotaan.4. Pengaruh ideologi transnasional dan politik identitas Dapat menciptakan polarisasi sosial dan menggerus nilai komitmen kebangsaan.5. Tantangan menjaga keberlangsungan program pasca pergantian kepemimpinan atau kebijakan Konsistensi kebijakan sangat dibutuhkan agar capaian tidak bersifat temporer.

Memperkuat kapasitas SDM lintas agama, memperluas jangkauan digitalisasi moderasi beragama hingga ke daerah terpencil, memperkuat sinergi FKUB dan pemerintah daerah, serta memastikan pembiayaan dan monitoring program berbasis data untuk menjaga kerukunan berkelanjutan dan harmoni sosial di Jawa Tengah.



Analisis dari Tujuan : 3) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan :

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none">1. Layanan Keagamaan yang Luas dan Terpadu Seluruh KUA telah beroperasi sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan dengan sistem SIMKAH Web, Bimwin, dan Keluarga Sakinah, menjamin pelayanan yang cepat, sah, dan transparan.2. Pelayanan Haji dan Umrah yang Profesional dan Terstandar Adanya PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu) di seluruh kabupaten/kota membuat akses masyarakat terhadap layanan ibadah lebih mudah dan terintegrasi, dengan tingkat kepuasan jemaah sangat baik.3. Fasilitasi dan Pembinaan Rumah Ibadah Lintas Agama telah menerima dukungan sarana, prasarana, serta bantuan operasional, memperkuat kesetaraan layanan bagi seluruh umat beragama.4. Kinerja Penyuluh Agama yang Aktif dan Terukur Seluruh penyuluh agama ASN dan non-ASN aktif melakukan bimbingan masyarakat lintas agama dan melaporkan kegiatan melalui aplikasi e-PA, menunjukkan tata kelola berbasis data dan kinerja yang transparan.5. Digitalisasi dan Inovasi Layanan Publik Pemanfaatan teknologi melalui SIMKAH Web, e-PA, PTSP Online, dan sistem layanan berbasis elektronik meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.6. Tingkat Kepuasan Publik yang Tinggi menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan keagamaan Kemenag.	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan SDM Teknis dan Literasi Digital Tidak semua pegawai dan masyarakat memahami secara optimal penggunaan sistem digital seperti SIMKAH Web dan e-PA, sehingga masih dibutuhkan pelatihan lanjutan.2. Ketergantungan pada Anggaran Pusat Pelaksanaan program fasilitasi rumah ibadah dan bantuan lembaga keagamaan masih sangat bergantung pada dukungan anggaran pusat, yang dapat membatasi fleksibilitas daerah dalam memperluas layanan.3. Belum Optimalnya Koordinasi Lintas Lembaga Keagamaan Meskipun pembinaan lintas agama telah berjalan, koordinasi dan integrasi data antar-Bimas (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) masih perlu diperkuat untuk menghasilkan sistem layanan terpadu yang menyeluruh.4. Monitoring Layanan Berbasis Kinerja Masih Parsial Belum semua jenis layanan keagamaan memiliki mekanisme evaluasi berbasis outcome dan indikator kepuasan spesifik lintas agama, sehingga sulit menilai dampak menyeluruh terhadap kualitas spiritual umat.

PELUANG	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none">1. Kemajuan teknologi digital dalam layanan keagamaan Digitalisasi seperti SIMKAH Web, e-PA, PTSP Online, membuka peluang semakin luasnya akses layanan keagamaan yang cepat, mudah, dan transparan.2. Kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang terus meningkat menjadi modal	<ol style="list-style-type: none">1. Risiko meningkatnya tuntutan publik terhadap kualitas layanan Jika layanan tidak berinovasi secara konsisten, tingkat kepuasan dapat cepat menurun di tengah ekspektasi masyarakat yang terus naik.2. Potensi penyalahgunaan ruang digital keagamaan Penyebaran konten negatif



PELUANG	ANCAMAN
<p>besar untuk penguatan inovasi layanan publik di bidang keagamaan.</p> <p>3. Dukungan kuat lembaga keagamaan dan sektor mitra Sinergi dengan BAZNAS, BWI, PPIU, FKUB dan ormas keagamaan membuka ruang kolaborasi dalam peningkatan pelayanan umat lintas agama.</p> <p>4. Profesionalitas penyuluh agama sebagai agen perubahan social Penyuluh lintas agama yang aktif di lapangan mampu memperluas jangkauan pembinaan hingga wilayah pedesaan dan komunitas rentan.</p> <p>5. Penguatan PLHUT dan peningkatan kualitas pelayanan haji-umrah Memperkuat posisi Kemenag sebagai pelayan ibadah umat yang profesional dan dipercaya publik.</p>	<p>seperti hoaks dan radikalisme dapat mengganggu ketertiban dan kualitas pembinaan agama.</p> <p>3. Ketergantungan pada anggaran pusat Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dapat menghambat percepatan pembangunan fasilitas layanan keagamaan secara merata.</p> <p>4. Isu sensitif pelayanan rumah ibadah lintas agama Jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu gesekan sosial yang mengancam stabilitas kerukunan.</p>

Kekuatan yang telah dimiliki menjadi modal utama akselerasi Renstra Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah ke depan, terutama dalam:

1. Memperluas layanan digital keagamaan berbasis data,
2. Meningkatkan pemerataan layanan keagamaan hingga daerah terpencil,
3. Memperkuat koordinasi lintas agama dan lintas sektor,
4. Serta memperkuat kompetensi sdm pelayanan publik yang profesional dan adaptif terhadap teknologi.

Analisis dari Tujuan : 4) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas :

KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>1. Akses pendidikan agama dan keagamaan semakin merata Tersedianya madrasah negeri dan swasta di seluruh kabupaten/kota serta bantuan PIP dan BOS menjamin pemerataan layanan pendidikan bagi peserta didik dari berbagai latar belakang ekonomi dan agama.</p> <p>2. Peningkatan mutu dan profesionalitas pendidik Pelaksanaan pelatihan, diklat, dan tunjangan profesi bagi guru PAI, guru madrasah, dan tenaga pendidik keagamaan lintas agama meningkatkan</p>	<p>1. Keterbatasan anggaran pembinaan dan bantuan operasional Alokasi dana untuk penguatan mutu lembaga pendidikan agama dan keagamaan masih terbatas dibandingkan dengan jumlah lembaga yang harus dibina.</p> <p>2. Kompetensi digital pendidik belum merata Belum semua guru dan tenaga kependidikan mampu mengoptimalkan sistem digital seperti EMIS dan RDM secara mandiri.</p> <p>3. Minimnya inovasi kurikulum kontekstual lintas agama</p>



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>kompetensi pedagogik dan kualitas pembelajaran.</p> <p>3. Dukungan sarana prasarana pendidikan yang kuat Pembiayaan melalui SBSN dan bantuan sarana pendidikan lintas agama telah memperbaiki lingkungan belajar dan meningkatkan mutu proses pendidikan.</p> <p>4. Penguatan tata kelola dan digitalisasi sistem pendidikan Implementasi EMIS 4.0 dan RDM (Raport Digital Madrasah) memperkuat manajemen data pendidikan dan mendukung kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).</p> <p>5. Pembinaan lintas agama yang inklusif dan moderat Pelibatan bidang Penmad, PAI, PD Pontren, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha menunjukkan komitmen pada pendidikan yang toleran, berkeadaban, dan sejalan dengan semangat moderasi beragama.</p>	<p>Materi ajar moderasi beragama dan pendidikan karakter masih perlu diperluas agar lebih adaptif terhadap tantangan sosial dan teknologi modern.</p>

PELUANG	ANCAMAN
<p>1. Dukungan kebijakan nasional terhadap penguatan pendidikan agama dan keagamaan Mendorong percepatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas di madrasah, pesantren, dan sekolah umum.</p> <p>2. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah dan pesantren Tren meningkatnya jumlah peserta didik menjadi peluang pengembangan lembaga pendidikan keagamaan secara berkelanjutan.</p> <p>3. Transformasi digital pendidikan (EMIS 4.0 & RDM) Memungkinkan pengelolaan data terintegrasi untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efisien.</p> <p>4. Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan lintas agama Menjadi kekuatan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan karakter berbasis moderasi beragama.</p> <p>5. Kolaborasi lintas sektor dan lembaga keagamaan Memperluas dukungan sarana-prasarana dan bantuan operasional bagi sekolah keagamaan dan rumah ibadah pembina peserta didik.</p>	<p>1. Masih rendahnya literasi digital sebagian satuan Pendidikan Hambatan dalam optimalisasi aplikasi EMIS 4.0 dan RDM berpotensi mengganggu tata kelola pendidikan digital.</p> <p>2. Ketergantungan pada pendanaan pusat Jika alokasi BOS, PIP, dan bantuan sarpras tidak mencukupi, pemerataan mutu pendidikan dapat terhambat.</p> <p>3. Pengaruh konten digital negatif terhadap peserta didik Potensi penyebaran radikalisme, intoleransi, dan perilaku menyimpang bila tidak dibarengi penguatan literasi keagamaan yang memadai.</p> <p>4. Persaingan lembaga pendidikan yang semakin ketat Madrasah dan sekolah keagamaan harus terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat.</p>



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

Dengan kekuatan berupa pemerataan akses, digitalisasi tata kelola, dan peningkatan profesionalitas pendidik, Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah memiliki fondasi kuat untuk mempercepat capaian Renstra 2025–2029. Perlu fokus pada penguatan inovasi pembelajaran berbasis karakter moderat, serta peningkatan kapasitas SDM dan pendanaan pendidikan agar transformasi layanan pendidikan keagamaan semakin berkelanjutan.

Analisis dari Tujuan : 5) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif :

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none">1. Budaya Integritas yang Kuat – Seluruh ASN berkomitmen melalui Pakta Integritas, UPG aktif.2. Reformasi Birokrasi Terimplementasi Baik – Struktur organisasi sudah disederhanakan dan fungsi jabatan fungsional diperkuat.3. Pelayanan Publik Terpadu dan Digital – PTSP, e-Kinerja, SIMPEG, SAKTI, dan SIRUP meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan.4. Indeks Pelayanan Publik Tinggi Mencerminkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat meningkat.5. SDM ASN Profesional dan Adaptif – ASN telah mengikuti pelatihan RB dan menerapkan nilai <i>BerAKHLAK</i>.6. Akuntabilitas Kinerja Terjaga – Nilai SAKIP kategori “Baik” menunjukkan penerapan manajemen kinerja berbasis hasil.	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai SAKIP Masih Perlu Ditingkatkan – Masih pada kategori <i>B</i> sehingga perlu penguatan outcome dan evaluasi kinerja lintas bidang.2. Keterbatasan Kapasitas Digital ASN – Tidak semua pegawai mampu mengoptimalkan sistem aplikasi baru secara maksimal.3.4. Koordinasi dan Sinergi Internal Belum Sepenuhnya Terpadu – Integrasi antarbidang masih perlu diperkuat dalam pelaksanaan RB dan ZI.5. Minimnya Dokumentasi dan Publikasi Inovasi – Capaian dan praktik baik belum sepenuhnya terdigitalisasi atau dipublikasikan secara nasional.

PELUANG	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan kuat kebijakan nasional Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) Memberikan peluang percepatan transformasi birokrasi hingga seluruh satuan kerja Kemenag di daerah.2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan public Sistem digital seperti Sakti, SIMPEG, e-Kinerja, SIRUP, LPSE, PTSP mempercepat layanan dan meningkatkan akuntabilitas.3. Budaya kerja <i>BerAKHLAK</i> semakin melembaga di seluruh ASN Menjadi modal besar untuk memperkuat kualitas layanan publik yang humanis dan profesional.	<ol style="list-style-type: none">1. Perubahan kebijakan pemerintah pusat dapat berdampak pada kontinuitas reformasi Pergantian pemimpin/struktur dapat memperlambat progres transformasi birokrasi.2. Ancaman perilaku gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan tetap ada Meski tren menurun, risiko pelanggaran integritas masih perlu diawasi secara ketat.3. Kesadaran digital yang belum merata antar-pegawai dan wilayah Perbedaan tingkat literasi digital berpotensi menghambat optimalisasi layanan berbasis teknologi.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

PELUANG	ANCAMAN
4. Meningkatnya kepercayaan publik didukung capaian Indeks Pelayanan Publik, membuka peluang memperluas inovasi layanan responsif.	4. Ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan. Jika inovasi tidak konsisten, kepuasan masyarakat dapat menurun cepat.
5. Kolaborasi dengan auditor internal dan eksternal. Memperkuat tata kelola keuangan, mendorong keberlanjutan pemerintahan yang bersih dan transparan.	5. Kerentanan terhadap serangan siber dan kebocoran data. Tingginya ketergantungan pada sistem elektronik menuntut keamanan digital yang kuat dan berkelanjutan.

Kekuatan berupa budaya integritas, digitalisasi layanan, dan profesionalitas ASN menjadi modal utama akselerasi Renstra berikutnya, sementara kelemahan seperti peningkatan SAKIP, penguatan kapasitas digital, dan pemerataan layanan harus menjadi fokus perbaikan strategis menuju birokrasi Kemenag yang unggul, bersih, dan respons





BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi

Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, yakni :
“Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi ini selaras dengan Visi Kementerian Agama Republik Indonesia. Visi tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini mengandung semangat transformasi dan kolaborasi yang mendalam, dan mencerminkan arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Visi ini juga menggambarkan arahan strategis yang menuntun seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi, inovasi, dan kerja keras, visi ini menjadi panduan untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa di tahun 2045, dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang.

Untuk mewujudkan Visi Kementerian Agama diatas, Misi yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan
2. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, Pendidikan keagamaan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

2.2 Tujuan

Untuk mencapai Misi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang sejalan dengan Tujuan Kementerian Agama sebagai berikut;

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing



5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital

Adapun Sasaran Kegiatan yang dapat merepresentasikan kinerja utama pada setiap tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah termasuk indikator kinerja sasaran kegiatan di dalamnya yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00;
- 2) Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS;
- 3) Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS;
- 4) Persentase peningkatan audiens MTQ/ PESPARAWI/ PESPERANI/ UTSAWA DHARMA GITA/ SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA;
- 5) Persentase peningkatan peserta event seni budaya;
- 6) Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.

2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 7) Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan);
- 8) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama;
- 9) Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi;
- 10) Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah;
- 11) Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan;
- 12) Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan;



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

- 13) Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat;
- 14) Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan;
- 15) Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah
- 16) Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan;
- 17) Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional;
- 18) Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti;
- 19) Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf;
- 20) Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 21) Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 22) Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan;
- 23) Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 24) Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
- 25) Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 26) Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);
 - Lembaga penyelenggara haji khusus;
 - Lembaga penyelenggara umrah



3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 27) Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik;

4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 28) Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;

- 29) Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana;

- 30) Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren;

- 31) Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha);

- 32) Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah;

- 33) Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 34) Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk;;

- a. literasi membaca
- b. Numerasi



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

- 35) Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas;
- 36) Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
- 37) Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler;
- 38) Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab);
- 39) Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan;
- 40) Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B;
- 41) Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara;
- 42) Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual;
- 43) Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional;
- 44) Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik;
- 45) Persentase materi ajar digital (modul, video, *e-book*) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 46) Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik;
- 47) Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP;
- 48) Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
- 49) Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik;
- 50) Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil;
- 51) Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil;
- 52) Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik;
- 53) Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil;
- 54) Persentase guru yang meningkat jenjang karir;



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

- 55) Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir;
 - 56) Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - 57) Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan;
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 58) Nilai Kinerja Anggaran;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 59) Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar;

- 60) Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 61) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;

- 62) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

- 63) Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;

- 64) Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);

- 65) Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai);

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 66) Indeks Profesionalisme ASN;

- 67) Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan;

- 68) Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif;



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 69) Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
- 70) Persentase rekomendasi izin orang asing;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 71) Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses;
- 72) Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 73) Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID;
- 74) Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 75) Indeks Pembangunan Statistik;
- 76) Persentase data statistik yang dipublikasi;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 77) Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output;





2.3 Sasaran Kegiatan

Pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 terdapat 19 (sembilan belas) Sasaran Kegiatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	
1	2	3	4	5	
	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	SS1 Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial	SK.1 Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK. 1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00
				IKSK. 1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
				IKSK. 1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
				IKSK. 1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSA WA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA
				IKSK. 1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya
				IKSK. 1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
		SS2 Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif	SK.2 Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK. 2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
				IKSK. 2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
				IKSK. 2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi
				IKSK. 2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS		SASARAN KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	
1	2	3		4		5	
						IKSK. 2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
						IKSK. 2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan
						IKSK. 2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
						IKSK. 2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan
						IKSK. 2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah
						IKSK. 2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
						IKSK. 2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional
						IKSK. 2.12	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti
						IKSK. 2.13	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf;
						IKSK. 2.14	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan;
				SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
				SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
						IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5		
			SK. 5	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK. 5.1 Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	
					IKSK. 5.2 Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	
			SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	IKSK. 6.1 Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah	
2	Program Wajib Belajar 13 Tahun	SS3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan	SK. 7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK. 7.1 Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang dengan predikat sangat baik lulus
				SK. 8	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK. 8.1 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
						IKSK. 8.2 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana
						IKSK. 8.3 Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
				IKSK. 8.4 Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN
1	2	3	4	5
				IKSK. 8.5 Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
				IKSK. 8.6 Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
		SS4 Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	SK.9 Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	IKSK. 9.1 Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi
				IKSK. 9.2 Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
				IKSK. 9.3 Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
				IKSK. 9.4 Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
				IKSK. 9.5 Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
				IKSK. 9.6 Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
				IKSK. 9.7 Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
				IKSK. 9.8 Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
				IKSK. 9.9 Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS		SASARAN KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN				
1	2	3		4		5				
						IKSK. 9.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional			
						IKSK. 9.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik			
						IKSK. 9.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran			
		SS5	Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	SK.10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK. 10.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik			
									IKSK. 10.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
									IKSK. 10.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
									IKSK. 10.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
									IKSK. 10.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
									IKSK. 10.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
									IKSK. 10.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
									IKSK. 10.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil
									IKSK. 10.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	
1	2	3	4	5	
				IKSK. 10.10 Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	
				IKSK. 10.11 Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	
				IKSK. 10.12 Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	
3	Program Dukungan Manajemen	SS7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	SK.11 Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK. 11.1 Nilai Kinerja Anggaran
				SK.12 Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK. 12.1 Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
					IKSK. 12.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75
				SK.13 Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK. 13.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
					IKSK. 13.2 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
					IKSK. 13.3 Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
					IKSK. 13.4 Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
					IKSK. 13.5 Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
				SK.14 Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK. 14.1 Indeks Profesionalisme ASN
					IKSK. 14.2 Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
					IKSK. 14.3 Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN
1	2	3	4	5
			SK.15 Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK. 15.1 Persentase kasus hukum yang terselesaikan IKSK. 15.2 Persentase rekomendasi izin orang asing
			SK. 16 Meningkatkan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK. 16.1 Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses IKSK. 16.2 Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
			SK. 17 Meningkatkan layanan informasi dan dokumentasi	IKSK. 17.1 Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID IKSK. 17.2 Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
			SK. 18 Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi	IKSK. 18.1 Indeks Pembangunan Statistik IKSK. 18.2 Persentase data statistik yang dipublikasi
			SK.19 Meningkatkan Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK. 19.1 Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output



2.4 Identifikasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> Potensi konflik antar umat beragama akibat intoleransi atau provokasi Rendahnya literasi moderasi beragama di masyarakat dan ASN Penyebaran ujaran kebencian dan hoaks di media sosial Lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan isu kerukunan Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan toleransi 	<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat dialog lintas agama dan forum kerukunan. Menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi moderasi beragama. Melakukan pemantauan media serta kampanye digital positif. Membentuk tim koordinasi lintas sektoral dengan SOP jelas. Melibatkan tokoh agama, pemuda, dan perempuan dalam program kerukunan. 	KUB, Bidang Urais, Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas SDM layanan keagamaan belum merata. Potensi diskriminasi atau eksklusivitas dalam layanan. Terbatasnya sarana dan prasarana layanan keagamaan. Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam layanan. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM. Penerapan standar layanan yang adil, inklusif, dan transparan. Penguatan infrastruktur layanan berbasis kebutuhan masyarakat. Monitoring dan evaluasi kepuasan layanan secara berkala. Digitalisasi dan inovasi layanan keagamaan agar lebih mudah diakses. 	KUB, Bidang Urais, Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan kuota dan alokasi jemaah haji. Keterlambatan layanan administrasi dan dokumen. Fasilitas transportasi, akomodasi, dan konsumsi kurang memadai. Kurangnya kompetensi petugas haji di lapangan. Gangguan kesehatan jemaah akibat cuaca, usia lanjut, atau penyakit 	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi manajemen kuota dan sistem pendaftaran haji. Peningkatan layanan administrasi berbasis digital. Koordinasi erat dengan penyedia layanan transportasi, akomodasi, dan catering. Pelatihan intensif dan sertifikasi petugas haji. Penguatan layanan kesehatan, bimbingan manasik, dan mitigasi risiko kesehatan jemaah. 	PHU



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem pendaftaran haji mengalami gangguan teknis/eror.2. Terjadi antrean panjang atau keterlambatan proses administrasi.3. Kurangnya pemahaman calon jemaah terhadap prosedur pendaftaran.4. Potensi pungutan liar atau praktik tidak transparan.5. Data pendaftar tidak akurat atau tidak terintegrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan backup sistem.2. Menyediakan mekanisme antrean dan layanan berbasis digital.3. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran secara rutin.4. Menerapkan standar layanan transparan dan pengawasan internal.5. Mengembangkan sistem data terintegrasi dengan verifikasi berlapis.	PHU
SK. 5	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	<ol style="list-style-type: none">1. Materi manasik haji kurang dipahami oleh jemaah.2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi pembimbing haji.3. Rendahnya partisipasi jemaah dalam kegiatan pembinaan.4. Media dan metode pembinaan kurang variatif dan tidak sesuai kebutuhan.5. Koordinasi antara Kemenag, KBIHU, dan pembimbing lapangan belum optimal.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan modul manasik yang sederhana dan mudah dipahami.2. Peningkatan pelatihan serta sertifikasi pembimbing haji.3. Meningkatkan sosialisasi dan motivasi agar jemaah aktif mengikuti pembinaan.4. Pemanfaatan teknologi (video, aplikasi, e-learning) untuk pembinaan.5. Penguatan koordinasi dengan KBIHU dan stakeholder terkait.	PHU
SK.6	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggara Haji Khusus dan Umrah tidak mematuhi regulasi.2. Kurangnya kualitas layanan travel (akomodasi, transportasi, dan bimbingan).3. Terjadi kasus penipuan atau keberangkatan tidak sesuai jadwal.4. Lemahnya sistem pengawasan dan sanksi bagi penyelenggara bermasalah.5. Rendahnya literasi calon jemaah terhadap regulasi dan hak mereka.	<ol style="list-style-type: none">1. Memperketat perizinan dan verifikasi legalitas penyelenggara.2. Melakukan audit layanan dan evaluasi berkala terhadap PPIU/PIHK.3. Menetapkan standar layanan minimal dan mekanisme pengaduan jemaah.4. Memperkuat pengawasan dengan sistem digital dan koordinasi lintas instansi.5. Meningkatkan sosialisasi regulasi kepada masyarakat calon jemaah.	PHU



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
SK.7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka putus sekolah di satuan pendidikan keagamaan. 2. Keterbatasan sarana, prasarana, dan akses pembiayaan pendidikan. 3. Kesenjangan kualitas guru dan tenaga kependidikan. 4. Rendahnya minat lanjut studi siswa karena faktor ekonomi/sosial. 5. Lemahnya monitoring penyelesaian pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan dukungan afirmatif. 2. Peningkatan sarana prasarana dan akses digital. 3. Pelatihan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 4. Sosialisasi pentingnya pendidikan berkelanjutan kepada orang tua dan masyarakat. 5. Penguatan sistem monitoring dan pelaporan capaian pendidikan siswa. 	Bidang Penmad, Bidang PAI, Bidang PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
SK. 8	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana. 2. Ketidaksiharian pembangunan dengan standar mutu pendidikan. 3. Proses pengadaan rawan keterlambatan atau tidak transparan. 4. Fasilitas kurang ramah disabilitas dan belum inklusif. 5. Pemeliharaan sarana prasarana kurang optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi alokasi anggaran dan dukungan sumber pendanaan lain (APBD, CSR, filantropi). 2. Penerapan standar teknis pembangunan sarpras pendidikan keagamaan. 3. Penguatan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel. 4. Penyediaan fasilitas ramah disabilitas sesuai prinsip inklusivitas. 5. Penyusunan program pemeliharaan rutin sarana prasarana. 	Bidang Penmad, Bidang PAI, Bidang PD Pontren,, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
SK.9	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem penilaian belum sepenuhnya objektif dan transparan. 2. Kurangnya kompetensi guru dalam menerapkan penilaian berbasis kompetensi. 3. Perangkat kurikulum kurang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. 4. Kesenjangan akses layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 5. Monitoring dan evaluasi penilaian pendidikan belum konsisten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standar penilaian yang objektif, transparan, dan terukur. 2. Pelatihan guru dalam penerapan sistem penilaian berbasis kompetensi. 3. Pengembangan kurikulum adaptif dan relevan dengan dunia kerja dan teknologi. 4. Penyediaan layanan inklusif, pendampingan khusus, serta sarana ramah disabilitas. 5. Penguatan mekanisme monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas penilaian pendidikan. 	Bidang Penmad, Bidang PAI, Bidang PD Pontren,, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
SK.10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Distribusi guru dan tenaga kependidikan tidak merata antar wilayah.2. Kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu.3. Mutasi atau rotasi tidak sesuai kebutuhan sekolah.4. Rendahnya minat guru ditempatkan di daerah terpencil.5. Data kebutuhan dan ketersediaan guru tidak akurat atau tidak mutakhir	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan peta kebutuhan guru berbasis data yang valid.2. Program afirmasi penempatan guru di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).3. Penguatan sistem rotasi/mutasi berbasis kebutuhan riil.4. Insentif dan penghargaan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.5. Pemutakhiran data tenaga kependidikan secara berkala dan terintegrasi.	Bidang Penmad, Bidang PAI, Bidang PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
SK.11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none">1. Data perencanaan tidak akurat atau tidak mutakhir.2. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran.3. Program/kegiatan tidak selaras dengan prioritas nasional maupun daerah.4. Kurangnya kapasitas SDM perencana dan pengelola anggaran.5. Risiko pagu minus atau realisasi anggaran rendah.	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan sistem basis data perencanaan yang valid dan terintegrasi.2. Penyusunan timeline yang ketat dan monitoring berkala penyusunan dokumen.3. Sinkronisasi program dengan RPJMN, Renstra, dan prioritas K/L/daerah.4. Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM perencana serta pengelola keuangan.5. Pengendalian pelaksanaan anggaran melalui monitoring, evaluasi, dan mitigasi risiko keuangan.	Bagian Tata Usaha
SK. 12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen pimpinan dan pegawai terhadap Reformasi Birokrasi (RB) masih rendah.2. Program RB hanya bersifat administratif, belum menyentuh perubahan budaya kerja.3. Keterbatasan kompetensi SDM dalam memahami area perubahan RB.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB tidak konsisten.5. Resistensi terhadap perubahan dari sebagian pegawai.	<ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat komitmen pimpinan dan internalisasi nilai RB kepada seluruh pegawai.2. Mendorong implementasi RB yang berdampak nyata pada pelayanan publik.3. Pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan terkait area perubahan RB.4. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dengan indikator kinerja yang jelas.	Bagian Tata Usaha



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
			5. Strategi komunikasi dan manajemen perubahan untuk mengurangi resistensi.	
SK. 13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan BMN. 2. Keterlambatan penyusunan laporan keuangan dan BMN. 3. Kesalahan pencatatan atau penilaian aset. 4. Rendahnya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMN. 5. Risiko kehilangan, kerusakan, atau tidak tertib administrasi BMN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kepatuhan terhadap regulasi melalui SOP dan pengawasan internal. 2. Penyusunan timeline laporan dengan monitoring rutin. 3. Penerapan sistem aplikasi pencatatan keuangan dan BMN yang terintegrasi. 4. Pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pengelola keuangan dan BMN. 5. Peningkatan inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan aset secara berkala. 	Bagian Tata Usaha
SK. 14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengadaan ASN tidak transparan atau tidak sesuai kebutuhan formasi. 2. Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi. 3. Kurangnya program pembinaan karier dan pengembangan kompetensi. 4. Sistem penilaian kinerja belum objektif. 5. Tingginya potensi pelanggaran disiplin dan etika ASN. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan rekrutmen berbasis merit dan sistem seleksi yang transparan. 2. Penempatan pegawai sesuai kompetensi, minat, dan kebutuhan organisasi. 3. Penyusunan program pembinaan karier, pelatihan, dan pengembangan berkelanjutan. 4. Penguatan sistem penilaian kinerja yang objektif, terukur, dan akuntabel. 5. Peningkatan pengawasan disiplin, kode etik, serta reward and punishment. 	Bagian Tata Usaha
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses masyarakat terhadap layanan dan bantuan hukum masih terbatas. 2. Kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga pemberi bantuan hukum. 3. Layanan hukum belum merata di seluruh wilayah. 4. Potensi penyalahgunaan layanan bantuan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke daerah terpencil. 2. Peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga bantuan hukum melalui pelatihan/sertifikasi. 3. Distribusi layanan hukum yang adil dan berbasis kebutuhan masyarakat. 	Bagian Tata Usaha



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
		5. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak memperoleh bantuan hukum.	4. Pengawasan dan evaluasi rutin terhadap penyelenggara bantuan hukum. 5. Sosialisasi intensif mengenai hak dan prosedur memperoleh bantuan hukum.	
SK. 16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Tata persuratan dan arsip tidak tertib sehingga dokumen sulit ditelusuri. 2. Arsip berisiko rusak atau hilang karena minimnya pengamanan dan digitalisasi. 3. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai regulasi dan rawan penyimpangan. 4. Keterlambatan pengadaan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan. 5. Kompetensi SDM pengelola arsip dan pengadaan masih terbatas.	1. Penerapan sistem tata persuratan dan arsip yang tertib serta berbasis digital. 2. Penguatan pengamanan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip secara rutin. 3. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan regulasi dalam pengadaan. 4. Penyusunan perencanaan pengadaan lebih awal dengan monitoring ketat. 5. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan di bidang kearsipan dan pengadaan barang/jasa.	Bagian Tata Usaha
SK. 17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1. Informasi publik tidak tersaji secara lengkap, cepat, dan akurat. 2. Layanan informasi kurang transparan sehingga menurunkan kepercayaan publik. 3. Sistem dokumentasi belum tertata dan belum terintegrasi digital. 4. SDM pengelola layanan informasi dan dokumentasi terbatas kompetensinya. 5. Potensi sengketa informasi akibat keterlambatan atau penolakan permintaan informasi.	1. Menyediakan informasi publik yang mudah diakses, akurat, dan tepat waktu. 2. Menerapkan standar layanan informasi yang transparan dan akuntabel. 3. Pengembangan sistem dokumentasi berbasis digital dan terintegrasi. 4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi melalui pelatihan. 5. Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa informasi sesuai regulasi.	Bagian Tata Usaha
SK. 18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Data tidak akurat, tidak mutakhir, atau tidak valid. 2. Sistem informasi sering mengalami gangguan teknis.	1. Penguatan mekanisme validasi, verifikasi, dan pemutakhiran data secara berkala. 2. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi.	Bagian Tata Usaha



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
		<ol style="list-style-type: none">Integrasi data antarunit/lembaga belum berjalan optimal.Keamanan data rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan.Kompetensi SDM pengelola data dan sistem informasi masih terbatas.	<ol style="list-style-type: none">Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi lintas unit/satker.Penerapan standar keamanan data dan perlindungan informasi.Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan data dan TIK.	
SK.19	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">Kualitas layanan pendidikan tidak merata antar satuan pendidikan.Sarana prasarana pendidikan terbatas atau tidak sesuai standar.SDM pendidik dan tenaga kependidikan belum profesional.Layanan pendidikan kurang inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus.Sistem monitoring dan evaluasi layanan pendidikan belum konsisten	<ol style="list-style-type: none">Penguatan standar layanan pendidikan yang merata di semua satuan pendidikan.Penyediaan dan perbaikan sarana prasarana sesuai kebutuhan.Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.Pengembangan layanan inklusif serta fasilitas ramah disabilitas.Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pengaduan layanan pendidikan.	Bagian Tata Usaha



2.5 Rumusan Pengukuran / Metadata

Rumusan pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) disusun sebagai alat untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran kegiatan yang merupakan hasil langsung (*output*) dari pelaksanaan suatu kegiatan. IKSK digunakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah memberikan hasil sesuai dengan tujuan, target, dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Setiap IKSK dilengkapi dengan metadata indikator yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja. Metadata IKSK mencakup tujuan pengukuran, definisi operasional indikator, satuan pengukuran, metode dan rumus perhitungan, sumber data, frekuensi pengukuran, unit pelaksana atau penanggung jawab, serta target kinerja yang ditetapkan dalam periode perencanaan.

Definisi operasional indikator dirumuskan secara jelas dan spesifik untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pengukuran. Metode dan rumus perhitungan ditetapkan secara konsisten agar hasil pengukuran dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan secara objektif dan dapat dibandingkan antar periode. Sumber data diperoleh dari laporan pelaksanaan kegiatan, sistem informasi kinerja, atau dokumen pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran IKSK dilakukan secara periodik sesuai dengan frekuensi yang telah ditetapkan dan dimanfaatkan sebagai alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Hasil pengukuran IKSK digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan kinerja, evaluasi efektivitas kegiatan, serta perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Dengan adanya rumusan pengukuran dan metadata IKSK yang jelas dan terstruktur, diharapkan pengelolaan kinerja kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendukung pencapaian sasaran program dan sasaran strategis organisasi.

Rumusan pengukuran / Metadata setiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) secara rinci ditampilkan pada halaman lampiran.





RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN AGAMA

PROGRAM PRIORITAS KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 – 2029 DALAM RANGKA Mendukung ASTA PROTAS MENTERI AGAMA				
Kerukunan & Cinta Kemanusiaan	Layanan Keagamaan Berdampak & Akses Inklusif	Pendidikan Agama Unggul, Ramah, & Terintegrasi	Pemberdayaan Pesantren	Pemberdayaan Ekonomi Umat
<ul style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pertemuan dialog intern dan antar pemuka agama, tokoh masyarakat untuk memperkuat toleransi, moderasi, saling pengertian, khususnya di wilayah dengan pluralitas agama/etnis di Kalimantan Tengah.Integrasi kurikulum cinta ke dalam materi pembinaan keagamaan/keberagaman di satuan pendidikan dan lembaga keagamaan.Early warning system	<ul style="list-style-type: none">Program KUA Berdaya;Layanan konseling catin, penyelesaian masalah keluarga, remaja, hingga relasi sosial.Gerakan Membaca Kitab Suci	<ul style="list-style-type: none">Program Bilingual pada satuan pendidikanProgram setoran hafalan Al Qur'an bagi siswa lulusan madrasahPenguatan Pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan kewargaan	<ul style="list-style-type: none">Program Pesantren Mandiri & Produktif;Penguatan bantuan fasilitas pondok pesantren;Fasilitasi akses beasiswa bagi santri berprestasi dari kalangan masyarakat kurang mampu;	<ul style="list-style-type: none">Program Gerakan Wakaf Uang;Penguatan ekonomi umat beragama;Peningkatan manajemen pengelolaan dana sosial keagamaan.
Ekoteologi & Lingkungan Berbasis Keagamaan				
<ul style="list-style-type: none">Gerakan menanam pohon :<ul style="list-style-type: none">Menanam pohon bagi ASJA KemenagMenanam pohon bagi calon penganjur;Menanam pohon bagi siswa lulus sekolahGerakan Lingkungan Bersih dan SehatPenerapan "Green Building / Bangunan Ramah Lingkungan" .Program UKS Religi dengan slogan "Sehat Itu Ibadah".Program Uji Kesehatan Satker melalui Perjanjian Kerja Saniy (PKS)				
Digitalisasi Tata Kelola & Layanan				
Pemberdayaan Rumah Ibadah	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan dan pemutakhiran sistem digital layanan keagamaan dan pendidikan , melalui update data secara berkala pada aplikasi yang tersedia, manajemen data keagamaan dan pendidikan yang terstandar, menjadikan data lebih transparan, akurat, dan mudah diakses .Digitalisasi informasi, literasi agama, materi dakwah, dan konten keagamaan melalui pemanfaatan website, aplikasi, dan media sosial resmi Kementerian Agama, agar menjangkau masyarakat Jawa Tengah secara lebih luas, cepat, dan efektifPeningkatan peran dan kapasitas penyuluh dan penghulu dalam menyampaikan program prioritas Kementerian Agama secara digital maupun tatap muka, sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan.			
<ul style="list-style-type: none">Peningkatan manajemen pengelolaan rumah ibadahRumahnya ibadah percontohan				



BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, saat ini menetapkan 19 Sasaran Kegiatan dan 77 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Mulai tahun 2026 Penyelenggaraan Haji dan Umroh sudah menjadi Kementerian sendiri. Kinerja Sasaran Kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Dalam penetapan target Kinerja ditetapkan beberapaka kategori sebagai berikut :

1. Penentuan Target Indikator Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bersifat akumulasi target (rata-rata target) yang ditopang dari *stakeholder* internal sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, mulai Dari Bagian Tata Usaha, Bidang Urusan Agama Islam, Bidang Penerangan Agama Islam, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan pondok Pesantren, Bidang Pendidikan Agama Islam, Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Katholik, Pembimbing Masyarakat Hindhu, Pembimbing Masyarakat dan Pembimbing Masyarakat Buddha, yang didukung oleh Tim nya masing-masing, sedangkan Untuk Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak dimasukkan dalam target Kinerja, karena sudah pisah menjadi Kementerian tersendiri.
2. Penentuan Target Indikator Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mempertimbangkan target yang ditentukan oleh masing-masing direktoral di Eselon-1 juga mempertimbangkan target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah sebanyak 35 Satker Kankemenag dan 129 Satker MTsN dan 65 Satker MAN.
3. Tabel Target Kinerja meliputi tiga bidang, Yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola, sebagai berikut :
 - a. SK / IKSK
 - b. Sasaran Strategis (*Impact*)/Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/ Indikator.
 - c. Satuan
 - d. *Baseline* 2024
 - e. Target Kinerja Tahun : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029
 - f. Unit Organisasi Pelaksana.

Lebih detil diuraian pada tabel berikut ini :





RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK. 1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	Nilai	N/A	83	83,1	83,3	83,7	83,9
		IKSK. 1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	N/A	73	75	78	80	82
		IKSK. 1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	N/A	50	50	60	65	70
		IKSK. 1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	N/A	20	20	22	25	28
		IKSK. 1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	N/A	10	10	12	14	15
		IKSK. 1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	N/A	20	20	23	25	27
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK. 2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	N/A	70	75	78	80	82
		IKSK. 2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	N/A	1:6	1:6	1:6	1:6	1:6
		IKSK. 2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	N/A	70	75	78	80	82
		IKSK. 2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	N/A	15	15	17	18	20
		IKSK. 2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	N/A	50	50	60	65	70
		IKSK. 2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	N/A	30	30	32	34	35
		IKSK. 2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	N/A	40	40	45	48	50



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
		IKSK. 2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	N/A	20	22	24	26	28
		IKSK. 2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	N/A	10	10	11	13	15
		IKSK. 2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	N/A	0,5	1	1,5	2	3
		IKSK. 2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	N/A	10	10,3	10,5	10,6	10,8
		IKSK. 2.12	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	60	60	60	60	60
		IKSK. 2.13	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	Persen	N/A	20	20	20	20	20
		IKSK. 2.14	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	Persen	N/A	80	80	80	80	80
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	N/A	5	0	0	0	0
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	N/A	85	0	0	0	0
		IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Nilai	N/A	85	0	0	0	0
SK. 5	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK. 5.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	N/A	90	0	0	0	0
		IKSK. 5.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	N/A	90	0	0	0	0
SK.6	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	IKSK. 6.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	Persen	N/A	90	0	0	0	0
			a. Lembaga penyelenggara haji khusus;							
			b. Lembaga penyelenggara umrah							



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
SK.7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK. 7.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	N/A	15	20	22	25	30
SK. 8	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK. 8.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	N/A	20	22	23	25	30
		IKSK. 8.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	N/A	20	22	23	25	30
		IKSK. 8.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	N/A	60	62	64	68	70
		IKSK. 8.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)	Persen	N/A	60	60	64	68	70
		IKSK. 8.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	N/A	20	25	30	35	40
		IKSK. 8.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah	N/A	7400	7450	7500	7550	7600
SK.9	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem	IKSK. 9.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:	Nilai	N/A					
			a literasi membaca			a. 67,6	a. 67,9	a. 68,2	a. 68,5	a. 67,8
		b numerasi	b. 51,1	b. 51,4	b. 51,8	b. 52,2	b. 51,5			
IKSK. 9.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	N/A	20	22	23	25	30		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
	penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	IKSK. 9.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	N/A	80	83	85	88	90
		IKSK. 9.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Angka	N/A	20	20	20	20	20
		IKSK. 9.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	N/A	20	22	23	25	30
		IKSK. 9.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	N/A	40	43	46	48	50
		IKSK. 9.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	N/A	20	25	30	35	40
		IKSK. 9.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	N/A	40	41	44	47	50
		IKSK. 9.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	N/A	20	21	22	24	25
		IKSK. 9.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	N/A	20	20	20	20	20
		IKSK. 9.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	N/A	20	20	20	20	20
		IKSK. 9.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	N/A	15	15	15	15	15
SK.10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK. 10.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	N/A	75	78	80	83	85
		IKSK. 10.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	N/A	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
		IKSK. 10.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	N/A	80	82	82	82	82
		IKSK. 10.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	N/A	75	75	75	75	75



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
		IKSK. 10.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	N/A	60	60	60	60	60
		IKSK. 10.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	N/A	40	40	40	40	40
		IKSK. 10.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	N/A	75	75	75	75	75
		IKSK. 10.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan (AKP) minimal predikat terampil	Persen	N/A	50	50	50	50	50
		IKSK. 10.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	15	15	15	15	15
		IKSK. 10.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	20	20	20	20	20
		IKSK. 10.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	N/A	75	78	78	78	78
		IKSK. 10.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	N/A	75	78	78	78	78
SK.11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK. 11.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	N/A	90	90	90	90	90
SK. 12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK. 12.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	N/A	75	78	78	78	78
		IKSK. 12.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Persen	N/A	75	75	77	78	80
SK. 13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK. 13.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	N/A	91	91	91	91	91
		IKSK. 13.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	N/A	40	42	45	47	50
		IKSK. 13.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	N/A	95	95	95	95	95



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
		IKSK. 13.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	N/A	75	77	78	79	80
		IKSK. 13.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	N/A	85	87	88	89	90
SK. 14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK. 14.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	N/A	76,24	76,54	76,74	76,84	78,12
		IKSK. 14.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	N/A	80	82	86	88	90
		IKSK. 14.3	Persentase Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Persen	N/A	20	20	20	20	20
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK. 15.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	N/A	60	64	68	70	72
		IKSK. 15.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	N/A	75	77	80	82	85
SK. 16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK. 16.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	N/A	75	78	80	82	85
		IKSK. 16.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	N/A	75	78	79	80	82
SK. 17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK. 17.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	N/A	80	83	85	87	88
		IKSK. 17.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	N/A	50	53	58	60	65
SK. 18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK. 18.1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	N/A	2,72	3,00	3,00	3,50	3,50
		IKSK. 18.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	N/A	50	53	58	60	65
SK.19	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK. 19.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	N/A	83	87	89	90	92



3.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama serta sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai sumber daya, khususnya pendanaan yang memadai. Pendanaan ini bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari masyarakat. Saat ini, sumber pendanaan yang digunakan mencakup Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan sumber pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerangka pendanaan yang tertuang dalam Renstra Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah 2025-2029 menjadi pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah, dengan mengacu pada kaidah-kaidah pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah sampai dengan tahun 2029 tercantum dalam tabel berikut;

SASARAN KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN (RIBU RUPIAH)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	101.158	108.652	116.146	123.546	130.946
Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	178.036	180.136	182.236	184.336	186.436
Meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji	257.035	0	0	0	0
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	147.540	0	0	0	0
Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	23.034.731	0	0	0	0
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	92.600	0	0	0	0
Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	123.546	153.546	183.546	213.546	243.546
Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	117.849	147.849	177.849	207.849	237.849



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN (RIBU RUPIAH)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	143.325	173.325	203.325	233.325	263.325
Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	196.300	206.300	216.300	226.300	236.300
Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	183.560	193.560	203.560	213.560	223.560
Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000
Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	121.143.287	121.153.287	121.163.287	121.173.287	121.183.287





BAB IV PENUTUP

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama. Renstra ini menjadi rujukan bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk diantaranya penyusunan rencana kerja anggaran tahunan dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029.

Pencapaian target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Oleh karena itu peran, keterlibatan, dan sinergisitas seluruh komponen stakeholders dan pemanfaatan seluruh lini kekuatan harus dilaksanakan demi peningkatan pencapaian kinerja.

Sangat disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan dokumen ini. Diharapkan peningkatan kinerja secara profesional dan penguatan *teamwork* di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan bidang agama dan pendidikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya dalam upaya kita mewujudkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah,

Saiful Mujab





RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

Lampiran I: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
SS.1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial														
IKSS.1.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	0	83	83,1	83,3	83,7	83,9							
025.DC - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama															Bagian Tata Usaha, Bidang PHU, Bidang Urais, Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu dan Bimas Buddha
2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah									761.700	1.038.597	1.134.056	1.238.810	1.353.779	Bidang Urais	
SK.2104.1	Terlaksananya KUA sebagai Pusat Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kecamatan / Tingkat Akar Rumput														
IKSK.2104.1.1	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	0	73	75	78	80	82	0	0	0	0	0		
RO.2104.UAI.005	2104.UAI.005 KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System)	Lembaga	0	1000	1000	1000	1000	1917	10.000	18.754	20.629	22.692	24.962		
IKRO.2104.UAI.005.1	Jumlah KUA yang mengembangkan EWS (Early Warning System) dalam menjaga toleransi dan cinta kemanusiaan umat Islam	Lembaga	0	1000	2000	3000	4000	5917	0	0	0	0	0		
SK.2104.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah														
IKSK.2104.2.2	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	Persen	0	15	15	17	18	20	0	0	0	0	0		
RO.2104.QDE.002	2104.QDE.002 Calon Pengantin Islam Mendapatkan Bimbingan Perkawinan	Orang	0	1.704.000	1.977.889	2.294.885	2.674.202	3.098.221	160.726	176.799	194.478	213.926	235.319		
IKRO.2104.QDE.002.1	Jumlah Calon Pasangan Pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan agama Islam	Pasangan	N/A	1.394.000	1.347.889	1.334.885	1.374.202	1.448.221	0	0	0	0	0		
IKRO.2104.QDE.002.2	Jumlah Remaja Usia Sekolah yang mendapatkan Bimbingan Pra Nikah	Orang	N/A	310.000	630.000	960.000	1.300.000	1.650.000	0	0	0	0	0		
IKRO.2104.QDE.001	2104.QDE.001 Bimbingan Keluarga Sakinah – Masalah	Keluarga	N/A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	27.951	40.641	44.705	49.176	54.093		
IKRO.2104.QDE.001.3	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keluarga Sakinah dan Maslahat	Keluarga	N/A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0		
RO.2104.UAI.001	2104.UAI.001 KUA Berdaya	Lembaga	N/A	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	12.500	38.283	42.111	46.322	50.955		
IKRO.2104.UAI.001.1	Jumlah KUA yang Ditingkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Keagamaan	Lembaga	N/A	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	0	0	0	0	0		
RO.2104.UAI.002	2104.UAI.002 KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana	Lembaga	N/A	1.918	1.500	1.200	900	486	35.000	120.000	123.600	127.308	131.127		
IKRO2104.UAI.002.5	Jumlah KUA yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana sesuai standar	Lembaga	N/A	1.918	1.500	1.200	900	486	0	0	0	0	0		
RO.2104.UAI.003	2104.UAI.003 KUA yang Dibangun (SBSN)	Lembaga	N/A	154	271	160	160	170	196.922	291.120	320.232	352.255	387.481		
IKRO.2104.UAI.003.5	Jumlah KUA yang Dibangun	Lembaga	N/A	154	271	160	160	170	0	0	0	0	0		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO.2104.UAI.004	2104.UAI.004 KUA Rusak Sedang dan Berat Direhabilitasi	Lembaga	N/A	143	150	150	150	150	150	21.601	30.000	33.000	36.300	39.930	
IKRO.2104.UAI.004.5	Jumlah KUA yang Rusak Sedang dan Berat yang Direhabilitasi	Lembaga	N/A	143	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	
RO.2104.QAA.002	2104.QAA.002 Layanan Nikah dan Rujuk	Orang	N/A	2.789.212	2.695.778	2.669.770	2.748.404	2.896.442	277.000	302.000	332.200	365.420	401.962		
IKRO.2104.QAA.002.06	Jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk yang Dilayani	Pasangan	N/A	1.394.606	1.347.889	1.334.885	1.374.202	1.448.221	0	0	0	0	0		
RO.2104.QDC.001	2104.QDC.001 Penghulu yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	N/A	1.100	2.400	2.250	2.250	3.500	20.000	21.000	23.100	25.410	27.951		
IKRO.2104.QDC.001.7	Jumlah Penghulu yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	N/A	1.100	3.500	5.750	8.000	11.500	0	0	0	0	0		
2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf									120.497	178.100	237.910	253.901	271.191	Bidang Penaiszawa	
SK.2122.1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ziswaf														
IKSK.2122.1.1	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	0	0	0	0	0		
IKSK.2122.1.2	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Persen	10	11	12	13	15	16	0	0	0	0	0		
IKSK.2122.1.3	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	Persen	4	6	8	10	12	14	0	0	0	0	0		
IKSK.2122.1.4	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mulasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	Persen	2	4	5	6	7	8	0	0	0	0	0		
RO.2122.QEA.001	2122.QEA.001 Mustahiq yang diselarasakan dengan Data Kemiskinan (Regsosek/DT-SEN)	Orang		25.900.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000		
IKRO.2122.QEA.001.1	Jumlah Data Mustahiq yang Diselaraskan dengan Data Kemiskinan Regsosek	Orang	N/A	25.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IKRO.2122.QEA.001.2	Jumlah Data Zakat dan Wakaf yang Selaras dengan Data Kemiskinan (DT-SEN)	Orang	N/A	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0		
RO.2122.QEA.002	Rumah Tangga Miskin diberdayakan melalui Kampung ZISWAF	Kelompok Masyarakat	N/A	2.298	2.298	2.298	2.298	2.298	24.000	30.000	31.000	32.000	33.000		
IKRO.2122.QEA.002.1	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pengentasan Angka Kemiskinan	Kelompok Masyarakat	N/A	2.298	2.298	2.298	2.298	2.298	0	0	0	0	0		
RO.2122.QEI.001	2122.QEI.001 Bantuan Operasional BWI														
IKRO.2122.QEI.001.2	Jumlah Harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	Aset Wakaf	0	8.982	8.981	8.982	8.982	8.981	0	0	0	0	0		
RO.2122.QDB.001	2122.QDB.001 Pembinaan Lembaga Amil Zakat dan Nadzir Wakaf yang Diperkuat Program Pengentasan Kemiskinan	Lembaga	N/A	9.193	9.193	9.193	9.193	9.193	32.926	67.000	73.700	81.070	89.177		
IKRO.2122.QDB.001.1	Jumlah Lembaga Amil Zakat & Nadzir Wakaf yang dibina dan Diperkuat Literasinya	Lembaga	N/A	7.690	7.189	6.687	6.183	5.681	0	0	0	0	0		
IKRO.2122.QDB.001.2	Jumlah Lembaga Akta Ikrar Wakaf yang Diterbitkan	Lembaga	N/A	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	0	0	0	0	0		
IKRO.2122.QDB.001.3	Jumlah Layanan Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat dan Nadzir dalam Program Pengentasan Kemiskinan	Lembaga	0	3	4	6	10	12	0	0	0	0	0		
SK.2122.2	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Profesionalitas Lembaga Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf														
IKSK.2122.2.1	Persentase Lembaga Amil Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	Persen	15	17	19	21	23	25	0	0	0	0	0		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKSK.2122.2.2	Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	Persen	1	2	4	6	8	10	0	0	0	0	0					
IKSK.2122.2.3	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	Persen	1	6	8	10	12	15	0	0	0	0	0					
IKSK.2122.2.4	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	Persen	2	5	6	7	8	9	0	0	0	0	0					
IKSK.2122.2.5	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Persen	2	4	6	8	10	12	0	0	0	0	0					
RO.2122.QIC.001	2122.QIC.001 Lembaga Amil Zakat yang Diaudit Syariah dan Keuangannya	Lembaga	N/A	811	1.087	1.486	2.050	2.796	15.000	25.000	27.500	30.250	33.275					
IKRO.2122.QIC.001.1	Jumlah Lembaga Zakat yang Diawasi Pengelolaannya	Lembaga	N/A	739	800	839	900	1.000	0	0	0	0	0					
IKRO.2122.QIC.001.2	Jumlah Lembaga Wakaf yang Diawasi Pengelolaannya	Lembaga	18	72	287	647	1.150	1.796	0	0	0	0	0					
RO.2122.QIC.002	2122.QIC.002 Layanan Advokasi Aset Wakaf	Layanan	N/A	20	23	28	34	20	4.671	5.000	51.000	52.000	53.000					
IKRO.2122.QIC.002.4	Jumlah Aset Wakaf yang Diberikan Pendampingan Advokasi dalam Penanganan Permasalahan Hukum	Lokasi	N/A	115	138	166	200	220	0	0	0	0	0					
RO.2122.QEI.001	2122.QEI.001 Bantuan Operasional BWI	Lembaga	1	180	180	180	180	180	16.400	21.400	23.540	25.894	28.483					
IKRO.2122.QEI.001.3	Terbinanya Lembaga Pengelola Wakaf (BWI)	Lembaga	1	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0					
RO.2122.QEI.002	2122.QEI.004 Bantuan Operasional BAZNAS	Lembaga	1	110	110	110	110	110	3.500	4.700	5.170	5.687	6.256					
IKRO.2122.QEI.002.5	Terbinanya Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS)	Lembaga	1	110	110	110	110	110	0	0	0	0	0					
2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam									204.379	388.950	428.145	471.159	517.375	Bidang Penaiszawa				
SK.2123.1	Meningkatnya Kualitas Syiar dan Pembinaan Lembaga Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan Islam																	
IKSK.2123.1.1	Persentase peningkatan audiens MTQ	Persen	80	83	86	88	89	90	0	0	0	0	0					
IKSK.2123.1.2	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam	Persen	2,4	4	7,14	6,67	6,25	5,88	0	0	0	0	0					
IKSK.2123.1.3	Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Islam yang diselenggarakan Negara	Persen	90	99,34	99,35	99,35	99,36	99,36	0	0	0	0	0					
IKSK.2123.1.4	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Agama Islam yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	74,58	74,71	74,85	74,99	75,13	75,27	0	0	0	0	0					
RO.2123.PEG.001	2123.PEG.001 Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)	Kegiatan	0	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826	31.064	98.510	108.361	119.197	131.117					
IKRO.2123.PEG.001.1	Jumlah Audiens pada Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ) dalam Meningkatkan Kesalahan Umat Islam	Orang	0	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	0	0	0	0	0					
RO.2123.AEG.001	2123.AEG.001 Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Hari Besar Islam	Kegiatan	0	34	34	34	34	34	7.000	7.700	8.470	9.317	10.249					
IKRO.2123.AEG.001.2	Jumlah Partisipan dalam Penyelenggaraan Event Seni Budaya Islam	Orang	0	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500	0	0	0	0	0					
IKRO.2123.AEG.001.3	Jumlah Partisipan pada Perayaan Hari Besar Islam yang Diselenggarakan Negara	Orang	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0					
RO.2123.QDB.001	2123.QDB.001 Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Agama Islam (MUI)	Lembaga	1	1	1	1	1	1	3.000	7.000	8.000	9.000	10.000					
IKRO.2123.QDB.001.1	Jumlah Lembaga Agama Islam (Majelis Ulama Indonesia) yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan	Lembaga	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0					
RO.2123.QDB.002	2123.QDB.002 Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Islam	Lembaga	0	104	104	104	104	104	78.422	176.000	193.600	212.960	234.256					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKRO.2123.QDB.002.1	Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan Islam yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Tata Kelola Kelembagaan	Lembaga	0	104	104	104	104	104	0	0	0	0	0					
RO.2123.QDD.002	2123.QDD.002 Majelis Taklim yang Dibina	Kelompok Masyarakat	1.028	1.207	1.328	1.460	1.607	1.028	14.712	27.540	30.294	33.323	35.655					
IKRO.2123.QDD.002.4	Jumlah Lembaga Majelis Taklim yang Dibina dalam meningkatkan kesalehan umat Islam	Lembaga	0	1.028	1.207	1.328	1.460	1.607	0	0	0	0	0					
RO.2123.QDD.001	2123.QDD.001 Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Islam	Kelompok Masyarakat	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	6.498	27.200	29.920	32.912	36.203					
IKRO.2123.QDD.001.4	Jumlah Dialog Internal Umat Islam dalam menciptakan kerukunan umat Islam	Kelompok Masyarakat	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0					
SK.2123.2.1	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama Islam																	
IKSK.2123.3.1	Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam	Nilai	82,88	83,33	83,78	84,23	84,68	85,13	0	0	0	0	0					
IKSK.2123.3.2	Persentase penyuluh agama Islam yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	100	90	91	92	93	94	0	0	0	0	0					
IKSK.2123.3.3	Rasio penyuluh agama Islam dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	01:05	01:04	01:04	01:04	01:04	01:04	0	0	0	0	0					
RO.2123.QDC.002	2123.QDC.002 Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	0	25.289	25.289	25.289	25.289	25.289	20.076	30.000	33.000	36.300	39.930					
IKRO.2123.QDC.002.1	Jumlah Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam memberikan penyuluhan pada masyarakat	Orang	0	25.289	25.289	25.289	25.289	25.289	0	0	0	0	0					
IKRO.2123.QDC.002.3	Jumlah Kelompok Sasaran Binaan Penyuluh Agama Islam yang mendapatkan bimbingan	Lembaga/ Kelompok Masyarakat	0	101.156	101.156	101.156	101.156	101.156	0	0	0	0	0					
RO.2123.QDC.003	2123.QDC.003 Penyuluh Agama Islam yang dibina menjadi Influencer Sosial Media	Orang	0	11.923	11.923	11.923	11.923	11.923	12.215	15.000	16.500	18.150	19.965					
IKRO.2123.QDC.003.1	Jumlah Konten Digital Penyuluhan Agama Islam Inklusif Transformatif yang dibuat dan dipublikasikan	Orang	0	11.923	11.923	11.923	11.923	11.923	0	0	0	0	0					
IKRO.2123.QDC.003.2	Jumlah Penyuluh Agama Islam yang Dibina menjadi Influencer Sosial Media	Orang	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0					
RO.2123.QDC.001	2123.QDC.001 Honorarium Penyuluh Agama Islam Non PNS	Orang	0	2.616	0	0	0	0	31.392	0	0	0	0					
IKRO.2123.QDC.001.3	Jumlah Penyuluh Agama Islam Non ASN yang Memberikan Layanan Bimbingan Penyuluhan Agama Islam	Orang	0	2.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah									287.821	220.226	238.949	259.543	282.197	Bidang Urais				
SK.2124.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama Islam																	
IKSK.2124.1.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	76,92	79,49	82,05	84,62	87,18	89,74	0	0	0	0	0					
RO.2124.QDD.001	2124.QDD.001 Respon dan Cegah Dini Konflik Keagamaan Islam			83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	141.344	27.026	29.729	32.701	35.971					
IKRO.2124.QDD.001.1	Jumlah Rekomendasi Sistem Peringatan Dini dalam Pencegahan Konflik Keagamaan	Kelompok Masyarakat	0	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	0	0	0	0	0					
SK.2124.2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Keagamaan Islam																	
IKSK.2124.2.1	Persentase sarana prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar	Persen	16	68	69	70	71	73	0	0	0	0	0					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKSK.2124.2.2	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam yang disediakan	Persen	38,34	40	42	44	46	48	0	0	0	0	0					
IKSK.2124.2.3	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai kaidah	Persen	0	13	67	75	80	83	0	0	0	0	0					
IKSK.2124.2.4	Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai standar	Persen	79	89	90	91	92	92	0	0	0	0	0					
IKSK.2124.2.5	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	0	20	40	60	80	90	0	0	0	0	0					
IKSK.2124.2.6	Persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat	Persen	0	20	40	60	80	90	0	0	0	0	0					
RO.2124.QAA.001	Layanan Syariah Hisab Rukyat	Laporan	0	4979	4990	5001	5012	5023	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000					
IKRO.2124.QAA.001.5	Jumlah Pengukuran Arah Kiblat	Layanan	2367	2010	2020	2030	2040	2050	0	0	0	0	0					
IKRO.2124.QAA.001.6	Jumlah Layanan Syariah Hisab Rukyat	Layanan	0	2979	2980	2981	2982	2983	0	0	0	0	0					
RO.2124.QAA.002	Literasi Keagamaan Islam Digital	Laporan	0	1194	1194	1194	1194	1194	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
IKRO.2124.QAA.002.1	Jumlah naskah & buku keagamaan Islam yg layak edar/ sesuai kaidah	Laporan	200	100	150	200	250	300	0	0	0	0	0					
RO.2124.QEI.001	2124.QEI.001 Rumah ibadah agama Islam yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	Lembaga	1220	5293	7000	8600	10000	11622	97.837	120.000	132.000	145.200	159.720					
IKRO.2124.QEI.001.1	Jumlah Rumah Ibadah yang Difasilitasi dan memenuhi standar	Lembaga	1220	5293	7000	8600	10000	11622	0	0	0	0	0					
RO.2124.QEO.U01	2124.QEO.U01 Kitab Suci Agama Islam dan Sarana Peribadatan Agama Islam yang Disediakan	Unit	0	110899	110899	110899	110899	110899	5.400	25.000	27.500	30.250	33.275					
IKRO.2124.QEO.U01.1	Jumlah Kitab Suci Agama Islam yang Disediakan	Unit	0	110899	110899	110899	110899	110899	0	0	0	0	0					
RO.2124.QEI.002	2124.QDB.001 Perpustakaan Masjid yang Dibina	Lembaga	1020	3684	3684	3684	3684	3684	6.440	10.000	11.000	12.100	13.310					
IKRO.2124.QEI.002.1	Jumlah Pustaka Keagamaan Islam yang Terfasilitasi	Lembaga	1020	3684	3684	3684	3684	3684	0	0	0	0	0					
RO.2124.UAI.002	2124.UAI.002 Pusat Literasi Keagamaan Islam Yang Dikembangkan	Lembaga	0	1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.200	2.420	2.662					
IKRO.2124.UAI.002.1	Jumlah PLKI yang difasilitasi operasionalnya	Lembaga	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0					
IKRO.2124.UAI.002.2	Jumlah masyarakat yang melakukan kunjungan ke PLKI	Orang	0	7000	8200	9400	10800	12000	0	0	0	0	0					
RO.2124.UAI.001	2124.UAI.001 Pusat Observasi Bulan yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya	Lembaga	4	4	6	7	8	9	1.800	3.200	3.520	3.872	4.259					
IKRO.2124.UAI.001.1	Jumlah Pusat Observasi Bulan yang Disediakan Operasionalnya	Lembaga	4	4	6	7	8	9	0	0	0	0	0					
2126 Pembinaan Umrah dan Haji Khusus														Bidang PHU				
SK.2126.1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah																	
IKSK.2126.1.1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A):	Persen	82,00;	82,05;										Akreditasi Umrah				
	a) Lembaga penyelenggara haji khusus;		96	96,01	0	0	0	0	0	0	0	0						
	b) Lembaga penyelenggara umrah																	
RO.2126.QDB.001	2126.QDB.001 Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina	Lembaga	0	1881	0	0	0	0	8.642	0	0	0	0					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKRO.2126 QDB 001.1	Jumlah Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A) Lembaga penyelenggara umrah	Lembaga	N/A	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pemantauan dan Pengawasan		
RO.2126 QDB 002	2126 QDB 002 Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang Terbina			717	0	0	0	0	0	3.233	0	0	0	0				
IKRO.2126 QDB 002.1	Jumlah Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A) Lembaga penyelenggara haji khusus	Lembaga	N/A	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Akreditasi Haji Khusus			
2130 Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu															Bagian Tata Usaha			
SK.2130.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat Khonghucu																	
IKSK.2130.1.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Khonghucu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	50	52,63	55,26	57,89	60,53	63,16	0	0	0	0	0	0				
IKSK.2130.1.2	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Khonghucu yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	N/A	15,08	19,84	24,6	29,76	34,92	0	0	0	0	0	0				
IKSK.2130.1.3	Persentase peningkatan audiens perayaan hari besar keagamaan Khonghucu	Persen	0	10	11	12	13	14	0	0	0	0	0	0				
RO.2130 QDD	2130 QDD 001 Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Khonghucu									600	720	864	1.037	1.244				
IKRO.2130 QDD 001.1	Jumlah dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS agama Khonghucu	Jumlah	0	20	21	22	23	24	0	0	0	0	0	0				
IKRO.2130 BDB 001	2130 BDB 001 Lembaga Agama dan Keagamaan Khonghucu yang dibina	Lembaga	38	38	50	62	75	88	3.920	5.043	6.371	7.686	9.223					
IKRO.2130 BDB 001.1	Jumlah lembaga agama dan keagamaan Khonghucu yang dibina	Jumlah	38	38	50	62	75	88	0	0	0	0	0	0				
IKRO.2130 BDB 001.2	Jumlah audiens Perayaan Hari Besar Keagamaan Khonghucu	Jumlah	N/A	1000	1100	1300	1400	1500	0	0	0	0	0	0				
SK.2130.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan khonghucu yg profesional, inklusif, dan berdampak									11.047	9.646	12.049	15.170	19.268				
IKSK.2130.2.1	Persentase penyuluh agama Khonghucu yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	N/A	60	65	70	75	80	0	0	0	0	0	0				
IKSK.2130.2.2	Rasio penyuluh agama Khonghucu dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	01:02	01:02	01:02	01:02	01:02	01:02	0	0	0	0	0	0				
IKSK.2130.2.3	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga <i>Anhe Jiating</i> yang disediakan	Persen	N/A	12	14	16	18	20	0	0	0	0	0	0				
IKSK.2130.2.4	Persentase rumah ibadah Khonghucu yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	N/A	10	11	12	13	14	0	0	0	0	0	0				
IKSK.2130.2.5	Persentase peningkatan kitab suci agama Khonghucu yang disediakan	Persen	N/A	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0				
IKSK.2130.2.6	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Khonghucu yang layak edar/sesuai kaidah	Persen	N/A	40	50	60	70	80	0	0	0	0	0	0				
IKSK.2130.2.7	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama Khonghucu yang tersertifikasi	Persen	N/A	10	15	20	25	30	0	0	0	0	0	0				
IKSK.2130.2.8	Persentase calon penerima dana sosial kebajikan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	N/A	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0				
IKSK.2130.2.9	Persentase lembaga dana kebajikan yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Persen	N/A	50	55	60	65	70	0	0	0	0	0	0				
	2130 QDC 007 Penyuluh Agama Khonghucu Non ASN Penerima Tunjangan	Orang	N/A	170	170	170	170	170	2.040	2.448	2.938	3.525	4.230					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Jumlah penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Jumlah	N/A	102	110	119	127	136	0	0	0	0	0		
RO.2130 QDC 002	2130 QDC 015 Penyuluh Agama Khonghucu yang ditingkatkan Kompetensinya dan dibina menjadi Influencer Sosial Media	Orang	N/A	174	174	174	174	174	1.084	1.355	1.627	1.952	2.342		
IKRO.2130 QDC 002.1	Jumlah Penyuluh Agama Khonghucu yang ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah	N/A	174	174	174	174	174	0	0	0	0	0		
IKRO.2130 QDC 002.2	Jumlah Fasilitator Bimbingan Perkawinan Khonghucu yang tersertifikasi	Jumlah	N/A	40	60	80	100	120	0	0	0	0	0		
IKRO.2130 QDC 002.3	Jumlah Layanan Bimbingan Keluarga Khonghucu yang disediakan	Jumlah	N/A	20	40	60	80	100	0	0	0	0	0		
RO.2130 QEG 001.1	2130 QEO 001 Kitab Suci Agama Khonghucu dan Sarana Peribadatan Agama Khonghucu yang Disediakan	Paket	N/A	2381	2771	3011	3251	3491	567	709	850	1.021	1.224		
IKRO.2130 QEG 001.1	Jumlah buku keagamaan Khonghucu pendukung peribadatan sesuai kaidah.	Jumlah	550	550	600	650	700	750	0	0	0	0	0		
IKRO.2130 QEG 001.2	Jumlah kitab suci khonghucu yang disediakan	Jumlah	1000	1100	1100	1200	1300	1400	0	0	0	0	0		
RO.2130 QEI 002	2130 QEI 002 Rumah Ibadah Agama Khonghucu yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	Lembaga	N/A	55	60	65	70	75	816	1.020	1.224	1.469	1.763		
IKRO.2130 QEI 001.1	Jumlah rumah ibadah agama Khonghucu yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan	Jumlah	50	55	60	65	70	75	0	0	0	0	0		
IKRO.2130 QEI 001.3	Jumlah Lembaga dana kebajikan yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan disediakan	Jumlah	N/A	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0		
IKRO.2130 QEI 001.2	Jumlah calon penerima dana kebajikan terintegrasi basis data terpadu nasional	Jumlah	N/A	250	350	450	550	650	0	0	0	0	0		
2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen									187.213	195.837	185.846	221.960	306.225	Bimas Kristen	
SK.2137.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat Kristen														
IKSK.2137.1.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Kristen yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	3	50	55	60	65	70	0	0	0	0	0		
IKSK.2137.1.2	Persentase peningkatan audiens PESPARAWI	Persen	N/A	0	13,2	0	0	16,7	0	0	0	0	0		
IKSK.2137.1.3	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Kristen	Persen	N/A	0	13,2	0	0	16,7	0	0	0	0	0		
IKSK.2137.1.4	Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Kristen yang diselenggarakan Negara	Persen	N/A	0	5,56	6,32	6,93	7,78	0	0	0	0	0		
IKSK.2137.1.5	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Kristen yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	0,4	40	45	50	55	60	0	0	0	0	0		
RO 2137.QDD.001	2137.QDD.001 - Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Kristen		2	37	37	37	37	37	7.720,76	11.250,00	14.062,50	16.875,00	19.406,25		
IKRO.2137.QDD.001.1	Jumlah dialog kerukunan agama Kristen difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Dialog	2	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0		
RO 2137.AEG.001	2137.AEG.001 - Event Perayaan Hari Besar Agama Kristen		N/A	0	3	3	3	3	-	-	1.500,00	3.000,00	4.500,00		
IKRO.2137.AEG.001.1	Jumlah Event Perayaan Hari Besar Agama Kristen yang diselenggarakan	Kegiatan	N/A	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0		
IKRO.2137.AEG.001.2	Jumlah partisipan perayaan Hari Besar Kristen yang diselenggarakan negara	Orang	4300	4500	4750	5050	5400	5820	0	0	0	0	0		
RO.2137.PEG.001	2137.PEG.001 - Event Seni Budaya Keagamaan Kristen (PESPARAWI)			77	77	1	1	77		60.000,00	15.000,00	20.000,00	75.500,00		
IKRO.2137.PEG.001.1	Jumlah Event PESPARAWI yang diselenggarakan	Kegiatan	34	77	77	1	1	77	0	0	0	0	0		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKRO.2137.PEG.001.2	Jumlah audiens penyelenggaraan PESPARAWI	Orang	14271	0	16155	0	0	18852	0	0	0	0	0					
IKRO.2137.PEG.001.3	Jumlah peserta event Seni Budaya Agama Kristen	Orang	8396	0	9504	0	0	11091	0	0	0	0	0					
RO.2137.QDB.001	2137.QDB.001 - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen		119	151	166	189	205	225	7.436,08	10.200,00	12.750,00	15.300,00	17.595,00					
IKRO.2137.QDB.001.1	Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan Kristen yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Lembaga	119	151	166	189	205	225	0	0	0	0	0					
RO.2137.QDB.003	2137.QDB.003 - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Agama Kristen (Aras Nasional dan Sinode)		N/A	185	210	240	280	300	22.075,00	25.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00					
IKRO.2137.QDB.003.1	Jumlah Lembaga Agama Kristen (Aras Nasional dan Sinode) yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Lembaga	N/A	185	210	240	280	300	0	0	0	0	0					
SK.2137.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Kristen Yang profesional, inklusif, dan berdampak																	
IKSK.2137.2.1	Persentase penyuluh agama Kristen yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklitan)	Persen	88	90	92	93	95	98	0	0	0	0	0					
IKSK.2137.2.2	Rasio penyuluh agama Kristen dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	01:03	01:03	01:03	01:04	01:04	01:05	0	0	0	0	0					
IKSK.2137.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama Kristen yang dibina	Persen	70	70,05	71,2	72,33	73,52	74	0	0	0	0	0					
IKSK.2137.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pranikah Kristen	Persen	0	0	0	0	0,98	1	0	0	0	0	0					
IKSK.2137.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga Kristiani yang disediakan	Persen	0	6,67	7,5	7,56	8,11	10	0	0	0	0	0					
IKSK.2137.2.6	Persentase rumah ibadah agama Kristen yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	5,41	7,08	9,2	10,73	12,06	12,57	0	0	0	0	0					
IKSK.2137.2.7	Persentase peningkatan kitab suci agama Kristen yang disediakan	Persen	16,73	18,83	25,56	29,17	35,48	38,1	0	0	0	0	0					
IKSK.2137.2.8	Persentase buku keagamaan Kristen pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	31,77	35	37,45	40,12	42,74	43,71	0	0	0	0	0					
IKSK.2137.2.9	Persentase jumlah calon penerima dana Amal Sosial Kristiani terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	N/A	33,33	33,33	66,67	66,67	66,67	0	0	0	0	0					
IKSK.2137.2.10	Persentase Lembaga dana Amal Sosial Kristiani yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan	Persen	33,33	33,33	33,33	66,67	66,67	66,67	0	0	0	0	0					
RO.2137.QDC.001	2137.QDC.001 - Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non ASN	Orang	6.953,00	3.420,00	0	0	0	335	80.088,00	-	-	-	-					
IKRO.2137.QDC.001.1	Jumlah Penyuluh Non PNS Penerima Tunjangan	Orang	6.953,00	3.420,00	0	0	0	335	0	0	0	0	0					
RO.2137.QDC.002	2137.QDC.002 - Penyuluh Agama Kristen yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	6859	6950	7105	7128	7336	7569	14.353,48	17.000,00	19.000,00	22.000,00	25.000,00					
IKRO.2137.QDC.002.1	Jumlah penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklitan)	Orang	6.859,00	6.950,00	3.967,00	4.020,00	4.116,00	4.257,00	0	0	0	0	0					
IKRO.2137.QDC.002.2	Jumlah Penyuluh Agama Kristen dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Kristen	Orang	6.859,00	6.950,00	3.967,00	4.020,00	4.116,00	4.257,00	0	0	0	0	0					
RO.2137.QDC.003	2137.QDC.003 - Penyuluh Agama Kristen yang dibina menjadi influencer sosial media		N/A	0	278	294	320	335	-	2.317,00	2.821,00	3.330,00	3.640,00					
IKRO.2137.QDC.003.1	Jumlah penyuluh agama Kristen yang dibina menjadi influencer sosial media	Orang	N/A	0	278	294	320	335	0	0	0	0	0					
IKRO.2137.QDC.003.2	Jumlah konten digital penyuluhan agama Kristen inklusif transformatif yang dibuat dan dipublikasikan	Konten	N/A	0	150	200	250	300	0	0	0	0	0					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO.2137.QDE.001	2137.QDE.001 - Bimbingan Keluarga Kristiani	Keluarga	7.630,00	11.157,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	5.995,51	12.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00		
IKRO.2137.QDE.001.1	Jumlah Keluarga Kristiani yang memperoleh Bimbingan Keluarga Kristiani	Keluarga	7.630,00	11.157,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	0	0	0	0	0		
IKRO.2137.QDE.001.2	Jumlah layanan bimbingan keluarga Kristiani yang disediakan	Layanan	150	160	172	185	200	220	0	0	0	0	0		
RO.2137.QDE.002	2137.QDE.002 - Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Kristiani			1.390,00	2.500,00	3.500,00	5.200,00	8.300,00	1.041,03	3.570,00	5.587,50	6.705,00	8.570,75		
IKRO.2137.QDE.002.1	Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan yang dibina	Orang	N/A	1.390,00	2.500,00	3.500,00	5.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0		
IKRO.2137.QDE.002.2	Jumlah remaja Kristen usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Orang	N/A	0	0	0	200	300	0	0	0	0	0		
IKRO.2137.QDE.002.3	Jumlah calon pengantin Kristiani	Pasangan	N/A	154.900,00	155.200,00	155.500,00	155.800,00	156.000,00	0	0	0	0	0		
RO.2137.QEI.001	2137.QEI.001 - Bantuan Rumah Ibadah Agama Kristen yang Difasilitasi untuk meningkatkan Layanan	Lembaga	529	782	950	1.280,00	1.980,00	2.035,00	40.732,00	44.000,00	55.000,00	66.000,00	75.900,00		
IKRO.2137.QEI.001.1	Jumlah Rumah Ibadah Agama Kristen yang mendapat bantuan dalam pemenuhan standar sarana prasarana	Lembaga	529	782	950	1280	1980	2035	0	0	0	0	0		
RO.2137.QEO.001	2137.QEO.001 - Kitab Suci dan Sarana Peribadatan agama Kristen yang disediakan		25.113,00	25.959,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00	42.000,00	7.171	9.000	11.250	13.500	15.525		
IKRO.2137.QEO.001.1	Jumlah Kitab Suci Agama Kristen yang disediakan	Unit	25.113,00	25.959,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00	42.000,00	0	0	0	0	0		
IKRO.2137.QEO.001.2	Jumlah Buku Keagamaan Kristen pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Unit	NA	0	5	10	15	20	0	0	0	0	0		
RO.2137.QDB.002	2137.QDB.002 - Pembinaan/Penguatan Lembaga Amal Sosial Kristiani dalam Program Literasi Pengentasan Kemiskinan		1	1	1	2	2	3	600	1.500,00	1.875,00	2.250,00	2.587,50		
IKRO.2137.QDB.002.1	Jumlah Lembaga Amal Sosial Kristiani yang dibina/diperkuat dalam pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan	Lembaga	1	1	1	2	2	3	0	0	0	0	0		
RO.2137.QEI.002	2137.QEI.002 Bantuan Operasional Pembinaan Lembaga Pengelola Amal Sosial Kristiani			3	3	3	3	3	500	3.000	4.500	6.000	7.000		
IKRO.2137.QEI.002.1	Jumlah Lembaga dana Amal Sosial Kristiani yang memperoleh bantuan operasional	Lembaga	N/A	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0		
2140 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik									136.803.866	124.261.101	138.690.666	162.154.316	199.835.931	Bimas Katolik	
SK.2140.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama Katolik								0	0	0	0	0		
IKSK.2140.1.1	Persentase Peningkatan Dialog Kerukunan Agama Katolik yang difasilitasi untuk merumuskan Rekomendasi EWS	Persen	N/A	0	50	33,33	25	20	0	0	0	0	0		
IKSK.2140.1.2	Persentase Peningkatan Audiens Pesparani	Persen	N/A	7,14	5,88	6,25	5,56	5,86	0	0	0	0	0		
IKSK.2140.1.3	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Katolik	Persen	N/A	10	5,56	7,14	6,67	5,26	0	0	0	0	0		
IKSK.2140.1.4	Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Katolik yang diselenggarakan Negara	Persen	N/A	4,17	4,2	4,61	4,95	5,24	0	0	0	0	0		
IKSK.2140.1.5	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Katolik yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	N/A	17,5	36,25	56,25	77,5	85	0	0	0	0	0		
RO 1	2140.AEG.001 - Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Hari Besar Keagamaan Katolik	Kegiatan	N/A	0	1	1	1	1	0	1.000.000	1.150.000	1.322.500	1.520.875		
IKRO 1	Jumlah partisipan perayaan hari besar besar agama Katolik yang diselenggarakan Negara	Orang	N/A	0	13.025,00	13.625,00	14.300,00	15.050,00	0	0	0	0	0		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
RO 2	2140.PEG.001 - Penyelenggaraan Event dan Seni Budaya Keagamaan Katolik (Pesarani)	Kegiatan	N/A	39	39	38	38	39	1.900.000	10.000.000	2.185.700	2.512.750	11.500.000					
IKRO 1	Jumlah audiens penyelenggaraan Pesarani	Orang	N/A	0	19.500,00	0	0	20.300,00	0	0	0	0	0					
IKRO 2	Jumlah peserta event seni budaya agama Katolik	Orang	N/A	0	8.000,00	0	0	8.300,00	0	0	0	0	0					
IKRO 3	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Seni Budaya Keagamaan Katolik (Pesarani)	Kegiatan	N/A	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0					
RO 3	2140.QDB.002 - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Katolik	Lembaga	N/A	179	179	179	179	179	7.458.000	8.576.700	9.863.205	11.342.686	13.044.089					
IKRO 1	Jumlah lembaga agama Katolik dan sosial keagamaan Katolik yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Lembaga	N/A	179	179	179	179	179	0	0	0	0	0					
RO 4	2140.QDD.002 - Dialog Kerukunan Umat Beragama Katolik	Kelompok Masyarakat	N/A	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	5.004.415	5.755.077	6.618.339	7.611.090	8.752.753					
IKRO 1	Jumlah dialog kerukunan agama Katolik difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Kegiatan	N/A	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0					
SK.2140.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Katolik yang profesional, inklusif, dan berdampak								0	0	0	0	0					
IKSK.2140.2.1	Persentase Penyuluh Agama Katolik yang memperoleh nilai kinerja berkategori Baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	100	80	85	90	95	96	0	0	0	0	0					
IKSK.2140.2.2	Rasio Penyuluh Agama Katolik dengan Kelompok Sasaran yang mendapatkan Bimbingan Agama Katolik	Nilai	01:02	01:06	01:06	01:06	01:06	01:06	0	0	0	0	0					
IKSK.2140.2.3	Persentase peningkatan frekuensi bimbingan perkawinan Katolik	Persen	N/A	23,33	28,59	36,09	45,39	56,03	0	0	0	0	0					
IKSK.2140.2.4	Persentase remaja Katolik usia sekolah yang memperoleh bimbingan perkawinan pra nikah	Persen	N/A	0	12	25	30	32	0	0	0	0	0					
IKSK.2140.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga bahagia Katolik yang disediakan	Persen	N/A	16,81	35,3	55,46	76,47	90	0	0	0	0	0					
IKSK.2140.2.6	Persentase rumah ibadah Katolik yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	N/A	4,21	6,5	8,87	11,32	13,83	0	0	0	0	0					
IKSK.2140.2.7	Persentase peningkatan Kitab Suci Agama Katolik yang disediakan	Persen	N/A	19,77	39,69	59,68	79,73	99,78	0	0	0	0	0					
IKSK.2140.2.8	Persentase Buku Keagamaan Katolik pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	N/A	0	15	20	23,33	25	0	0	0	0	0					
IKSK.2140.2.9	Persentase jumlah calon penerima Dana Amal Kasih Katolik terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	N/A	18,97	38,45	58,45	78,97	99,49	0	0	0	0	0					
IKSK.2140.2.10	Persentase Lembaga Dana Amal Kasih Katolik yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan	Persen	N/A	80	85	90	95	96	0	0	0	0	0					
RO 1	2140.QDB.001 - Pembinaan Lembaga Pengelola Dana Amal Kasih Katolik yang Diperkuat Program Pengentasan Kemiskinan	Lembaga	N/A	38	38	38	38	38	500.000	1.900.000	2.185.000	2.512.750	2.889.672					
IKRO 1	Jumlah Calon Penerima dana Amal Kasih Katolik terintegrasi basis data terpadu nasional	Orang	N/A	18.390,00	18.890,00	19.390,00	19.890,00	20.390,00	0	0	0	0	0					
IKRO 2	Jumlah Lembaga BAKKAT yang dibina	Lembaga	N/A	1	2	3	4	4	0	0	0	0	0					
RO 2	2140.QDB.003 - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Agama Katolik (KWI)	Lembaga	N/A	51	51	51	51	51	1.950.000	2.550.000	2.932.500	3.372.375	3.878.244					
IKRO 1	Jumlah lembaga agama Katolik yang profesional yang dibantu	Lembaga	N/A	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0					
RO 3	2140.QDC.001 - Penyuluh Agama Katolik Non ASN Penerima Tunjangan	Orang	N/A	2.777,00	0	0	0	0	33.324.000	0	0	0	0					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE						TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029						
RO.2143 QDC 002	2143 QDC 002 Penyuluh Agama Hindu yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	1.358	1.259	1.300	1.400	1.550	1.730	3.465	6.756	4.956	4.956	4.956						
IKRO.2143 QDC 002.1	Jumlah penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Orang	1450 & 11600	1450 & 11600	1450 & 11600	1450 & 11600	1450 & 11600	1450 & 11600	0	0	0	0	0						
RO.2143 QDC 003	2143 QDC 003 Penyuluh Agama Hindu yang dibina menjadi influencer sosial media	Orang	0	0	433	433	433	433	0	937	937	937	937						
IKRO.2143 QDC 003.1	Jumlah Konten Digital Keagamaan Inklusif Transformatif yang dihasilkan	Konten	0	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000	0	0	0	0	0						
RO.2143 QDE 001	2143 QDE 001 Bimbingan Keluarga Sukinah	Keluarga	1.684	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	4.284	10.197	11.197	12.697	13.197						
IKRO.2143 QDE 001.1	Jumlah keluarga mendapatkan bimbingan keluarga Sukinah	Keluarga	1.500	2.500	2.725	2.975	3.275	3.625	0	0	0	0	0						
RO.2143 QDE 002	2143 QDE 002 Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Hindu	Keluarga	0	405	405	405	405	405	3.141	7.066	8.066	9.066	10.066						
IKRO.2143 QDE 002.1	Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan yang tersertifikasi	Orang	0	70	75	80	85	90	0	0	0	0	0						
IKRO.2143 QDE 002.2	Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	Orang	0	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600	0	0	0	0	0						
IKRO.2143 QDE 002.3	Jumlah catin yang memperoleh bimbingan perkawinan	Orang	0	800	880	980	1.100	1.240	0	0	0	0	0						
RO.2143 QEO 001	2143 QEO 001 Kitab suci dan sarana peribadatan agama Hindu yang disediakan	Unit	13.453	22.961	22.961	22.961	22.961	22.961	10.480	29.049	33.549	36.563	40.063						
IKRO.2143 QEO 001.1	Jumlah peningkatan kitab suci yang disediakan	Unit	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	0	0	0	0	0						
IKRO.2143 QEO 001.2	Jumlah buku keagamaan agama Hindu pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Unit	6.953	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	0	0	0	0	0						
RO.2143 QEI 003	2143 QEI 003 Rumah ibadah Agama Hindu yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	Lembaga	389	407	410	416	416	421	21.728	26.933	32.383	38.383	44.758						
IKRO.2143 QEI 003.1	Jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan	Lembaga	389	407	410	416	416	421	0	0	0	0	0						
RO.2143 QDB 003	2143 QDB 001 Lembaga Agama yang dibantu	Lembaga	196	63	196	196	196	196	1.852	14.619	14.629	14.629	14.619						
IKRO.2143 QDB 003.1	Jumlah Lembaga Agama Hindu yang Profesional	Lembaga	300	225	250	275	300	325	0	0	0	0	0						
RO.2143 QEI 002	2143 QEI 002 Prasarana lembaga agama dan keagamaan Hindu yang dibantu	Lembaga	15	14	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0						
IKRO.2143 QEI 002.1	Jumlah Lembaga Agama Hindu yang Profesional	Lembaga	15	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
RO.2143 QDB 002	2143 QDB 002 Pembinaan Lembaga Dana Pania yang diperkuat literasi dengan Program Pengentasan Kemiskinan	Lembaga	8	39	45	50	55	60	625	4.025	4.025	4.025	4.025						
IKRO.2143 QDB 002.1	Jumlah calon penerima dana Dana punia terintegrasi basis data terpadu nasional	Orang	200	200	300	420	520	630	0	0	0	0	0						
RO.2143 QEI 004	2143 QEI 004 Bantuan Operasional Badan Dharma Dana Nasional (BDDN)	Lembaga	1	1	1	1	1	1	200	500	500	500	500						
IKRO.2143 QEI 004	Jumlah Lembaga Dharma Dana yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan	Lembaga	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0						
2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha									-	-	-	-	-	Bimas Buddha					
SK.2145.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan Umat Buddha																		
IKSK.2145.1.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Buddha yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	100	10	15	20	25	30	0	0	0	0	0						



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKSK.2145.1.2	Persentase peningkatan audiens Swayamvara Tripitaka Gatha	Persen	40	0	50	0	0	60	0	0	0	0	0					
IKSK.2145.1.3	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Buddha	Persen	15,38	0	15	0	0	15,07	0	0	0	0	0					
IKSK.2145.1.4	Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Buddha yang diselenggarakan Negara	Persen	0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	0	0	0	0	0					
IKSK.2145.1.5	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Buddha yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	16,23	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	0	0	0	0	0					
RO 1	2145 PEG 001 Event Seni Budaya Keagamaan Buddha (Swayamvara Tripitaka Gatha)	Kegiatan	1	0	1	0	0	1	7.010,00	27.000,00	27.500,00	28.075,00	28.729,00					
IKRO	Jumlah audiens penyelenggaraan Swayamvara Tripitaka Gatha	Orang	700	0	1000	0	0	1500	0	0	0	0	0					
IKRO	Jumlah peserta event seni budaya agama	Orang	500	0	1725	0	0	1985	0	0	0	0	0					
RO 2	2145 AEG 001 Event Hari Besar Keagamaan Buddha	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000					
IKRO	Jumlah partisipan perayaan hari besar Buddha yang diselenggarakan Negara	Orang	0	4500	5000	5500	6000	6500	0	0	0	0	0					
RO 3	2145 QDD 001 Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha dan Moderasi Beragama Buddha	Kelompok Masyarakat	0	272	272	272	272	272	7.894	12.937	13.584	14.263	14.976					
IKRO	Jumlah dialog kerukunan agama Buddha difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Kelompok Masyarakat	0	272	272	272	272	272	0	0	0	0	0					
RO 4	2145 QDB 002 Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Buddha	Lembaga		364	364	364	364	364	1.132	1.185	1.244	1.306	1.372					
IKRO	Jumlah lembaga sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Lembaga		364	364	364	364	364	0	0	0	0	0					
RO 5	2145 QDB 003 Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Agama Buddha	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
IKRO	Jumlah lembaga agama Buddha yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
SK.2145.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Buddha yang profesional, inklusif, dan berdampak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
IKSK.2145.2.1	Persentase penyuluh agama Buddha yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan Harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	7,21	14,66	19,55	24,44	29,33	34,21	0	0	0	0	0					
IKSK.2145.2.2	Rasio penyuluh agama Buddha dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	01:04	01:06	01:06	01:06	01:06	01:06	0	0	0	0	0					
IKSK.2145.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan Agama Buddha yang tersertifikasi	Persen	N/A	0	12,56	25,13	37,69	50,25	0	0	0	0	0					
IKSK.2145.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah Agama Buddha	Persen	N/A	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0					
IKSK.2145.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga Agama Buddha yang disediakan	Persen	0	18,64	14,29	12,5	11,11	10	0	0	0	0	0					
IKSK.2145.2.6	Persentase rumah ibadah Agama Buddha yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan	Persen	3,28	4,24	4,36	4,57	4,75	5,1	0	0	0	0	0					
IKSK.2145.2.7	Persentase peningkatan kitab suci Agama Buddha yang disediakan	Persen	0	5	10	10	10	10	0	0	0	0	0					
IKSK.2145.2.8	Persentase buku keagamaan Buddha pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	N/A	3,88	4,63	5,51	6,51	7,63	0	0	0	0	0					
IKSK.2145.2.9	Persentase jumlah calon penerima Dana Paramita terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	0	5	7	10	12	15	0	0	0	0	0					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKSK.2145.2.10	Persentase Lembaga Dana Paramita yang meningkatkan kompetensi tata kelola untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan	Persen	100	92	94	96	98	99	0	0	0	0	0		
RO 1	2145 QDC 001 Penyuluh Agama Buddha Non ASN Penerima Tunjangan	Orang	1091	1081	948	948	948	948	12.972	11.376	11.376	11.376	11.376		
IKRO	Jumlah penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Orang	1000	1000	948	948	948	948	0	0	0	0	0		
RO 2	2145 QDC 002 Penyuluh Agama Buddha yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	1261	1208	1208	1208	1208	0	1.596	4.224	4.435	4.657	4.890		
IKRO	Jumlah penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Orang	1261	1208	1208	1208	1208	0	0	0	0	0	0		
RO 3	2145 QDC 003 Penyuluh Agama Buddha yang Aktif dalam Konten Digital Keagamaan Inklusif Transformatif	Orang	0	305	305	305	305	305	1.724	2.335	2.452	2.574	2.703		
IKRO 1	Jumlah penyuluh agama Buddha yang dibina menjadi influenser sosial media	Orang	0	50	65	80	95	110	0	0	0	0	0		
IKRO 2	Jumlah Konten Digital Penyuluh Agama Buddha Inklusif Transformatif yang dibuat dan dipublikasikan	Konten Digital	0	279	300	315	331	347	0	0	0	0	0		
RO 4	2145 QDE 001 Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya	Keluarga	2000	1765	1765	1765	1765	1765	902	1.650	1.733	1.819	1.910		
IKRO	Jumlah layanan bimbingan keluarga Hitta Sukkhaya yang disediakan	Keluarga	2000	1765	1765	1765	1765	1765	0	0	0	0	0		
RO 5	2145 QDE 002 Calon Pengantin Buddha yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan	Pasangan	0	765	765	765	765	765	765	500	525	551	579		
IKRO	Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan agama Buddha yang tersertifikasi	Orang	0	0	50	100	150	200	0	0	0	0	0		
IKRO	Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah agama Buddha	Remaja	0	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0		
IKRO	Jumlah catin agama Buddha yang memperoleh bimbingan perkawinan	Pasangan	0	105	110	115	120	125	0	0	0	0	0		
RO 6	2145 QEO 001 Bantuan Kitab Suci dan Sarana Peribadatan Agama Buddha	Unit	0	13952	13952	13952	13952	13952	1.433	4.400	4.620	4.851	5.094		
IKRO	Jumlah peningkatan kitab suci yang disediakan	Unit	0	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0		
IKRO	Jumlah buku keagamaan Buddha pendukung peribadatan yang sesuai kaedah	Unit	0	1452	5000	5750	6538	7364	0	0	0	0	0		
IKRO	Jumlah sarana peribadatan yang disediakan	Unit	0	1000	2000	3000	4000	5000	0	0	0	0	0		
RO 7	2145 QEI 003 Rumah Ibadah Agama Buddha yang Difasilitasi untuk Meningkatkan Layanan	Rumah Ibadah	186	241	248	260	273	287	34.915	36.025	37.827	39.718	41.704		
IKRO	Jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan	Rumah Ibadah	186	241	248	260	273	287	0	0	0	0	0		
RO 8	2145 QEI 001 Bantuan Lembaga Agama Buddha	Lembaga	100	82	82	82	82	82	6.582	6.291	6.605	6.935	7.282		
IKRO	Jumlah Lembaga Agama Buddha yang Profesional	Lembaga	100	82	82	82	82	82	0	0	0	0	0		
RO 9	2145 QDD 002 Kelompok Masyarakat Buddha yang Memperoleh Penguatan Pemberdayaan Ekonomi	Kelompok Masyarakat	35	0	30	32	33	35	0	1.500	1.575	1.654	1.736		
IKRO	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dan dikuatkan dalam pemberdayaan ekonomi	Kelompok Masyarakat	35	0	30	32	33	35	0	0	0	0	0		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	2148 QDC 001 Petugas Haji yang Profesional	Orang	N/A	18015	0	0	0	0	423.396	0	0	0	0		
	Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Orang	N/A	4420	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2148 QDC 002 Jemaah Haji Reguler yang Terbina	Orang	N/A	117670	0	0	0	0	15.133	0	0	0	0		
	Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Orang	N/A	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama														Bagian Tata Usaha	
SK.5620.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama														
IKSK.5620.1.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	10	19	28	37	46	55	0	0	0	0	0		
IKSK.5620.1.2	Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi	Persen	18,79	30	35	40	45	50	0	0	0	0	0		
IKSK.5620.1.3	Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (agama dan etnis)	Nilai	61,78	64,39	66,99	69,6	72,2	74,81	0	0	0	0	0		
RO.5620.QDB.001	5620 QDB 001 FKUB Daerah yang Melakukan Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik	Lembaga	550	550	552	552	552	552	30.700	93.924	93.924	63.884	0		
IKRO.5620.QDB.001.1	Jumlah Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi	Provinsi	8	9	10	11	12	13	0	0	0	0	0		
IKRO.5620.QDB.001.2	Jumlah FKUB Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitasi dialog kerukunan umat beragama	Jumlah	512	512	514	514	514	514	0	0	0	0	0		
RO.5620.QDC.002	5620 QDC 002 Tokoh Masyarakat terlibat dalam Kerjasama Kerukunan Umat Agama Nasional dan Internasional	Orang	N/A	500	2606	2606	500	500	48.893	53.513	106.502	111.882	111.882		
IKRO.5620.QDC.001.1	Jumlah dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Dialog	18	30	49	58	77	96	0	0	0	0	0		
IKRO.5620.QDC.001.2	Jumlah tokoh masyarakat yang terlibat dalam kerjasama kerukunan umat beragama	Orang	N/A	60	98	116	154	192	0	0	0	0	0		
7891 Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal														Bidang Urais	
SK.7891.1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Islam dan Kualitas Pengawasan dalam Pemanfaatan Produk Halal														
IKSK.7891.1.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	N/A	0,84	1,67	3,34	4,3	6,69	0	0	0	0	0		
RO.7891.PBN.001	7891.PBN.001 Kebijakan Penjaminan Produk Halal	Rekomendasi Kebijakan	N/A	1	1	1	1	1	1000	1500	1500	1500	1500		
IKRO.7891.PBN.001.1	Jumlah hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan	Dokumen	N/A	50	100	200	300	400	0	0	0	0	0		
025.DF - Program Wajib Belajar 13 Tahun														Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu dan Bimas Buddha	
2128 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam														Bidang PD Pontren	
SK.2128.1	Meningkatnya sarana dan prasarana Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan yang berkualitas														
IKSK.2128.1.1	Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras	Persen	N/A	10	15	20	25	30	30.000	45.000	60.000	75.000	90.000		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKRO 2128 QEN 005.1	2128 QEN 005 Santri Tk. Ula/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Orang	31.130	36.621	42.112	47.603	53.094	58.585	34.905,49	40.322	45.739	51.157	56.573,68					
IKRO 2128 QEN 005.1.1	Jumlah Santri Tk. Ula/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Orang	31.130	36.621	42.112	47.603	53.094	58.585	0	0	0	0	0					
IKRO 2128 QEN 005.1.2	Jumlah Anak Kelas 1 Ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	Orang	2.028	2.528	3.028	3.528	4.028	4.528	0	0	0	0	0					
IKRO 2128 QEN 006.1	2128 QEN 006 Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Orang	162.700	205.024	247.348	289.672	331.996	374.320	222.834,83	257.058	291.282	325.507	359.730,68					
IKRO 2128 QEN 006.1.1	Jumlah Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Orang	162.700	205.024	247.348	289.672	331.996	374.320	0	0	0	0	0					
IKRO 2128 QEN 007.1	2128 QEN 007 Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Orang	89.007	127.545	166.083	204.621	243.159	281.697	186.388,37	215.306	244.223	273.141	302.056,77					
IKRO 2128 QEN 007.1.1	Jumlah Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Orang	89.007	127.545	166.083	204.621	243.159	281.697	0	0	0	0	0					
IKRO 2128 QEI 001.1	2128 QEI 001 Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	Lembaga	10.643	15.174	15.580	15.986	16.392	16.798	100.000	113.200	126.400	139.600	152.800					
IKRO 2128 QEI 001.1.1	Jumlah Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	Lembaga	9.554	9.824	10.094	10.364	10.634	10.905	0	0	0	0	0					
IKRO 2128 QEI 001.1.2	Jumlah pesantren yang mendapat pendampingan teknis dalam pemanfaatan dan pelaporan dana BOP	Lembaga	9.283	9.824	10.365	10.906	11.447	11.988	0	0	0	0	0					
IKRO 2128 QEI 001.1.3	Jumlah satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi	Lembaga	6.887	7.317	7.747	8.178	8.608	9.039	0	0	0	0	0					
IKRO 2128 QEI 001.1.4	Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	Orang	N/A	67	101	134	168	202	0	0	0	0	0					
IKRO 2128 QEI 001.5	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan keagamaan Islam	Orang	161.591	161.591	177.624	179.578	181.553	183.550	0	0	0	0	0					
IKRO 2128 BAA 001.1	2128.BAA.001 Layanan Legalitas Ijazah dan Pendirian Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam	Lembaga	2	2	4	4	4	4	15.000	15.750	16.538	17.364	18.232					
IKRO 2128 BAA 001.1.1	Jumlah Layanan Legalitas Ijazah dan Pendirian Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam	Layanan	2	2	4	4	4	4	0	0	0	0	0					
2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah														Bidang Pendidikan Madrasah				
SK.2129.1	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa madrasah																	
IKSK.2129.1.1	Persentase siswa madrasah yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	73	74	75	76	77	78	0	0	0	0	0					
	2129 QEN 005 Siswa MI Penerima BOS	Orang	4.512.595	4.265.178	4.652.921	5.075.914	5.537.361	6.040.758	4.123.758,08	4.764.425	5.405.091	6.045.758	6.686.424,41					
	Jumlah Siswa Madrasah MI Penerima BOS	Orang	N/A	4.254.742	4.652.921	5.075.914	5.537.361	6.040.758	0	0	0	0	0					
	Jumlah Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	Orang	N/A	342.736	359.873	377.867	396.760	416.598	0	0	0	0	0					
	2129 QEN 006 Siswa MTs Penerima BOS	Orang	3.245.429	3.270.479	3.540.519	3.832.855	4.149.329	4.491.934	3.809.459,82	4.401.296	4.993.133	5.584.970	6.176.807,32					
	Jumlah Siswa Madrasah MTs Penerima BOS	Orang	N/A	3.270.479	3.540.519	3.832.855	4.149.329	4.491.934	0	0	0	0	0					
	2129 QEN 007 Siswa MA Penerima BOS	Orang	1.478.485	1.627.097	1.689.678	1.754.665	1.822.152	1.892.235	2.600.000	3.003.784	3.407.568	3.811.352	4.215.136,87					
	Jumlah Siswa Madrasah MA Penerima BOS	Orang	N/A	1.627.097	1.689.678	1.754.665	1.822.152	1.892.235	0	0	0	0	0					
	Jumlah siswa madrasah yang lulus dengan predikat sangat baik	Orang	N/A	1.363.920	1.379.966	1.396.012	1.412.059	1.428.105	0	0	0	0	0					
	2129 QEN 008 Siswa RA Penerima BOP	Orang	1.353.594	1.362.526	1.439.650	1.521.140	1.607.242	1.698.218	817.515,60	982.288	1.147.061	1.311.835	1.476.608,34					
	Jumlah Siswa RA Penerima BOP	Orang	N/A	1.362.526	1.439.650	1.521.140	1.607.242	1.698.218	0	0	0	0	0					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
SK.2129.2	Meningkatnya sarana dan prasarana Madrasah yang berkualitas									11.590.129	11.839.129	12.088.140	12.337.154	12.586.752	
IKSK.2129.2.1	Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	42,08	46,23	50,23	54,21	58,21	62,19	5,051	5.454	5.854	6.256	6.657		
IKSK.2129.2.2	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	1,15	1,61	2,06	2,52	2,98	3,43	2.500	3.046	3.602	4.158	4.704		
IKSK.2129.2.3	Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan	Persen	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	8.871.327	8.875.763	8.880.200	8.884.640	8.889.083		
IKSK.2129.2.4	Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan daerah 3T	Persen	N/A	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	1.500	2.250	3.000	3.750	4.500		
IKSK.2129.2.5	Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	Persen	N/A	10	12	14	16	18	817.516	953.768	1.090.021	1.226.273	1.362.526		
IKSK.2129.5.6	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada Madrasah	Persen	26,92	28,64	30,35	32,06	33,77	35,49	1.892.235	1.998.849	2.105.462	2.212.076	2.319.283		
	2129.BAA.001 Layanan Legalitas Ijazah dan Pendirian Madrasah	Orang	1	0	1	1	2	2	0	1.500	1.500	1.575	1.575		
	Jumlah Layanan Legalitas Ijazah	Layanan	2	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0		
	Jumlah Layanan Pendirian Madrasah Negeri	Layanan	N/A	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0		
	Jumlah Layanan Pendirian Madrasah Swasta	Layanan	N/A	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0		
	Jumlah Layanan Penegrian Madrasah	Layanan	N/A	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0		
	2129.RBI.001 Prasarana Madrasah Pemenuhan SPM	Lembaga	32	37	42	47	52	57	5.051,41	5.253	5.463	5.682	5.909		
	Jumlah madrasah yang memperoleh bantuan Prasarana pembelajaran (pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, asrama siswa, tempat ibadah, sanitasi dan fasilitas penunjang digitalisasi)	Lembaga	32	37	42	47	52	57	0	0	0	0	0		
	2129.RBI.002 Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)	Lembaga	313	179	187	197	207	227	871.926,69	1.238.584	1.605.242	1.971.899	2.338.556,51		
	Jumlah madrasah yang ditingkatkan prasarananya melalui sumber pembiayaan SBSN	Lembaga	N/A	177	184	191	199	207	4.871	0	0	0	0		
	Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Lembaga	N/A	177	184	191	199	207	0	0	0	0	0		
	2129.RAA.001 Sarana Madrasah Menunjang Pembelajaran	Unit	101	5.255	5.457	5.667	5.885	6.111	516.448,59	526.449	536.449	546.449	556.449		
	Jumlah madrasah yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran (peralatan belajar, laboratorium, ekstrakurikuler dan multimedia)	Unit	N/A	200	208	216	225	234	0	0	0	0	0		
	2129.QEI.003 Bantuan Pengembangan Madrasah Inklusif	Lembaga	12	5	10	10	10	11	2.499,96	2.550	2.601	2.653	2.706		
	Jumlah madrasah yang memperoleh pengadaan sarana untuk siswa berkebutuhan khusus sesuai standar pendidikan inklusif	Lembaga	N/A	5	800	816	832	849	0	0	0	0	0		
	2129.QEI.002 Bantuan Madrasah Daerah 3T	Lembaga	40	40	73	74	76	77	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624		
	Jumlah Siswa Daerah 3T yang Memperoleh Bantuan Pendidikan	Lembaga	N/A	22	120	122	125	127	0	0	0	0	0		
	2129.QEN.001 Siswa Madrasah MI Penerima PIP	Orang	939.607	1.028.209	0	0	0	0	462.694,05	0	0	0	0		
	Jumlah Siswa Madrasah MI Penerima PIP	Orang	N/A	685.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2129.QEN.002 Siswa Madrasah MTS Penerima PIP	Orang	745.086	907.961	0	0	0	0	680.970,75	0	0	0	0		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Jumlah Siswa Madrasah MTs Penerima PIP	Orang	N/A	907.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2129 QEN 003 Siswa Madrasah MA Penerima PIP	Orang	320.372	393.493	0	0	0	0	0	614.976,44	0	0	0		
	Jumlah Siswa Madrasah MA Penerima PIP	Orang	N/A	393.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2129 QEI 004 Bantuan Pengembangan Peningkatan Mutu UKS/M	Lembaga	N/A	200	211	223	236	249	1.500	1.531	1.561	1.592	1.622,06		
	Jumlah madrasah yang menerima bantuan sarana prasarana UKS sesuai standar layanan kesehatan dasar	Lembaga	N/A	100	106	112	118	125	0	0	0	0	0		
	Jumlah madrasah yang melakukan penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan UKS/M (puskesmas, komite sekolah, dinas kesehatan)	Lembaga	N/A	100	106	111	118	124	0	0	0	0	0		
	2129 SBB 001 Penyelenggaraan Madrasah Unggulan	Lembaga	7924	12.188	13.651	15.289	17.123	19.178	66.088,28	98.155	130.222	162.290	194.357		
	Jumlah Penyelenggaraan Madrasah Unggulan	Lembaga	N/A	12.188	13.651	15.289	17.123	19.178	0	0	0	0	0		
2136 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen														Bimas Kristen	
SK.2136.1	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan Kristen														
IKSK.2136.1.1	Persentase siswa satuan pendidikan keagamaan Kristen yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	5	6	7	8	9	10	0	0	0	0	0		
RO	2136.QEN.004 - Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMTK/SMIAK		13258	13333	14096	14483	14839	15268	23.757,85	30.559,69	27.256,21	28.256,21	29.256,21		
IKRO	Jumlah Siswa SMTK/SMIAK Penerima BOS	Orang	13258	13333	14096	14483	14839	15268	0	0	0	0	0		
RO	2136.QEN.005 - Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMPTK		6270	6627	7251	7754	8302	8883	8.945,83	9.257,36	10.220,66	10.942,31	11.140,50		
IKRO	Jumlah Siswa SMPTK Penerima BOS	Orang	6270	6627	7251	7754	8302	8883	0	0	0	0	0		
IKRO	Jumlah siswa satuan pendidikan keagamaan Kristen yang lulus dengan predikat sangat baik	Orang	1216	1527	1925	2302	2675	3120	0	0	0	0	0		
RO	2136.QEN.006 - Bantuan Operasional Siswa (BOS) SDTK		4807	5490	6154	6547	6584	7056	5.640,77	6.276,52	6.808,16	7.233,11	8.938,14		
IKRO	Jumlah Siswa SSDK Penerima BOS	Orang	4807	5490	6154	6547	6584	7056	0	0	0	0	0		
SK.2136.2	Meningkatnya sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang berkualitas														
IKSK.2136.2.1	Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	59,76	62,62	65,41	68,14	70,8	73,41	0	0	0	0	0		
IKSK.2136.2.2	Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	59,76	62,62	65,41	68,14	70,8	73,41	0	0	0	0	0		
IKSK.2136.2.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan keagamaan Kristen	Persen	5,16	5,17	5,18	5,19	5,2	5,21	0	0	0	0	0		
IKSK.2136.2.4	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan keagamaan Kristen daerah 3 T	Persen	N/A	4,88	4,91	5,29	5,45	5,56	0	0	0	0	0		
IKSK.2136.2.5	Persentase Anak Kelas 1 SSDK yang Pernah Mengikuti PAUD/TK	Persen	N/A	50	55	60	65	70	0	0	0	0	0		
IKSK.2136.2.6	Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	N/A	20,46	22,09	25,58	34,88	41,86	0	0	0	0	0		
RO	2136.QEI.001 - Bantuan Perlatan Sarana Penunjang Pembelajaran Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah Swasta		1	1	50	100	150	200	7.570,78	9.000,00	13.000,00	15.000,00	20.000,00		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKRO.1	Jumlah lembaga pendidikan Keagamaan Kristen yang menerima Bantuan Sarana Penunjang Pembelajaran	Lembaga	1	1	50	100	150	200	0	0	0	0	0		
IKRO.2	Jumlah peningkatan siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen	Orang	1165	1228	1293	1363	1436	1514	0	0	0	0	0		
IKRO.3	Jumlah peningkatan siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen daerah 3T	Orang	N/A	468	530	600	650	700	0	0	0	0	0		
IKRO.4	Jumlah Anak Kelas 1 SDTK yang Pernah Mengikuti PAUD	Orang	N/A	372	425	492	575	683	-	500	600	700	800		
RO	2136.QEI.002 - Bantuan Pengembangan Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah Swasta		1	10	20	25	30	40	21.150,00	25.000,00	28.000,00	35.000,00	40.000,00		
IKRO.1	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Kristen yang mendapatkan bantuan pengembangan prasarana	Lembaga	1	10	20	25	30	40	0	0	0	0	0		
IKRO.2	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Lembaga	N/A	88	95	110	150	180	0	0	0	0	0		
RO	2136.RAA.001 - Sarana Pendukung Pembelajaran Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah Negeri			0	30	50	75	100	-	13.000,00	16.250,00	19.500,00	22.425,00		
IKRO	Jumlah Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Dasar dan Menengah	Unit	NA	0	30	50	75	100	0	0	0	0	0		
RO	2136.RBI.001 - Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah Negeri		13	13	26	39	39	52	11.530,79	52.000,00	65.000,00	78.000,00	89.700,00		
IKRO	Jumlah Prasarana Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan Kristen Negeri	Unit	NA	13	26	39	39	52	0	0	0	0	0		
RO	2136.QEN.001 - Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Siswa SMTK/SMAK		11337	12166	0	0	0	0	21.285,40	-	-	-	-		
IKRO	Jumlah Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP	Orang	11337	12166	puspenma	puspenma	puspenma	puspenma	0	0	0	0	0		
RO	2136.QEN.002 - Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Siswa SMP TK		4895	5729	0	0	0	0	4.296,75	-	-	-	-		
IKRO	Jumlah Siswa SMP TK Penerima PIP	Orang	4895	5729	puspenma	puspenma	puspenma	puspenma	0	0	0	0	0		
RO	2136.QEN.003 - Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Siswa SDTK		2652	3053	0	0	0	0	1.373,85	-	-	-	-		
IKRO	Jumlah Siswa SDTK Penerima PIP	Orang	2652	3053	puspenma	puspenma	puspenma	puspenma	0	0	0	0	0		
2139 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik														Bimas Katolik	
SK.2139.1	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan Katolik														
IKSK.2139.1.1	Persentase siswa satuan pendidikan keagamaan Katolik yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	N/A	25	30	35	40	45	0	0	0	0	0		
RO	2139.QEN.006 - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMAK Katolik	Orang							11.479.560	14.712.000	19.455.700	25.727.915	34.027.812		
IKRO.1	Jumlah Siswa SMAK Katolik Penerima BOS	Orang	N/A	6.396,00	7.441,00	8.222,00	9.085,00	10.680,00	0	0	0	0	0		
IKRO.2	Jumlah siswa satuan pendidikan keagamaan Katolik yang lulus dengan predikat sangat baik	Orang	N/A	470	650	805	1.000,00	1.170,00	0	0	0	0	0		
SK.2139.2	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan Katolik yang berkualitas														
IKSK.2139.2.1	Persentase satuan pendidikan keagamaan Katolik yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	41,9	19,66	39,32	58,97	79,49	80	0	0	0	0	0		
IKSK.2139.2.2	Persentase satuan pendidikan keagamaan Katolik yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	41,9	18,6	37,21	58	79,07	80	0	0	0	0	0		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKSK.2139.2.3	Persentase Peningkatan Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik	Persen	13,8	5,32	12,34	9,26	9,32	9,43	0	0	0	0	0		
IKSK.2139.2.4	Persentase Peningkatan Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik Daerah 3 T	Persen	N/A	96,3	5,01	4,99	5	5	0	0	0	0	0		
IKSK.2139.2.5	Persentase Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik yang Menyelenggarakan Layanan Kesehatan Sekolah	Persen	N/A	10,87	23,91	45,65	76,09	80	0	0	0	0	0		
IKSK.2139.2.6	Persentase Anak Kelas 1 SD Keagamaan Katolik yang Pernah Mengikuti PAUD/TK	Persen	N/A	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0		
RO 1	2139.QEI.007 - Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang diberikan bantuan	Lembaga		282	282	282	282	282	6.453.636	7.063.000	8.122.000	9.340.500	10.741.385		
IKRO 1	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Katolik yang menerima bantuan penguatan kelembagaan	Lembaga	N/A	68	68	90	95	117	0	0	0	0	0		
IKRO 2	Jumlah lembaga Katolik yang memperoleh pendampingan teknis atau supervisi dalam pengelolaan bantuan	Lembaga	N/A	68	68	90	95	117	0	0	0	0	0		
IKRO 3	Jumlah anak Kelas 1 SD Katolik yang pernah mengikuti PAUD/TK/Taman Seminari	Orang	N/A	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0		
IKRO 4	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Katolik yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran (peralatan belajar, laboratorium, ekstrakurikuler dan multimedia)	Lembaga	N/A	23	23	23	24	24	0	0	0	0	0		
IKRO 5	Jumlah satuan pendidikan Katolik yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Lembaga	N/A	5	14	18	22	20	0	0	0	0	0		
IKRO 6	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Katolik swasta yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Lembaga	N/A	8	8	9	9	9	0	0	0	0	0		
IKRO 7	Jumlah peningkatan siswa pada satuan pendidikan keagamaan Katolik	Orang	N/A	409	470	540	622	715	0	0	0	0	0		
IKRO 8	Jumlah peningkatan siswa pada satuan pendidikan keagamaan Katolik daerah 3 T	Orang	N/A	95	109	125	144	166	0	0	0	0	0		
RO 2	2139.QEI.008 - Prasarana SMAK Swasta Katolik	Lembaga		26	30	30	30	30	21.461.400	22.500.000	25.875.000	29.756.250	34.219.695		
IKRO 1	Jumlah layanan pendirian satuan pendidikan keagamaan Katolik swasta	Lembaga	N/A	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
IKRO 2	Jumlah ruang kelas satuan pendidikan Katolik swasta yang direhabilitasi atau dibangun baru sesuai standar ruang belajar	Lembaga	N/A	26	30	30	30	30	0	0	0	0	0		
RO 3	2139.QEN.005 - Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Taman Seminari	Orang	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IKRO 1	Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan Katolik Penerima BOP	Orang	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RO 4	2139.QEN.007 - Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMAK Katolik	Orang	N/A	4.054,00	0	0	0	0	7.297.200	0	0	0	0		
IKRO 1	Jumlah Siswa SMAK Katolik Penerima PIP	Orang	N/A	4.054,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RO 5	2139.RAA.001 - Peralatan/Sarana pada SMAK Katolik Negeri	Unit	N/A	0	5	5	5	5	0	5.000.000	5.750.000	5.900.000	6.000.000		
IKRO 1	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Katolik negeri yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran (peralatan belajar, laboratorium, ekstrakurikuler dan multimedia)	Lembaga	N/A	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0		
RO 6	2139.RBI.001 - Prasarana SMAK Katolik Negeri	Unit	N/A	18	5	5	5	18	33.000.000	34.002.365	36.566.900	39.411.995	41.668.357		
IKRO 1	Jumlah Layanan Pendirian Satuan Pendidikan Katolik Negeri	Lembaga	N/A	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKRO 2	Jumlah Layanan Penerimaan Satuan Pendidikan Katolik	Lembaga	N/A	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0					
IKRO 3	Jumlah ruang kelas satuan pendidikan Katolik yang direhabilitasi atau dibangun baru sesuai standar ruang belajar	Lembaga	N/A	3	5	5	5	5	0	0	0	0	0					
2142 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu									36.751	36.441	37.601	39.001	39.688	Bimas Hindu				
SK.2142.1	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu																	
IKSK.2142.1.1	Persentase siswa widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang lulus dengan predikat sangat baik	Persentase	50	85	86	87	88	90	0	0	0	0	0					
IKSK.2142.1.2	Persentase Anak Kelas 1/Adi Widyalaya yang Pernah Mengikuti Pratama Widyalaya	Persen	86,62	89,06	90,09	91,6	94,37	96,39	0	0	0	0	0					
RO.2142.QEN.001	2142 QEN 001 Siswa penerima BOS Tk Adi	Orang	877	907	1,081,00	1,186,00	1,326,00	1,326,00	899	1.042	1.047	1.280	1.280					
IKRO.2142.QEN.001.2	Jumlah Siswa penerima BOS Tk Adi	Orang	877	907	1,081,00	1,186,00	1,326,00	1,326,00	0	0	0	0	0					
RO.2142.QEN.002	2142 QEN 002 Siswa penerima BOS Tk Madyama	Orang	283	359	380	440	520	580	359	382	449	537	603					
IKRO.2142.QEN.001.1	Jumlah Siswa penerima BOS Tk Madyama	Orang	283	359	380	440	520	580	0	0	0	0	0					
RO.2142.QEN.003	2142 QEN 003 Siswa penerima BOS Tk Utama	Orang	483	454	493	540	600	660	700	800	878	979	1.080					
IKRO.2142.QEN.003.1	Jumlah Siswa penerima BOS Tk Utama	Orang	483	454	493	540	600	660	0	0	0	0	0					
RO.2142.QEN.007	2142 QEN 007 Siswa penerima BOS Tk Pratama	Orang	1,654,00	2,390,00	2,645,00	2,846,00	3,085,00	3,435,00	1.492	1.588	1.708	1.851	2.061					
IKRO.2142.QEN.007.1	Jumlah Siswa penerima BOS Tk Pratama	Orang	1,654,00	2,390,00	2,645,00	2,846,00	3,085,00	3,435,00	0	0	0	0	0					
IKRO.2142.QEN.007.1	Jumlah siswa widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang lulus dengan predikat sangat baik	Orang	1,405,00	2,032,00	2,248,00	2,419,00	2,622,00	2,920,00	0	0	0	0	0					
SK.2142.2	Meningkatnya sarana dan prasarana widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang berkualitas																	
IKSK.2142.2.1	Persentase widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	3	5	8	11	18	28	0	0	0	0	0					
IKSK.2142.2.2	Persentase widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	2,6	3,2	7,7	11,1	17,9	27,6	0	0	0	0	0					
IKSK.2142.2.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu	Persen	3,45	4,19	4,24	4,31	4,44	4,57	0	0	0	0	0					
IKSK.2142.2.4	Persentase peningkatan jumlah siswa pada widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu daerah 3 T	Persen	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0					
IKSK.2142.2.5	Persentase satuan pendidikan keagamaan Hindu nonformal yang direvitalisasi	Persen	0	0	2,7	5,3	7,7	10	0	0	0	0	0					
IKSK.2142.2.6	Persentase widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	0	40	44	48	52	56	0	0	0	0	0					
RO.2142.QEO.001	2142 QEO 001 Sarana Lembaga pendidikan Widyalaya dan Penyelenggara Pendidikan Agama dan keagamaan Hindu	Unit	3,420,00	4,227,00	6,346,00	7,346,00	9,346,00	9,346,00	5.245	5.645	6.235	6.770	6.780					
IKRO.2142.QEO.001.1	Jumlah Lembaga Pendidikan Widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran	Lembaga	4	6	10	15	25	40	0	0	0	0	0					
IKRO.2142.QEO.001.2	Jumlah widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Lembaga	30	50	52	54	56	58	0	0	0	0	0					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKRO.2142.QEO.001.3	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Hindu nonformal yang direvitalisasi	Lembaga	0	0	1	2	3	4	0	0	0	0	0					
IKRO.2142.QEO.001.4	Jumlah siswa pada widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu daerah 3 T	Orang	765	907	1,081,00	1,186,00	1,326,00	1,326,00	0	0	0	0	0					
IKRO.2142.QEO.001.5	Jumlah peningkatan siswa pada satuan widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu	Orang	90	150	155	160	165	170	0	0	0	0	0					
RO.2142.QEI.001	2142 QEI 001 Lembaga Pendidikan Widyalaya yang diberikan bantuan	Lembaga	110	110	118	131	155	191	11.441	11.741	12.041	12.341	12.641					
IKRO.2142.QEI.001.1	Jumlah lembaga pendidikan widyalaya yang menerima bantuan penguatan kelembagaan	Lembaga	10	10	30	40	50	60	0	0	0	0	0					
IKRO.2142.QEI.001.2	Jumlah lembaga pendidikan widyalaya yang memperoleh pendampingan teknis atau supervisi dalam pengelolaan bantuan	Lembaga	40	40	42	45	50	55	0	0	0	0	0					
IKRO.2142.QEI.001.3	Jumlah Layanan Legalitas Ijazah widyalaya	Layanan	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0					
IKRO.2142.QEI.001.4	Jumlah widyalaya yang memperoleh pembinaan kelembagaan secara berkala	Lembaga	100	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0					
RO.2142.QEI.002	2142 QEI 002 Pasraman Keagamaan dan sekolah minggu yang diberikan bantuan	Lembaga	365	365	365	365	365	365	15.243	15.243	15.243	15.243	15.243					
IKRO.2142.QEI.002.5	Jumlah Layanan Pendirian Satuan Pendidikan Hindu	Layanan	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0					
IKRO.2142.QEI.002.5	Jumlah ruang kelas satuan pendidikan Hindu yang direhabilitasi atau dibangun baru sesuai standar ruang belajar	Unit	30	0	20	40	60	80	0	0	0	0	0					
RO.2142.QEN.004	2142 QEN 004 Siswa penerima PIP Tk Adi	Orang	651	799	0	0	0	0	428	0	0	0	0					
IKRO.2142.QEN.004.01	Jumlah Siswa penerima PIP Tk Adi	Orang	651	799	0	0	0	0	428	0	0	0	0					
RO.2142.QEN.005	2142 QEN 005 Siswa penerima PIP Tk Madyama	Orang	261	304	0	0	0	0	228	0	0	0	0					
IKRO.2142.QEN.005.01	Jumlah Siswa penerima PIP Tk Madyama	Orang	261	304	0	0	0	0	228	0	0	0	0					
RO.2142.QEN.006	2142 QEN 006 Siswa penerima PIP Tk Utama	Orang	276	398	0	0	0	0	716	0	0	0	0					
IKRO.2142.QEN.006.01	Jumlah Siswa penerima PIP Tk Utama	Orang	276	398	0	0	0	0	716	0	0	0	0					
4012 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha														Bimas Buddha				
SK.4012.1	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan Buddha								823	900	945	992	1.043					
IKSK.4012.1.1	Persentase siswa satuan pendidikan keagamaan Buddha yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0					
IKSK.4012.1.2	Persentase anak kelas 1 Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti Nava Dhammasekha	Persen	0	60	75	80	85	90	0	0	0	0	0					
RO.4012.QEN.001	4012 QEN 001 BOP Nava Dhammasekha	Orang	1004	1157	1190	1250	1312	1932	695	714	750	787	827					
IKRO.4012.QEN.001.1	Jumlah Siswa Nava Dhammasekha penerima BOP	Orang	1004	1157	1190	1250	1312	1932	626	643	675	708	744					
IKRO.4012.QEN.001.1	Jumlah Anak Kelas 1 Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti Nava Dhammasekha	Orang	502	579	595	625	656	966	70	71	75	79	83					
RO.4012.QEN.002	4012 QEN 002 BOS Mula Dhammasekha	Orang	53	85	90	95	99	142	77	81	85	89	94					
IKRO.4012.QEN.002.1	Jumlah Siswa Mula Dhammasekha penerima BOS	Orang	53	85	90	95	99	142	77	81	85	89	94					
RO.4012.QEN.003	4012 QEN 003 BOS Utama Dhammasekha	Orang	0	60	70	74	77	81	51	105	110	116	122					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKRO.4012.QEN.003.1	Jumlah Siswa Utama Dhammasekha penerima BOS	Orang	0	60	70	74	77	81	48	100	105	110	115		
IKRO.4012.QEN.003.1	Jumlah siswa satuan pendidikan keagamaan Buddha yang lulus dengan predikat sangat baik	Orang	0	107	110	112	113	115	3	5	6	6	6		
SK.4012.2	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan Buddha yang berkualitas								38.167	51.432	54.004	56.704	59.539		
IKSK.4012.2.1	Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	64,44	88,89	92	94	96	98	0	0	0	0	0		
IKSK.4012.2.2	Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	0	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	0	0	0	0	0		
IKSK.4012.2.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan keagamaan Buddha	Persen	23,27	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0		
IKSK.4012.2.4	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan keagamaan Buddha daerah 3T	Persen	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0		
IKSK.4012.2.5	Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha nonformal yang direvitalisasi	Persen	2,33	2,48	3	4	5	6	0	0	0	0	0		
IKSK.4012.2.6	Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	4,44	5	10	15	20	25	0	0	0	0	0		
RO.4012.QEI.001	4012 QEI 001 Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang diberikan Bantuan Operasional	Lembaga	893	817	817	817	817	817	8.573	17.120	17.976	18.875	19.818		
IKRO.4012.QEI.001.1	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Buddha yang menerima bantuan pengutan kelembagaan	Lembaga	893	817	859	902	947	994	2.572	5.136	5.393	5.663	5.945		
IKRO.4012.QEI.001.2	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Buddha yang memperoleh pendampingan teknis atau supervisi dalam pengelolaan bantuan	Lembaga	0	24	25	26	27	28	857	1.712	1.798	1.888	1.982		
IKRO.4012.QEI.001.6	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Buddha nonformal yang direvitalisasi	Lembaga	30	32	39	52	64	77	2.572	5.136	5.393	5.663	5.945		
IKRO.4012.QEI.001.4	Jumlah peningkatan siswa pada satuan pendidikan keagamaan daerah 3 T	Orang	0	22	24	27	29	32	1.715	3.424	3.595	3.775	3.964		
IKRO.4012.QEI.001.3	Jumlah peningkatan siswa pada satuan pendidikan keagamaan	Orang	246	325	407	508	635	794	857	1.712	1.798	1.888	1.982		
RO.4012.QEI.002	4012 QEI 002 Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang diberikan Bantuan Prasarana	Lembaga	0	40	117	123	129	135	14.968	17.784	18.673	19.607	20.588		
IKRO.4012.QEI.002.1	Jumlah Layanan Pendirian Satuan Pendidikan Buddha	Layanan	0	2	2	2	2	2	748	889	934	980	1.029		
IKRO.4012.QEI.002.6	Jumlah ruang kelas satuan pendidikan Buddha swasta yang direhabilitasi atau dibangun baru sesuai standar ruang belajar	Lembaga	0	3	4	5	6	7	5.239	6.224	6.536	6.862	7.206		
IKRO.4012.QEI.002.1	Jumlah Layanan Penegrian Satuan Pendidikan Buddha	Layanan	0	1	1	1	1	1	2.994	3.557	3.735	3.921	4.118		
IKRO.4012.QEI.002.1	Jumlah Layanan Legalitas Ijazah	Layanan	0	1	1	1	1	1	1.497	1.778	1.867	1.961	2.059		
IKRO.4012.QEI.002.2	Jumlah satuan pendidikan agama Buddha yang memperoleh pembinaan kelembagaan secara berkala	Lembaga	0	53	53	53	53	53	4.490	5.335	5.602	5.882	6.176		
RO.4012.RAA.001	4012 RAA 001 Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha	Lembaga	220	506	506	506	506	506	14.626	16.528	17.355	18.222	19.133		
IKRO.4012.RAA.001.7	Jumlah satuan Pendidikan Keagamaan buddha yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran (peralatan belajar, laboratorium, ekstrakurikuler dan multimedia)	Lembaga	220	506	506	506	506	506	14.626	16.528	17.355	18.222	19.133		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
025.DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran													Bagian Tata Usaha, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang PAI, Bidang PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu dan Bimas Buddha	
2127 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam													Bidang PAI	
SK.2127.1	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan Islam							4.500	4.559	4.613	4.659	4.706		
IKSK.2127.1.1	Nilai keberagaman siswa keagamaan Islam pada satuan pendidikan umum	Nilai	69	70,5	71,8	73	74	75	1.750	1.773	1.794	1.812	1.830	
IKSK.2127.1.2	Nilai keberagaman mahasiswa keagamaan Islam pada satuan pendidikan tinggi umum	Nilai	69	70,5	71,8	73	74	75	1.000	1.013	1.025	1.035	1.046	
IKSK.2127.1.3	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa keagamaan Islam	Nilai	N/A	71	72,3	73,5	74,5	75,5	1.750	1.773	1.794	1.812	1.830	
RO.2127.SCI.003	2127 SCI 003 Siswa Sekolah Umum yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	1.000	1.000	1.013	1.025	1.035	1.046	2.000	2.026	2.050	2.071	2.092	
IKRO.2127.SCI.003.1	Nilai survey indeks keberagaman siswa keagamaan Islam pada satuan pendidikan umum	Nilai	69	70,5	71,8	73	74	75	0	0	0	0	0	
IKRO.2127.SCI.003.3	Nilai rata-rata penguatan moderasi beragama siswa keagamaan Islam	Nilai	N/A	71	72,3	73,5	74,5	75,5	0	0	0	0	0	
RO.2127.SBA.002	2127 SBA 002 Mahasiswa PTU yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	1.125	250	253	256	259	261	2.500	2.574	2.605	2.631	2.698	
IKRO.2127.SBA.002.2	Nilai survey indeks keberagaman mahasiswa pada PT Umum	Nilai	69	70,5	71,8	73	74	75	0	0	0	0	0	
SK.2127.2	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum pada pendidikan keagamaan Islam													
IKSK.2127.2.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan keagamaan Islam	Persen	N/A	30	60	80	90	100	1.000	1.024	1.040	1.060	1.080	
IKSK.2127.2.2	Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan pada pendidikan keagamaan Islam	Persen	N/A	30	60	80	90	100	1.000	1.024	1.040	1.060	1.080	
RO.2127.PBH.001	2127 PBH 001 Model Kurikulum dan Pembelajaran PAI yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	5	2	3	3	3	4	1.000	1.024	1.040	1.060	1.080	
IKRO.2127.PBH.001.1	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan keagamaan Islam	Kurikulum	N/A	10	12	14	16	18	0	0	0	0	0	
IKRO.2127.PBH.001.1	Jumlah materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada pendidikan keagamaan Islam	Dokumen	N/A	3	5	7	9	11	0	0	0	0	0	
IKRO.2127.PBH.001.2	Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan Islam	Lembaga	N/A	160	208	250	275	302	0	0	0	0	0	
RO.2127.QEI.001	2127 QEI 001 Sekolah yang Menerima Bantuan Sarana Penguatan Pendidikan Agama Islam	Unit	10.643	160	208	250	275	302	3.000	3.060	3.120	3.180	3.252,12	



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
sama dengan 991, saran hapus aja 991	Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan	Lembaga	10.643	15.174	19.726	23.671	26.039	28.642	0	0	0	0	0					
SK.2127.3	Meningkatnya kualitas guru agama pada satuan pendidikan umum								625.527	1.128.610	1.631.694	2.134.778	2.637.863					
IKSK.2127.3.1	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Islam	Persen	47	89	95	100	100	100	625.527	1.128.610	1.631.694	2.134.778	2.637.863					
RO.2127.PDG.001	2127 PDG 001 Guru PAI yang Tersertifikasi	Orang	5.000	5.000	5.300	5.565	5.565	5.565	33.575	34.260	34.945	35.630	36.315,65					
IKRO.2127.PDG.001.1	Jumlah Guru PAI yang Tersertifikasi	Orang		5.000	5.300	5.565	5.565	5.565	0	0	0	0	0					
RO.2127.QEA.001	2127 QEA 001 Tunjangan Profesi Guru PAI Non PNS	Orang	23.487	27.619	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	591.951,96	1.094.350	1.596.749	2.099.148	2.601.547					
IKRO.2127.QEA.001.1	Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Islam	Orang	27.619	27.619	30.619	33.619	36.619	39.619										
SK.2127.4	Meningkatnya kualitas guru agama dan dosen agama								133.200	135.550	137.902	140.252	142.605					
IKSK.2127.4.1	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan PAI berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	32,3	37,3	42,3	47,3	52,3	57,3	131.000	133.296	135.592	137.886	140.181					
IKSK.2127.4.2	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan dosen agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	10,08	13,08	16,08	19,08	22,08	25,08	1.000	1.030	1.061	1.093	1.126					
IKSK.2127.4.3	Persentase guru agama, dosen agama, dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	20	30	40	60	80	100	1.200	1.224	1.249	1.273	1.299					
RO.2127.SCI.004	2127 SCI 004 Guru dan Pengawas PAI yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	200	200	220	264	317	380	200	204	208	212	216,808					
IKRO.2127.SCI.004.3	Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Orang	200	250	300	350	400	450	0	0	0	0	0					
RO.2127.SBA.003	2127 SBA 003 Dosen PAI yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	1.000	400	412	424	437	450	1.000	1.020	1.041	1.061	1.082,04					
IKRO.2127.SBA.003.2	Jumlah dosen agama yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Orang	400	450	500	550	600	650	0	0	0	0	0					
RO.2127.QEA.002	2127 QEA 002 Insentif Guru PAI Non PNS	Orang	22.120	32.765	34.403	36.123	37.930	39.826	132.000	134.326	136.653	138.979	141.306,45					
IKRO.2127.QEA.002.1	Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan tenaga kependidikan PAI berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Orang	44.000	44.000	50.000	56.000	62.000	68.000	0	0	0	0	0					
IKRO.2127.QEA.002.1	Jumlah Guru PAI Non PNS yang memperoleh insentif	Orang	1.425	1.849	2.274	2.698	3.122	3.546	0	0	0	0	0					
SK.2127.5	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada sekolah umum								20.983	37.411	53.848	70.291	86.743					
IKSK.2127.5.1	Persentase guru agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil pada pendidikan keagamaan Islam	Persen	N/A	60	62,5	65	67,5	70	18.800	32.764	46.736	60.714	74.701					
IKSK.2127.5.2	Persentase pengawas agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil pada pendidikan keagamaan Islam	Persen	N/A	45	47,5	50	52,5	55	1.000	2.755	4.510	6.265	8.021					
IKSK.2127.5.3	Persentase guru agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan Islam	Persen	N/A	0,08	0,09	0,1	0,11	0,12	886,97	1.419	1.952	2.484	3.016					
IKSK.2127.5.4	Persentase pengawas agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan Islam	Persen	N/A	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	295,66	473	651	828	1.005					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO.2127.QDC.002	2127 QDC 002 Guru yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Ujian PAI	Orang	2.457	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208		
IKRO.2127.QDC.001	Jumlah guru agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Orang	N/A	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	0	0	0	0	0		
RO.2127.QDC.002	2127 QEI 002 Lembaga Profesi/Mitra yang Mendapatkan Bantuan Pemberdayaan Kualitas Guru PAI	Lembaga	880	300	308	315	323	331	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519		
sama dengan 1017, saran hapus aja 1019	Jumlah guru agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Orang	N/A	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000	0	0	0	0	0		
IKRO.2127.QDC.002.2	Jumlah pengawas agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Orang	N/A	675	713	750	788	825	0	0	0	0	0		
RO.2127.SCI.001	2127 SCI 001 Guru PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	1.012	35	36	37	38	39	7.800	21.489	35.179	48.868	62.558,88		
IKRO.2127.SCI.001.3	Jumlah Guru PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	N/A	41.041	42.041	43.041	44.041	45.041	0	0	0	0	0		
RO.2127.QAA.001	2127 QAA 001 Pendidik dan Tenaga kependidikan PAI yang mendapat Pembinaan Karir	Orang	400	400	500	600	700	800	1.182,62	1.892	2.602	3.312	4.021,48		
IKRO.2127.QAA.001.3	Jumlah guru agama yang meningkat jenjang karir	Orang	N/A	400	500	600	700	800	0	0	0	0	0		
RO.2127.QDC.003	2127 QDC 003 Guru yang mendapatkan Pemberdayaan Kualitas Guru PAI	Orang	200	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415		
IKRO.2127.QDC.003.3	Jumlah Guru yang mendapatkan Pemberdayaan Kualitas Guru PAI	Orang	N/A	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	0	0	0	0	0		
RO.2127.SCI.002	2127 SCI 002 Pengawas PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	491	200	205	210	215	221	1.000	2.755	4.510	6.265	8.020,63		
IKRO.2127.QDC.003.4	Jumlah Pengawas PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	N/A	490	590	690	790	890	0	0	0	0	0		
2133 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah									14.314.157	22.525.389	30.736.695	38.948.064	47.159.465	Bidang Pendidikan Madrasah	
SK.1.2133	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah								7.157.079	11.262.720	15.368.375	19.474.060	23.579.762,20		
IKSK.1.2133.1	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	01:13	01:13	01:13	01:14	01:14	01:15	7.148.119	11.253.329	15.358.577	19.463.839	23.569.105,66		
IKSK.1.2133.2	Persentase tenaga kependidikan madrasah lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	30,58	31,45	32,45	33,95	35,95	38,45	560	641	687	736	785		
IKSK.1.2133.3	Persentase guru madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	40,63	41,63	46	51	56	61	3.719	3.919	4.115	4.321	4.537		
IKSK.1.2133.4	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	79,68	82	83	86	89	92	595	619	650	682	716		
IKSK.1.2133.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan Madrasah yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	49,17	51,17	53,17	55,17	57,17	59,17	1.000	1.020	1.041	1.061	1.082		
IKSK.1.2133.6	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	Persen	86	87	89	92	95	98	645	670	704	739	776		
IKSK.1.2133.7	Persentase guru madrasah yang meningkat jenjang karir	Persen	0,07	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	2.076	2.144	2.212	2.281	2.347		
IKSK.1.2133.8	Persentase Pengawas Madrasah yang meningkat jenjang karir	Persen	0,67	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	366	378	390	402	414		
RO.2133.QEA.004	2133 QEA 004 Guru Non-PNS Penerima Insentif	Orang	217.780	607.780	654.518	701.251	751.320	801.433	731.007	745.922	760.838	775.753	790.669,79		
IKRO.2133.QEA.004.1	Jumlah Guru Non-PNS Penerima Insentif	Orang	217.780	607.780	654.518	701.251	751.320	801.433	0	0	0	0	0		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
RO.2133.QEA.005	2133 QEA 005 Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Profesi	Orang	422.781	195.551	211.005	226.071	242.212	258.368	6.222.467,25	10.293.762	14.365.058	18.436.353	22.507.648,00					
IKRO.2133.QEA.005.1	Jumlah Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi	Orang	422.781	195.551	211.005	226.071	242.212	258.368	0	0	0	0	0					
RO.2133.QEA.006	2133 QEA 006 Guru Non-PNS dan Tendik penerima Tunjangan Khusus	Orang	9.043	9.043	9.043	9.689	10.380	11.073	126.442,31	129.022	131.602	134.182	136.762,57					
IKRO.2133.QEA.006.4	Jumlah Guru Non-PNS dan Tendik penerima Tunjangan Khusus	Orang	9.043	9.043	9.043	9.689	10.380	11.073	0	0	0	0	0					
RO.2133.PDG.001	2133 PDG 001 Guru Madrasah yang Tersertifikasi	Orang	9.000	9.101	9.801	10.501	11.250	12.001	57.362,16	73.434	89.505	105.577	121.649,79					
IKRO.2133.PDG.001.1	Jumlah Guru Madrasah yang Tersertifikasi	Orang	9.000	9.101	9.801	10.501	11.250	12.001	0	0	0	0	0					
RO.2133.QEI.001	2133 QEI 001 Lembaga Profesi/Mitra yang mendapatkan bantuan pemberdayaan kualitas Guru	Lembaga	703	550	592	635	680	725	7.900	8.061	8.222	8.383	8.544,92					
IKRO.2133.QEI.001.6	Jumlah Lembaga Profesi/Mitra yang mendapatkan bantuan pemberdayaan kualitas Guru	Lembaga	703	550	592	635	680	725	0	0	0	0	0					
RO.2133.SCI.001	2133 SCI 001 Guru Madrasah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	3.271	3.700	3.848	4.040	4.242	4.455	4.958,02	5.156	5.414	5.685	5.969					
IKRO.2133.SCI.001.3	Jumlah Guru Madrasah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	N/A	2.725	2.752	2.807	2.892	3.007	0	0	0	0	0					
RO.2133.QDC.001	2133 QDC 001 Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan RA Berprestasi	Orang	2.220	100	108	115	124	132	3.500	3.769	4.038	4.327	4.615					
IKRO.2133.QDC.001.1	Jumlah guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Orang	N/A	75	76	77	78	79	0	0	0	0	0					
IKRO.2133.QDC.001.2	Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi	Orang	N/A	25	26	27	28	29	0	0	0	0	0					
RO.2133.QAA.001	2133 QAA 001 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah yg mendapat Pembinaan Karir	Orang	2.000	1.300	1.303	1.305	1.308	1.310	2.441,98	2.522	2.602	2.683	2.761,12					
IKRO.2133.QAA.001.7	Jumlah guru madrasah yang meningkat jenjang karir	Orang	104	1.300	1.303	1.305	1.308	1.310	0	0	0	0	0					
IKRO.2133.QAA.001.8	Jumlah pengawas madrasah yang meningkat jenjang karir	Orang	21	260	261	261	262	262	0	0	0	0	0					
RO.2133.SCI.003	2133 SCI 003 Guru dan Pengawas Madrasah yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	500	500	510	520	531	541	1.000	1.020	1.041	1.061	1.082,03					
IKRO.2133.SCI.003.5	Jumlah Guru dan Pengawas Madrasah yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	N/A	500	505	515	531	552	0	0	0	0	0					
4422 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah									52.527	54.402	56.322	58.283	60.284	Bidang Pendidikan Madrasah				
SK.4422.1	Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan								19.200	20.475	21.793	23.156	24.555					
IKSK.4422.1.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk:																	
	a literasi membaca	Persen	90,23	90,25	90,38	90,5	90,63	90,75	588	594	606	624	649					
	b numerasi	Persen	93,69	93,82	93,94	94,07	94,19	94,32	612	618	630	649	675					
IKSK.4422.1.2	Nilai keberagamaan siswa pada madrasah	Nilai	50,4	50,94	51,48	52,02	52,56	53,1	500	500	500	500	500					
IKSK.4422.1.3	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada madrasah	Nilai	N/A	5	10	15	20	25	500	750	1.000	1.250	1.500					
IKSK.4422.1.4	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas pada madrasah	Persen	90	92	94	96	98	99	1.030	1.052	1.074	1.096	1.107					
IKSK.4422.1.5	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pada madrasah	Persen	80,68	82,68	84,68	86,68	88,68	90,68	970	993	1.016	1.039	1.062					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKSK.4422.1.6	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada satuan madrasah	Jumlah	N/A	52.456	52.849	53.378	54.045	54.856	12.373	12.465	12.589	12.744	12.932					
IKSK.4422.1.7	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	N/A	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2.627	3.503	4.378	5.254	6.130					
RO.4422.QDB.001	4422 QDB 001 Madrasah yang dibina dalam Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran	Lembaga	1	5.600	5.656	5.712	5.766	5.822	7.576	7.652	7.728	7.801	7.877					
IKRO.4422.QDB.001.1	Jumlah rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk:	Nilai	90,23	90,25	90,38	90,5	90,63	90,75	0	0	0	0	0					
	a literasi membaca		93,69	93,82	93,94	94,07	94,19	94,32										
	b numerasi																	
IKRO.4422.QDB.001.4	Jumlah satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas pada madrasah	Lembaga	78.818	80.570	82.321	84.073	85.824	86.700	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.QDB.001.5	Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pada madrasah	Lembaga	70.656	72.408	74.159	75.911	77.662	70.849	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.QDB.001.6	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada madrasah	Orang	N/A	52.456	52.849	53.378	54.045	54.856	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.QDB.001.7	Jumlah nilai rata-rata karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) pada madrasah	Nilai	N/A	80	80,5	81	81,5	82	0	0	0	0	0					
RO.4422.SCI.001	4422 SCI 001 Siswa Madrasah mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	500	1500	1560	1622	1687	1755	4.000	4.082	4.163	4.245	4.326,16					
IKRO.4422.SCI.001.3	Jumlah rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada madrasah	Nilai	N/A	5	10	15	20	25	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.SCI.001.2	Jumlah rata-rata Nilai keberagaman siswa pada madrasah	Nilai	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	0	0	0	0	0					
SK.4422.2	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum																	
IKSK.4422.2.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada madrasah	Persen	N/A	92	94	96	98	99	3.000	3.064	3.128	3.191	3.224					
IKSK.4422.2.2	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada madrasah	Persen	N/A	0,5	0,75	1	1,25	1,5	3.705	4.940	6.175	7.410	8.645					
RO.4422.PBH.001	4422.PBH.001 Model Pembelajaran Madrasah yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	4	5	6	7	8	9	6.555,29	6.689	6.823	6.956	7.090,70					
IKRO.4422.PBH.001.1	Jumlah Model Pembelajaran Madrasah yang Dikembangkan	Model	8	8	9	10	11	12	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.PBH.001.2	Jumlah Materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Dokumen	6	94	100	105	110	115	0	0	0	0	0					
SK.4422.3	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu																	
IKSK.4422.3.1	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B	Persen	44	47,2	50,4	53,6	56,8	60,1	544	579	613	648	683					
IKSK.4422.3.2	Persentase MI yang terakreditasi minimal B	Persen	77,7	80,3	82,9	85,5	88,1	90,7	500	516	531	547	563					
IKSK.4422.3.3	Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	Persen	70,9	74	77,1	80,2	83,3	86,4	500	520	540	560	580					
IKSK.4422.3.4	Persentase MA yang terakreditasi minimal B	Persen	66	68,9	71,9	74,8	77,8	80,8	682	710	738	766	795					
IKSK.4422.3.5	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada madrasah	Persen	0,91	0,98	1,04	1,06	1,08	1,11	8.453	8.940	9.109	9.278	9.528					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKSK.4422.3.6	Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	0,57	1	1	2	2	2	5.750	5.750	8.625	8.625	8.625					
IKSK.4422.3.7	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional pada madrasah	Persen	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	1.725	2.156	2.588	3.019	3.450					
IKSK.4422.3.8	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	62,8	65,8	66,9	68	69,2	70,3	2.600	2.643	2.686	2.732	2.775					
IKSK.4422.3.9	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	Persen	14,07	15,07	16,07	17,07	18,07	19,07	656	696	737	778	819					
IKSK.4422.3.10	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	Persen	N/A	7	8	9	10	11	305	343	381	419	457					
IKSK.4422.3.11	Persentase lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mendapatkan pekerjaan / bekerja dalam waktu kurang dari 1 tahun	Persen	N/A	25	25	25	25	25	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088					
RO.4422.QIC.001	4422 QIC 001 Madrasah yang mendapat Supervisi Pembelajaran	Lembaga	181	190	191	192	193	194	195,186	199	203	207	211,571					
IKRO.4422.QIC.001.1	Jumlah PAUD/RA yang terakreditasi minimal B	Lembaga	13.720	14.720	15.720	16.720	17.720	18.720	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.QIC.001.2	Jumlah MI yang terakreditasi minimal B	Lembaga	20.811	21.511	22.211	22.911	23.611	24.311	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.QIC.001.3	Jumlah MTs yang terakreditasi minimal B	Lembaga	13.787	14.387	14.987	15.587	16.187	16.787	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.QIC.001.4	Jumlah MA yang terakreditasi minimal B	Lembaga	6.695	6.995	7.295	7.595	7.895	8.195	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.QIC.001.5	Jumlah satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada madrasah	Lembaga	797	858	911	928	946	972	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.QIC.001.6	Jumlah RA yang menerapkan program Holistik-Integratif	Lembaga	426	6.426	12.426	18.426	24.426	30.426	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.QIC.001.7	Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Lembaga	447	876	1.752	2.627	3.503	4.379	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.QIC.001.8	Jumlah MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	Lembaga	76	80	90	100	110	120	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.QIC.001.9	Jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	Lembaga	N/A	186	199	212	224	237	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.QIC.001.10	Jumlah lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mendapatkan pekerjaan /bekerja dalam waktu kurang dari 1 tahun	Orang	N/A	16	17	18	19	20	0	0	0	0	0					
RO.4422.QDC.001	4422 QDC 001 Siswa Madrasah Berprestasi	Orang	1.900	2.000	2.115	2.155	2.195	2.255	15.000	15.306	15.612	15.918	16.224,60					
IKRO.4422.QDC.001.6	Jumlah Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual	Lembaga	499	876	876	1.752	1.752	1.752	0	0	0	0	0					
IKRO.4422.QDC.001.7	Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional pada madrasah	Orang	20.982	31.474	41.965	52.456	62.947	73.439	0	0	0	0	0					
4433 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam									#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Bidang PD Pontren				
SK.4433.1	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren								3.000	3.681	3.974	4.167	4.460					
IKSK.4433.1.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam untuk:																	
	a literasi membaca	Nilai	N/A	62,8	65,7	68,6	71,5	74,4	820	894	933	973	1.012					
	b numerasi	Nilai	N/A	66,8	69,7	72,6	75,5	78,4	1.180	1.287	1.341	1.394	1.448					
IKSK.4433.1.2	Persentase santri yang mengikuti Imtihan Wathani (IW)	Persen	32	46,82	61,82	76,82	81	92	0	0	0	0	0					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKSK.4433.1.3	Nilai keberagaman santri pada satuan pendidikan pesantren	Nilai	N/A	77	80,85	84,89	89,14	93,59	500	750	850	900	1.000					
IKSK.4433.1.4	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama santri	Nilai	N/A	78	81,9	86	90,29	94,81	500	750	850	900	1.000					
RO.4433.QDB.001	4433 QDB 001 Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Lembaga	1	1.000	1.042	1.083	1.125	1.166	2.000	2.041	2.082	2.122	2.163,08					
IKRO.4433.QDB.001.1	Jumlah santri satuan pendidikan keagamaan Islam dan pesantren yang memperoleh nilai literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi tingkat nasional dengan kategori baik	Orang	N/A	273.068	300.596	330.656	363.563	399.951	667	728	794	866	944					
IKRO.4433.QDB.001.2	Jumlah santri yang mengikuti Imlithan Wathani (IW)	Orang	N/A	15.500	17.500	19.500	22.500	24.500	0	0	0	0	0					
IKRO.4433.QDB.001.3	Jumlah santri satuan pendidikan keagamaan Islam dan pesantren yang difasilitasi dalam survei indeks keberagamaan	Orang	N/A	2.224.414	2.281.369	2.338.324	2.395.279	2.452.234	667	683	700	717	733					
IKRO.4433.QDB.001.4	Jumlah santri satuan pendidikan keagamaan Islam dan pesantren yang memperoleh penguatan moderasi beragama	Orang	N/A	506.268	537.909	569.551	601.193	632.835	666	705	744	784	823					
SK.4433.2	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum								750	1.167	1.583	1.900	2.167					
IKSK.4433.2.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam	Persen	N/A	0,5	0,75	1	1,25	1,5	250	333	417	500	583					
IKSK.4433.2.2	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam	Persen	N/A	0,5	0,75	1	1,25	1,5	250	333	417	500	583					
IKSK.4433.2.3	Persentase peningkatan jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan	Persen	1,29	1,39	1,49	1,59	1,69	1,79	250	500	750	900	1.000					
RO.4433.PBH.001	4433 PBH 001 Model Pembelajaran Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dikembangkan	Kajian	5	5	5	5	6	6	1.000	1.020	1.041	1.061	1.082,04					
IKRO.4433.PBH.001.2	Jumlah materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam	Dokumen	N/A	276	290	304	320	335	5.959	6.243	6.540	6.852	7.178					
IKRO.4433.PBH.001.1	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam	Dokumen	N/A	28	42	56	70	84	596	798	1001	1201	1401					
IKRO.4433.PBH.001.3	Jumlah peningkatan jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan	Kajian	56	60	64	68	72	76										
SK.4433.3	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu								184.800	230.095	275.684	321.691	367.455					
IKSK.4433.3.1	Persentase PAUDQU yang terakreditasi minimal B	Persen	N/A	4,91	5,2	5,45	5,75	6	200	500	750	900	1.000					
IKSK.4433.3.2	Persentase Satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	Persen	N/A	10	15	20	25	30	20.000	26.667	33.333	40.000	46.667					
IKSK.4433.3.3	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam	Persen	N/A	0,23	0,26	0,27	0,28	0,29	14.000	15.615	16.194	16.772	17.350					
IKSK.4433.3.4	Persentase santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	20	21	23	24	26	28	6.000	6.522	6.793	7.316	7.839					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKSK.4433.3.5	Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	Persen	N/A	30	40	50	60	70	118.100	147.625	177.150	206.675	236.200					
IKSK.4433.3.6	Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	Persen	N/A	10	15	20	25	30	24.500	32.667	40.833	49.000	57.167					
IKSK.4433.3.7	Persentase satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	8	12	17	23	30	38	2.000	500	630	778	941					
IKSK.4433.3.8	Persentase peningkatan jumlah lulusan pesantren Internasional	Persen	N/A	0	0	0	0,25	0,3	0	0	0	250	292					
RO.4433.QEI.002	4433.QEI.002 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren	Lembaga	1	1	1	1	2	2	20.000	25.500	31.000	36.500	42.000					
IKRO.4433.QEI.002.1	Jumlah PAUDQU yang memperoleh hasil asesmen minimal B	Lembaga	N/A	170	180	189	199	208	0	0	0	0	0					
IKRO.4433.QEI.002.3	Jumlah satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam	Lembaga	N/A	791	895	929	963	998	0	0	0	0	0					
IKRO.4433.QEI.002.4	Jumlah santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Orang	N/A	624.604	684.091	713.834	773.320	832.806	0	0	0	0	0					
IKRO.4433.QEI.002.5	Jumlah satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	Lembaga	N/A	12.683	16.911	21.139	25.367	29.595	0	0	0	0	0					
IKRO.4433.QEI.002.6	Jumlah satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	N/A	4.228	6.342	8.456	10.570	12.683	0	0	0	0	0					
IKRO.4433.QEI.002.7	Jumlah satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	Lembaga	N/A	5.073	7.187	9.724	12.683	16.066	0	0	0	0	0					
IKRO.4433.QEI.002.8	Jumlah peningkatan lulusan pesantren Internasional	Lembaga	N/A	0	0	0	864	864	0	0	0	750.000.000	750.000.000					
RO.4433.PDG.003	4433.PDG.003 Ustadz yang Tersertifikasi	Orang	1.100	1.100	1.424	1.795	2.214	2.680	2.000	10.000	18.000	26.000	34.000					
IKRO.4433.PDG.003.2	Jumlah Ustadz yang Tersertifikasi	Orang	1.100	1.100	1.424	1.795	2.214	2.680										
RO.4433.QEA.001	4433.QEA.001 Ustadz pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Insentif	Orang	20.000	35.700	43.814	52.879	62.883	73.819	107.100	109.285	111.470	113.656	115.841,70					
IKRO.4433.QEA.001.2	Jumlah Ustadz pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Insentif	Orang	20.000	35.700	43.814	52.879	62.883	73.819	0	0	0	0	0					
RO.4433.QEA.002	4433.QEA.002 Guru pada Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah Penerima TPG	Orang	500	500	614	741	881	1034	9.000	115.800	222.600	329.400	436.200					
IKRO.4433.QEA.002.2	Jumlah Guru pada Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah Penerima TPG	Orang	500	500	614	741	881	1034	0	0	0	0	0					
RO.4433.SCI.001	4433.SCI.001 Ustadz yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	200	200	245	296	352	414	2.000	5.510	9.020	12.530	16.041,25					
IKRO.4433.SCI.001.2	Jumlah Ustadz yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	200	200	245	296	352	414	0	0	0	0	0					
SK.4433.4	Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan																	
IKSK.4433.4.1	Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam	Persen	75	77	79	80	85	90	7.500	7.690	7.786	8.244	8.702					
RO.4433.QEI.001	4433.QEI.001 Jumlah Lembaga Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas	Lembaga	35	35	36	36	38	41	3.500	3.571	3.643	3.714	3.786,14					
IKRO.4433.QEI.001.1	Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi	Lembaga	35	35	36	37	38	39	0	0	0	0	0					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
4434 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Kristen													79.588	263.120	280.857	313.970	349.119	Bimas Kristen
SK.4434.1	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan																	
IKSK.4434.1.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:																	
	a literasi membaca	Nilai	44,24	44,46	44,68	44,91	45,13	45,36	0	0	0	0	0					
	b numerasi	Nilai	43,75	43,97	44,19	44,41	44,63	44,85	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.2	Nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan Kristen	Nilai	82	85	86	87	88	89	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.3	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada satuan pendidikan Kristen	Nilai	82	85	86	87	88	89	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.4	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	83,93	84,93	85,93	86,93	87,93	88,93	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.5	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	100	95	96	97	98	99	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.6	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Prestasi	49	67	70	75	80	85	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.7	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	82	85	86	87	88	89	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.8	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	82,79	83,49	84,42	85,12	86,05	86,98	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.9	Persentase SDTK Kristen yang terakreditasi minimal B	Persen	43,42	43,42	59,21	76,32	82,89	92,11	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.10	Persentase SMPTK Kristen yang terakreditasi minimal B	Persen	30,6	30,6	41,79	58,96	69,4	79,1	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.11	Persentase SMTK/SMAK Kristen yang terakreditasi minimal B	Persen	27,27	27,27	37,27	42,73	50,91	59,09	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.12	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	1,86	1,86	2,09	2,33	2,79	3,09	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.13	Persentase satuan pendidikan Kristen yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	0,47	0,7	1,63	2,79	3,49	4,65	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.14	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,25	1,81	1,86	1,91	1,96	2,07	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.15	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	41,63	41,63	43,26	44,88	46,98	50	0	0	0	0	0					
IKSK.4434.1.16	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	49,68	52,9	58,2	62,85	66,54	71,96	0	0	0	0	0					
RO	4434.PEF.001 - Sosialisasi/Pendampingan Pemahaman Moderasi Beragama dan Pendidikan Karakter pada Siswa Sekolah Keagamaan Kristen		3500	3500	3500	3500	3500	3500	1.986,88	2.617,50	3.952,19	5.426,25	6.240,19					
IKRO	Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Lembaga	430	430	430	430	430	430	0	0	0	0	0					
RO	4434.QDB.001 Pembinaan Kualitas Manajemen Tata Kelola Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen		100	130	135	140	145	150	4.522,43	5.040,00	6.300,00	7.560,00	8.694,00					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE			TARGET			KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.1	Jumlah SDTK yang Terakreditasi Minimal B	Lembaga	33	33	45	58	63	70	0	0	0	0	0	
IKRO.2	Jumlah SMPTK yang Terakreditasi Minimal B	Lembaga	41	41	56	79	93	106	0	0	0	0	0	
IKRO.3	Jumlah SMTK/SMAK yang Terakreditasi Minimal B	Lembaga	60	60	82	94	112	130	0	0	0	0	0	
IKRO.4	Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Unggul yang terselenggara	Lembaga	8	8	9	10	11	12	0	0	0	0	0	
IKRO.5	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan program pendidikan bilingual	Lembaga	2	3	7	10	12	15	0	0	0	0	0	
IKRO.6	Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Orang	8	8	12	14	16	20	0	0	0	0	0	
IKRO.7	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Kristen dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Lembaga	180	180	186	193	202	215	0	0	0	0	0	
IKRO.8	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Ditingkatkan Mutunya	Lembaga	100	130	135	140	145	150	0	0	0	0	0	
RO	4434.PBH.001 Rekomendasi Kebijakan Terhadap Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen			80	80	80	80	80	3.299,96	7.500,00	9.375,00	11.250,00	12.937,50	
IKRO.1	Jumlah rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:													
	a literasi membaca	Nilai	44,24	44,46	44,68	44,91	45,13	45,36	0	0	0	0	0	
	b numerasi	Nilai	43,75	43,97	44,19	44,41	44,63	44,85	0	0	0	0	0	
IKRO.2	Nilai keberagaman siswa pada satuan pendidikan keagamaan Kristen	Nilai	82	85	86	87	88	89	0	0	0	0	0	
IKRO.3	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada satuan pendidikan Kristen	Nilai	82	85	86	87	88	89	0	0	0	0	0	
IKRO.4	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Lembaga	360	365	370	373	378	382	0	0	0	0	0	
IKRO.5	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Prestasi	N/A	67	70	75	80	85	0	0	0	0	0	
IKRO.6	Jumlah nilai rata-rata karakter siswa satuan pendidikan keagamaan Kristen melalui kegiatan kepramukaan	Nilai	N/A	85	86	87	88	89	0	0	0	0	0	
IKRO.7	Jumlah perangkat kurikulum satuan pendidikan keagamaan Kristen yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Modul	N/A	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	
IKRO.8	Jumlah Materi/Bahan Ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Modul	N/A	10	20	30	40	50	0	0	0	0	0	
SK.4434.2	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan Kristen								0	0	0	0	0	
IKSK.4434.2.1	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	N/A	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	0	0	0	0	0	
IKSK.4434.2.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	N/A	35	40	55	60	70	0	0	0	0	0	
IKSK.4434.2.3	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	N/A	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	
IKSK.4434.2.4	Persentase Kepala satuan pendidikan Kristen yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	N/A	0	0	0,1	0,2	0,8	0	0	0	0	0	
IKSK.4434.2.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi	Persen	N/A	10	10,5	11,03	11,58	12,16	0	0	0	0	0	



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
	perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan																	
IKSK.4435.1.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional Siswa Katolik untuk:																	
	a literasi membaca	Nilai	59,72	60	62	65	68	70	0	0	0	0	0					
	b numerasi	Nilai	50,6	51	53	55	58	60	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.2	Nilai keberagaman siswa pada satuan pendidikan Katolik	Nilai	N/A	65	70	80	90	95	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.3	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa Katolik	Nilai	N/A	80	80	82	85	87	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.4	Persentase satuan pendidikan Keagamaan Katolik yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	N/A	30	50	70	90	91	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.5	Persentase satuan pendidikan Keagamaan Katolik yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	N/A	90,74	90,74	92,59	96,3	97,3	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.6	Jumlah prestasi Siswa Katolik yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Penghargaan	N/A	0	5	7	8	10	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.7	Persentase peningkatan nilai karakter siswa Katolik melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	N/A	2	5	10	15	20	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.8	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Keagamaan Katolik berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	N/A	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.9	Persentase Taman Seminari yang terakreditasi minimal B	Persen	16,18	41,18	50	58,82	72,06	80,88	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.10	Persentase SD Katolik yang terakreditasi minimal B	Persen	N/A	0	0	0	0	14,29	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.11	Persentase SMP Katolik yang terakreditasi minimal B	Persen	N/A	0	0	0	0	14,29	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.12	Persentase SMA Katolik yang terakreditasi minimal B	Persen	N/A	73,47	77,55	83,67	85,71	88	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.13	Persentase satuan pendidikan Keagamaan Katolik unggul yang terselenggara	Persen	N/A	2,04	6,12	10	13,46	16,67	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.14	Persentase satuan pendidikan Katolik yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	N/A	0	2,04	2,04	2,04	2,04	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.15	Persentase siswa Katolik yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	N/A	0,15	0,46	0,77	1,23	1,54	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.16	Persentase satuan pendidikan Katolik dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	N/A	18,37	36,73	55,1	73,47	91,84	0	0	0	0	0					
IKSK.4435.1.17	Persentase materi ajar digital Keagamaan Katolik (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	N/A	11,76	23,53	47,06	70,59	88,24	0	0	0	0	0					
RO 1	4435.PBH.001 - Kebijakan Kurikulum Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Dasar dan Menengah	Rekomendasi Kebijakan	N/A	0	2	2	2	2	0	1.000.000	1.150.000	1.322.500	1.520.875					
IKRO 1	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Keagamaan Katolik berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Kurikulum	N/A	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0					
RO 2	4435.PDE.001 - Akreditasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik	Lembaga	N/A	3	3	3	3	3	150.000	300.000	324.236	500.000	700.000					
IKRO 1	Jumlah SMAK Katolik yang terakreditasi minimal B	Lembaga	N/A	0	2	6	6	14	0	0	0	0	0					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKRO 2	Jumlah SMP Katolik yang terakreditasi minimal B	Lembaga	N/A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
IKRO 3	Jumlah SD Katolik yang terakreditasi minimal B	Lembaga	N/A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
IKRO 4	Jumlah Taman Seminari Katolik yang terakreditasi minimal B	Lembaga	N/A	3	6	6	6	6	0	0	0	0	0		
IKRO 5	Jumlah satuan pendidikan Katolik unggul yang terselenggara	Lembaga	N/A	4	5	6	8	10	0	0	0	0	0		
IKRO 6	Jumlah satuan pendidikan Katolik yang menerapkan program pendidikan bilingual	Lembaga	N/A	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0		
IKRO 7	Jumlah satuan pendidikan Katolik dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Lembaga	N/A	1	2	3	4	5	0	0	0	0	0		
IKRO 8	Jumlah siswa Katolik yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Orang	N/A	10	30	50	80	100	0	0	0	0	0		
RO 3	4435.PEF.001 - Sosialisasi dan Diseminasi Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan pada Siswa Katolik	Orang	N/A	0	5,000,00	5,750,00	6,613,00	7,604,00	0	5.000.000	5.750.000	6.612.500	7.604.375		
IKRO 1	Jumlah satuan pendidikan katolik yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Lembaga	N/A	0	49	50	52	54	0	0	0	0	0		
RO 4	4435.PEF.002 - Siswa SMAKN Katolik yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	Orang	N/A	892	892	892	892	892	5.390.650	1.182.660	1.360.059	1.564.068	1.798.678		
IKRO 1	Jumlah Siswa SMAKN Katolik yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	Orang	N/A	892	892	892	892	892	0	0	0	0	0		
RO 5	4435.PEF.003 - Pembinaan Siswa melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Katolik	Orang	N/A	0	6,250,00	7,000,00	7,250,00	7,500,00	0	5.000.000	5.600.000	5.800.000	6.000.000		
IKRO 1	Jumlah nilai rata-rata karakter siswa Katolik melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Nilai	N/A	0	80	80,5	81	81,5	0	0	0	0	0		
IKRO 2	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada satuan pendidikan katolik yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	N/A	49	49	50	52	54	0	0	0	0	0		
IKRO 3	Jumlah gugus depan pramuka pada satuan pendidikan katolik yang dibina	Lembaga	N/A	49	49	50	52	54	0	0	0	0	0		
RO 6	4435.PEF.004 - Pembinaan Kompetensi Siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik	Orang	N/A	0	3	5	7	10	0	1.000.000	1.150.000	1.322.500	1.520.875		
IKRO 1	Jumlah lulusan satuan pendidikan Katolik yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh Lembaga Pemerintah, Pendidikan Umum, atau Lembaga Profesi	Orang	N/A	0	3	5	7	10	0	0	0	0	0		
RO 7	4435.QEI.006 - SMAK Katolik yang mendapat Bantuan pendidikan karakter dan kewarganegaraan	Lembaga	N/A	37	0	0	0	0	4.510.612	0	0	0	0		
IKRO 1	Jumlah satuan pendidikan Keagamaan Katolik yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Lembaga	N/A	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RO 8	4435.QEI.007 - Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang Ditingkatkan Mutunya	Lembaga	N/A	12	12	12	12	12	210.000	241.500	277.728	319.384	367.296		
IKRO 1	Jumlah rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional Siswa Katolik untuk: a literasi membaca b numerasi	Nilai	N/A	55,5	57,5	60	63	62	0	0	0	0	0		
IKRO 2	Nilai keberagaman siswa Katolik	Nilai	N/A	65	70	80	90	95	0	0	0	0	0		
IKRO 3	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa Katolik	Nilai	N/A	80	80	82	85	87	0	0	0	0	0		
IKRO 4	Jumlah satuan pendidikan Keagamaan Katolik yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Lembaga	N/A	0	44	70	71	72	0	0	0	0	0		
IKRO 5	Jumlah prestasi Siswa Katolik yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Prestasi	N/A	0	5	7	8	10	0	0	0	0	0		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
RO 15	4435.SCI.001 - Pendidik dan Tenaga kependidikan Katolik yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	N/A	16,960,00	16,960,00	16,960,00	16,960,00	16,960,00	16,960,00	16.250.353	11.262.814	14.220.111	18.044.624	21.593.766				
IKRO 1	Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan Katolik yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	N/A	4,714,00	4,220,00	4,852,00	5,580,00	6,417,00	0	0	0	0	0	0				
IKRO 2	Jumlah guru Agama Katolik yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Orang	N/A	0	0	300	316	332	0	0	0	0	0	0				
IKRO 3	Jumlah pengawas Agama Katolik yang memperoleh nilai rapor AKP minimal predikat terampil	Orang	N/A	0	0	73	73	74	0	0	0	0	0	0				
4436 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu															Bimas Hindu			
SK.4436.1	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan																	
IKSK.4436.1.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional Pendidikan Hindu untuk:																	
	a literasi membaca	Nilai	66,32	67	67,5	68	68,5	69	0	0	0	0	0	0				
	b numerasi	Nilai	58,87	59	59,5	59,6	59,7	59,8	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.2	Nilai keberagaman siswa pada pada satuan pendidikan Hindu	Nilai	N/A	67	67,25	67,5	67,75	68	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.3	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa Pendidikan Hindu	Nilai	N/A	70	72	74	76	78	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.4	Persentase satuan pendidikan Hindu yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	N/A	1,6	4,8	8	10,4	12	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.5	Persentase satuan pendidikan Hindu yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	100	99	99	99	99	99	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.6	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Hindu	Jumlah	N/A	1	2	3	4	5	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.7	Persentase peningkatan nilai karakter siswa Pendidikan Hindu melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	N/A	0,3	0,5	0,75	0,85	0,95	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.8	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Hindu berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	N/A	40	55	65	70	85	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.9	Persentase Pratama Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Persen	62,5	64,58	66	67,62	68,18	70,43	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.10	Persentase Adhi Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Persen	53,85	56,25	58,82	61,11	63,16	65	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.11	Persentase Madyama Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Persen	50	50	55,56	60	63,64	66,67	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.12	Persentase Utama Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Persen	80	80	83	83	86	88	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.13	Persentase satuan pendidikan Hindu unggul yang terselenggara	Persen	8,77	9,6	10,77	11,33	11,76	12,5	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.14	Persentase satuan pendidikan Hindu yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	N/A	1,6	2,31	2,67	2,94	3	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.15	Persentase siswa Pendidikan Hindu yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,08	0,13	0,17	0,21	0,25	0,3	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.1.16	Persentase satuan pendidikan Hindu dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	N/A	0	43,4	45,9	50,9	55,9	0	0	0	0	0	0				



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKSK.4436.1.17	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Hindu	Persen	N/A	25	50	75	80	100	0	0	0	0	0					
RO.4436.PBH.001	4436 PBH 001 kurikulum dan Bahan ajar yang dikembangkan Pendidikan Hindu	Rekomendasi Kebijakan	12	12	12	12	12	12	1.291	1.649	1.649	1.649	1.649					
IKRO.4436.PBH.001.01	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional Pendidikan Hindu untuk:	Nilai	65,5;	67;	67,5;	68;	68,5;	69;	0	0	0	0	0					
	a. literasi membaca		56,5	59	59,5	59,6	59,7	59,8										
	b. numerasi																	
IKRO.4436.PBH.001.02	Jumlah siswa yang memperoleh penguatan moderasi beragama siswa Pendidikan Hindu	Orang	2500	3421	3591	3772	3967	4177	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.PBH.001.03	Jumlah satuan pendidikan Hindu yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Lembaga	2	2	6	10	13	15	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.PBH.001.04	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Hindu	Prestasi	N/A	1	2	3	4	5	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.PBH.001.05	Jumlah nilai rata-rata karakter siswa Pendidikan Hindu melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Nilai	N/A	65	70	75	80	85	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.PBH.001.06	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Hindu berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Kurikulum	N/A	3	6	7	8	9	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.PBH.001.07	Jumlah materi ajar digital Pendidikan Hindu (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Materi	N/A	45	50	75	80	100	0	0	0	0	0					
RO.4436.PEF.001	4436 PEF 001 Siswa yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	Orang	3972	4.098	4.098	4.098	4.098	4.098	4.529	6.860	6.871	6.859	6.859					
IKRO.4436.PEF.001.01	Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Lembaga	110	125	125	125	125	125										
RO.4436.QDB.001	4436 QDB 001 Lembaga Pendidikan Widyalyaya, Pasraman dan Sekolah Minggu yang ditingkatkan mutunya	Lembaga	574	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174	6.092	5.000	5.000	5.000	5.000					
IKRO.4436.QDB.001.01	Jumlah Pratama Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Lembaga	45	62	63	65	66	68	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.QDB.001.02	Jumlah Adhi Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Lembaga	5	9	10	10	10	11	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.QDB.001.03	Jumlah Madyama Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Lembaga	3	4	5	5	5	6	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.QDB.001.04	Jumlah Utama Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Lembaga	3	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.QDB.001.05	Jumlah satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Lembaga	0	12	13	14	15	16	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.QDB.001.06	Jumlah sarana pendidikan Hindu yang menerapkan program pendidikan bilingual	Lembaga	0	2	3	3	4	4	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.QDB.001.07	Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Orang	2	2	3	3	4	4	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.QDB.001.08	Jumlah satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Lembaga	0	0	54	57	64	70	0	0	0	0	0					
RO.4436.QDB.002	4436.QDB.002 Fasilitas Penjaminan mutu Pendidikan Widyalyaya dan pasraman	Lembaga	0	20	20	20	20	20	0	1.000	2.000	3.000	4.000					
IKRO.4436.QDB.002.01	Jumlah Fasilitas Penjaminan mutu Pendidikan Widyalyaya dan pasraman	Lembaga	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0					
RO.4436.QDB.003	4436.QDB.003 Satuan Pendidikan Hindu yang melaksanakan	Lembaga	0	20	20	20	20	20	0	1.000	2.000	3.000	4.000					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
	ekstrakurikuler Moderasi beragama dan Pembinaan gugus depan Pramuka																	
IKRO.4436.QDB.003.01	Jumlah Satuan Pendidikan Hindu yang melaksanakan Pembinaan gugus depan Pramuka	Lembaga	0	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0				
IKRO.4436.QDB.003.02	Jumlah Satuan Pendidikan Hindu yang melaksanakan ekstrakurikuler Moderasi beragama	Lembaga	0	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0				
RO.4436.QDB.004	4436.QDB.004 Even Nasional Kompetensi Seni, Sains Dan Teknologi Bagi Pasraman Dan Widyalyaya	Lembaga	0	0	1	1	1	1	1	0	8.000	2.000	2.000	10.000				
IKRO.4436.QDB.004.01	Jumlah Even Nasional Kompetensi Seni, Sains Dan Teknologi Bagi Pasraman Dan Widyalyaya	Lembaga	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0				
RO.4436.QDB.005	4436.QDB.005 - Fasilitas Penyelenggaraan PAUD Holistik dan terintegrasi pada Pratama Widyalyaya	Lembaga	0	10	10	10	10	10	10	0	500	600	700	800				
IKRO.4436.QDB.005.01	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan PAUD Holistik dan terintegrasi pada Pratama Widyalyaya	Lembaga	0	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0				
4436.QDB.006	4436.QDB.006 - Penyelenggaraan sekolah Hindu Unggulan	Lembaga	0	0	0	1	1	2	0	500	600	700	800					
IKRO.4436.QDB.006.01	Jumlah Satuan Pendidikan Widyalyaya Unggulan	Lembaga	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0				
SK.4436.2	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Hindu																	
IKSK.4436.2.1	Persentase guru satuan pendidikan Hindu yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	N/A	48,83	63,48	68,36	73,24	78,13	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.2.2	Rasio guru satuan pendidikan Hindu terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	N/A	01:08	01:08	01:09	01:10	01:10	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.2.3	Persentase tenaga kependidikan Hindu lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	N/A	80	85	90	95	99	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.2.4	Persentase guru agama Hindu yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	41,49	45,54	73,58	82,01	88,64	95,46	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.2.5	Persentase guru Agama Hindu yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	N/A	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.2.6	Persentase Kepala satuan pendidikan Hindu yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	N/A	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.2.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan Hindu yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	N/A	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.2.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Hindu (AKP) minimal predikat terampil	Persen	N/A	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.2.9	Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan	Persen	N/A	95	96	97	98	99	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.2.10	Persentase guru Agama Hindu yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.2.11	Persentase Pengawas Agama Hindu yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.2.12	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Hindu	Persen	N/A	55	60	62	63	64	0	0	0	0	0	0				
IKSK.4436.2.13	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Hindu berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	N/A	0	0	0,15	0,5	1	0	0	0	0	0	0				
RO.4436.QEA.001	4436.QEA.001 Guru Non ASN penerima Tunjangan Profesi	Orang	176	175	1670	1670	1670	1670	1670	5.178	41.058	41.058	41.058	41.058				
IKRO.4436.QEA.001.1	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	01:08	01:08	01:09	01:10	01:10	1670	0	0	0	0	0	0				



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE						TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029						
IKRO.4436.QEA.001.2	Jumlah guru yang meningkat jenjang karir	Orang	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.QEA.001.3	Jumlah Pengawas yang meningkat jenjang karir	Orang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0						
IKRO.4436.QEA.001.4	Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Hindu	Orang	357	3000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.QEA.001.5	Jumlah Guru Non ASN Penerima Tunjangan Profesi	Orang	176	239	1350	1400	1450	1500	0	0	0	0	0					
RO.4436.QEA.002	4436 QEA 002 Guru Non ASN Penerima Insentif	Orang	1673	1.784	1.800	1.900	2.000	2.100	5.132	2.570	2.570	2.570	2.570					
IKRO.4436.QEA.002.1	Jumlah Guru Non ASN Penerima Insentif	Orang	1673	1.784	1.800	1.900	2.000	2.100	0	0	0	0	0					
RO.4436.SCI.001	4436 SCI 001 Guru Agama Hindu dan Guru pada Satuan Pendidikan Widyalyaya yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	3748	3.912	5.520	5.520	5.520	5.520	11.459	12.131	12.131	12.131	12.131					
IKRO.4436.SCI.001.1	Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Orang	70	90	96	101	107	113	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.SCI.001.2	Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan		N/A	0	0	0,15	0,5	1	0	0	0	0	0					
RO.4436.QEI.001	4436 QEI 001 POKJAWAS/KKM/KKG/MGMP penerima bantuan	Lembaga	209	231	231	231	231	231	6.085	7.190	7.190	7.190	7.190					
IKRO.4436.QEI.001.1	Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Orang	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.QEI.001.2	Jumlah Kepala Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Orang	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.QEI.001.3	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Orang	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0					
IKRO.4436.QEI.001.4	Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Orang	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0					
4437 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha														Bimas Buddha				
SK.4437.1	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan																	
IKSK.4437.1.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional sekolah keagamaan Buddha untuk:																	
	a literasi membaca	Persen	30,54	32	35	35	35	35	0	0	0	0	0					
	b numerasi	Persen	30,54	32	35	35	35	35	0	0	0	0	0					
IKSK.4437.1.2	Nilai Keberagaman siswa pada satuan pendidikan keagamaan Buddha	Nilai	0	70	72	75	77	80	0	0	0	0	0					
IKSK.4437.1.3	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada satuan pendidikan keagamaan Buddha	Rerata	0	75	78	80	81	82	0	0	0	0	0					
IKSK.4437.1.4	Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	0	11,11	22,22	22,22	22,22	22,22	0	0	0	0	0					
IKSK.4437.1.5	Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	0	70	75	80	85	90	0	0	0	0	0					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKSK.4437.1.6	Jumlah prestasi yang diraih siswa agama Buddha dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	0	0	1	2	3	4	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.1.7	Persentase peningkatan nilai karakter siswa agama Buddha melalui kegiatan Kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.1.8	Persentase perangkat kurikulum Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	0	0	92	94	96	98	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.1.9	Persentase Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Persen	52,5	70	80	80	80	90	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.1.10	Persentase Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Persen	0	50	50	50	80	90	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.1.11	Persentase Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.1.12	Persentase Utama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Persen	95	95	96	97	98	99	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.1.13	Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha unggul yang terselenggara	Persen	0	0	4,44	6,67	8,89	11,11	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.1.14	Persentase satuan pendidikan Keagamaan Buddha yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	0	10	15	20	25	30	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.1.15	Persentase siswa Pendidikan Keagamaan Buddha yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	N/A	0,09	0	0,5	0	0,52	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.1.16	Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	66,67	70	75	80	85	90	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.1.17	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	Persen	90	90	92	94	96	98	0	0	0	0	0		
RO 1	4437 PBH 001 Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha yang Dikembangkan	Kajian	100	7	7	7	7	7	604	634	666	699	734		
IKRO	Jumlah rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional sekolah keagamaan Buddha untuk:	Nilai	100	70	71,5	73	74	75	91	95	100	105	110		
	a literasi membaca		100	70	71,5	73	74	75							
	b numerasi														
IKRO	Jumlah siswa pendidikan keagamaan Buddha yang memperoleh penguatan moderasi beragama	Orang		0	3400	3570	3749	3936	-	6.800	7.140	7.497	7.872		
IKRO	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Buddha yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Lembaga	0	5	10	10	10	10	151	159	167	175	184		
IKRO	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan Buddha berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Dokumen	4	4	4	4	4	4	60	63	67	70	73		
RO 2	4437 PEF 001 Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan Siswa Agama Buddha	Orang	0	11012	11012	11012	11012	11012	10.898	20.000	21.000	22.050	23.153		
IKRO	Jumlah siswa agama Buddha yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	Orang	0	1069	1100	1150	1200	1220	3.269	6.000	6.300	6.615	6.946		
IKRO	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Buddha yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Lembaga	0	32	34	36	38	41	7.629	14.000	14.700	15.435	16.207		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	pengembangan pendidikan keperamukaan														
IKSK.4437.9.1	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada satuan pendidikan Buddha yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.9.2	Jumlah gugus depan pramuka pada satuan pendidikan Buddha yang dibina	Jumlah	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0		
SK.4437.10	Menguatnya Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)														
IKSK.4437.10.1	Persentase Nava Dhamaseka yang menerapkan program Holistik-Integratif	Persen	N/A	30	37,5	42,5	50	55	0	0	0	0	0		
SK.4437.2	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Buddha								0	0	0	0	0		
IKSK.4437.11.1	Persentase guru satuan pendidikan Buddha yang memiliki sertifikat pendidik	Persen							0	0	0	0	0		
IKSK.4437.11.3	Persentase guru agama Hindu yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	N/A	54,93	63,94	75,91	87,87	98,8	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.2.1	Rasio guru satuan pendidikan agama Buddha terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	0,104166667	0,097222222	0,097222222	0,090277778	0,090277778	0,090277778	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.2.2	Persentase tenaga kependidikan Buddha lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	0	95,59	90,91	92	94,55	96,67	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.2.3	Persentase guru Agama Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	0	40	45	50	55	60	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.2.4	Persentase Kepala satuan pendidikan Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	N/A	0	2,8	4,17	6,25	8,33	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.2.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan Buddha yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	0	5,93	11,87	17,8	23,74	29,67	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.2.6	Persentase Pengawas satuan pendidikan Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persen	0	60	70	80	90	100	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.2.7	Persentase Guru Agama Buddha yang meningkat jenjang karir	Persen	0	30	40	50	60	70	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.2.8	Persentase Pengawas Pendidikan Agama Buddha yang meningkat jenjang karir	Persen	0	30	40	50	60	70	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.2.9	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Agama Buddha	Persen	N/A	75,46	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
IKSK.4437.2.10	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Buddha berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0		
RO 1	4437 QEA 001 Bantuan Insentif Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN	Orang	2900	2932	2850	2993	3142	3299	8.796	8.550	8.978	9.426	9.898		
IKRO	Jumlah guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Orang	0,104166667	0,097222222	0,097222222	0,090277778	0,090277778	0,090277778	0	0	0	0	0		
IKRO	Jumlah Guru Pendidikan Buddha Non ASN Penerima Insentif	Orang	2900	2932	2850	2993	3142	3299	8.796	8.550	8.978	9.426	9.898		
IKRO	Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama dan keagamaan Buddha berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Rekomendasi	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0		
RO 2	4437 QEA 002 Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN	Orang	310	236	236	236	236	236	6.756	12.859	13.502	14.177	14.886		
IKRO	Jumlah Guru Pendidikan Buddha Non ASN Penerima Tunjangan Profesi	Orang	231	231	515	515	515	515	4.054	7.715	8.101	8.506	8.932		
IKRO	Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Buddha	Orang	0	372	200	0	0	0	676	1.286	1.350	1.418	1.489		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
RO 3	4437 QEA 003 Tunjangan Khusus (3T) Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN	Orang	45	45	45	45	45	45	45	810	756	794	833	875				
IKRO	Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN Penerima Tunjangan Khusus (3T)	Orang	45	45	43	44	46	49	729	680	715	750	788					
IKRO	Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Buddha berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Rekomendasi	0	1	1	1	1	1	81	76	79	83	88					
RO 4	4437 SCI 001 Pelatihan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Buddha	Orang	1.773	100	100	100	100	100	879	1.923	2.019	2.120	2.226					
IKRO	Jumlah guru pendidikan agama Buddha yang meningkat jenjang karir	Orang	1.773	100	200	210	221	232	879	1.923	2.019	2.120	2.226					
RO 5	4437 SCI 002 Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Buddha	Orang	162	197	197	197	197	197	986	1.035	1.087	1.141	1.198					
IKRO	Jumlah tenaga kependidikan agama Buddha lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Orang	162	145	152	160	168	176	789	828	870	913	958					
IKRO	Jumlah Pengawas pendidikan agama Buddha yang meningkat jenjang karir	Orang	0	0	21	21	21	21	197	207	217	228	240					
RO 6	4437 QEI 001 Bantuan POKJAWAS/ KKM/ KKG/ MGMP Agama Buddha	Lembaga	149	141	141	141	141	141	2.366	2.484	2.609	2.738	2.876					
IKRO	Jumlah guru pendidikan agama Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Orang	0	674	758	843	927	1011	592	621	652	685	719					
IKRO	Jumlah Kepala Sekolah Keagamaan Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Orang	N/A	0	0	0	0	0	592	621	652	685	719					
IKRO	Jumlah guru dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan Buddha yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Orang	0	100	200	300	400	500	592	621	652	685	719					
IKRO	Jumlah pengawas pendidikan agama Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Orang	0	13	15	17	19	21	592	621	652	685	719					
5621 Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu									17.020	20.870	28.850	38.226	51.280	Bagian Tata Usaha				
SK.5621.1	Meningkatnya layanan pendidikan Khonghucu yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum																	
IKSK.5621.1.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	N/A	35	45	55	65	75	24.650	26.650	28.650	30.650	32.662					
RO.5621.QDC.001	5621 QDC 001 Lembaga Pendidikan Khonghucu yang Berkualitas																	
IKRO.5621.QDC.001	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Jumlah	N/A	8	12	16	20	24	24.650	26.650	28.650	30.650	32.662					
SK.5621.2	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khonghucu																	
IKSK.5621.1.1	Persentase guru agama khonghucu yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	0	0	1	2	4	7	1.084	1.751	3.502	5.253	7.880					
IKSK.5621.1.2	Persentase guru agama khonghucu yang meningkat jenjang karir	Persen	0	10	15	20	25	30	6.311	7.012	8.415	10.098	12.117					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE					TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
IKSK.5621.1.3	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Khonghucu	Persen	0	0	1	2	4	7	1.115	1.672	2.508	3.762	5.643					
RO.5621.QEI.001	5621 QEI 001 Guru Agama Khonghucu Non PNS Penerima Insentif			187	199	208	217	226	8.510	10.435	14.425	19.113	25.640					
IKRO.5621.QEI.001.1	Jumlah Guru Agama Khonghucu NON PNS Penerima Insentif	Jumlah	178	170	170	170	170	170	510	510	510	510	510					
IKRO.5621.QEI.001.1	Jumlah guru agama khonghucu yang mendapatkan sertifikat pendidik	Jumlah	0	0	2	4	6	8	1.084	1.751	3.502	5.253	7.880					
IKRO.5621.QEI.001.2	Jumlah guru agama khonghucu yang meningkat jenjang karir	Jumlah	0	17	25	30	35	40	6.311	7.012	8.415	10.098	12.117					
IKRO.5621.QEI.001.3	Jumlah peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Khonghucu	Jumlah	0	0	2	4	6	8	1.115	1.672	2.508	3.762	5.643					
025.WA - Program Dukungan Manajemen														Bagian Tata Usaha				
SP.13	Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel								962	1.107	1.162	1.278	1.406					
IKSP.13.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal	Nilai	74,28	76	78	80	82	85	962	1.107	1.162	1.278	1.406					
IKSP.13.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Pendidikan Islam	Nilai	89,25	89,5	89,75	90	90,25	90,5	0	0	0	0	0					
IKSP.13.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	Nilai	82	82,2	82,4	82,6	82,8	83	0	0	0	0	0					
IKSP.13.4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	Nilai	78,69	83	83,83	84,67	85,51	86,37	0	0	0	0	0					
IKSP.13.5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimas Katolik	Nilai	90	81,21	81,21	81,22	81,23	81,24	0	0	0	0	0					
IKSP.13.6	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	Nilai	83,6	83,7	83,8	83,9	84	84,1	0	0	0	0	0					
IKSP.13.7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	Nilai	82,6	82,8	83	83,1	83,2	83,3	0	0	0	0	0					
IKSP.13.8	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah	Nilai	76,5	81	81,3	81,5	81,8	82	0	0	0	0	0					
IKSP.13.9	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	Nilai	92,75	92,8	92,85	92,9	92,95	93	0	0	0	0	0					
IKSP.13.10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai	74,28	82	82,1	82,2	82,3	82,5	0	0	0	0	0					
SP.14	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal atas Akuntabilitas Keuangan, Kinerja dan Integritas SDM aparatur Kementerian Agama								0	0	0	0	0					
IKSP.14.1	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	Nilai	3,32	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	0	0	0	0	0					
IKSP.14.2	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai	3,32	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	0	0	0	0	0					
2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN														Bagian Tata Usaha				
SK.2098.1	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum																	
IKSK.2098.1.1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	99,46	99,47	99,48	99,49	99,5	99,51	4.627	6.473	7.120	7.833	8.616					
IKSK.2098.1.2	Persentase harmonisasi regulasi dan penyelesaian produk hukum	Persen	95	95	95	95	95	95	2.018	4.501	4.951	5.446	5.991					
IKSK.2098.1.3	Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan	Persen	95	95	95	95	95	95	1.553	4.832	5.316	5.847	6.432					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE						TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029									
IKSK.2098.1.4	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	96	96,5	97	97,5	98	98,5	2.849	12.373	13.610	14.971	16.468									
IKSK.2098.1.5	Persentase rekomendasi izin rohaniwan, pengajar dan pelajar asing	Persen	98,25	98,5	98,75	99	99,25	99,5	1.908	5.229	5.752	6.327	6.960									
RO.2098.AEC.964	2098.AEC.964 Hasil Kesepakatan Kerja Sama Internasional	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.908	5.229	5.752	6.327	6.960									
IKRO.2098.AEC.964.5	Jumlah rekomendasi rohaniwan, pengajar dan pelajar yang diterbitkan	Jumlah	3.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	1.908	5.229	5.752	6.327	6.960									
RO.2098.EBA.957	2098.EBA.957 Layanan Hukum	Layanan	30	30	30	30	30	30	8.394	16.581	18.240	20.064	22.070									
IKRO.2098.EBA.957.1	Jumlah penyusun rancangan perundangan yang ditingkatkan kompetensi	Orang	N/A	90	95	100	105	110	4.627	6.473	7.120	7.833	8.616									
IKRO.2098.EBA.957.2	Jumlah harmonisasi regulasi dan penyelesaian produk hukum	Jumlah	20	20	22	24	25	26	2.018	4.501	4.951	5.446	5.991									
IKRO.2098.EBA.957.3	Jumlah naskah urgensi rancangan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan	Jumlah	20	20	22	24	25	26	198	775	853	938	1.032									
IKRO.2098.EBA.957.3	Jumlah rancangan peraturan yang diterbitkan sesuai perencanaan	Jumlah	20	20	22	24	25	26	1.553	4.832	5.316	5.847	6.432									
RO.2098.EBA.969	2098.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	Layanan	2	2	2	2	2	2	2.849	12.373	13.610	14.971	16.468									
IKRO.2098.EBA.969.1	Jumlah Layanan Bantuan Hukum	Jumlah	70	70	70	70	70	70	2.849	12.373	13.610	14.971	16.468									
2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian																						Bagian Tata Usaha
SK.2099.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)																					
IKSK.2099.1.1	Indeks Sistem Merit	Nilai	N/A	266	271	276	281	286	1.027,73	6.371,91	7.009,10	7.710,01	8.481,01									
IKSK.2099.1.2	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	N/A	77,24	78,24	79,24	80,24	81,24	289,66	1.795,89	1.975,48	2.173,03	2.390,33									
IKSK.2099.1.3	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	N/A	55	65	75	85	95	3.119,61	19.185,58	20.144,86	21.152,10	22.209,70									
IKSK.2099.1.4	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	N/A	0	0	0,000158	0,000164	0,00017	0	0	750	787,5	826,88									
IKSK.2099.1.5	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Persen	N/A	0	6	7	9	10	0	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00									
RO.2099.EBC.954	2099.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Orang	N/A	186675	186675	186675	186675	186675	4.436,99	28.353,38	30.979,44	33.032,64	35.238,92									
IKRO.2099.EBC.954.1	Jumlah Satuan Kerja dengan indeks sistem merit berkategori baik	Nilai	N/A	266	271	276	281	286	1.027,73	6.371,91	7.009,10	7.710,01	8.481,01									
IKRO.2099.EBC.954.2	Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN dengan kategori sedang	Nilai	N/A	77,24	78,24	79,24	80,24	81,24	289,66	1.795,89	1.975,48	2.173,03	2.390,33									
IKRO.2099.EBC.954.3	Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Jumlah	N/A	2.750	3.250	3.750	4.250	4.750	3.119,61	19.185,58	20.144,86	21.152,10	22.209,70									
IKRO.2099.EBC.954.4	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	N/A	0	0	2	4	6	0	0	750	787,5	826,88									
IKRO.2099.EBC.954.5	Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Jumlah	N/A	0	1.614	1.629	1.660	1.675	0	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00									
2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN																						Bagian Tata Usaha
SK.2100.1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN																					
IKSK.2100.1.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,88	95	95,5	96	96,5	97	2.935.000	3.671.986	4.039.184	4.098.000	4.598.000									



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE						TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029						
IKSK.2100.1.3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	40	50	55	60	65	75	545.000	747.604	887.000	967.000	987.000						
IKSK.2100.1.4	Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	90	91	92	93	94	567.760	770.364	847.400	899.400	977.400						
IKSK.2100.1.6	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	73	75	78	81	90	95	388.820	602.200	662.420	728.662	801.528						
IKSK.2100.1.8	Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	Persen	100	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	534.000.000	736.604.000	810.264.000	910.264.000	980.264.000						
RO.2100.EBA.956	2100.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.694.000	2.352.200	2.587.420	2.846.162	3.130.778						
IKRO.2100.EBA.956.7	Jumlah Aset yang tercatat dalam SIMAK BMN	Aset	72630	72730	72830	72930	73030	73130	1.305.180	1.750.000	1.925.000	2.117.500	2.329.250						
IKRO.2100.EBA.956.6	Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Jumlah	4434	4543	4633	4211	4422	4643	388.820	602.200	662.420	728.662	801.528						
RO.2100.EBA.994	2100.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	110.034.377	169.612.000	186.573.200	205.230.520	225.753.572						
IKRO.2100.EBA.994.2	Jumlah ASN yang menerima layanan operasional perkantoran	Jumlah	1714	1714	1814	1914	2014	2114	110.034.377	169.612.000	186.573.200	205.230.520	225.753.572						
RO.2100.EBD.955	2100.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	1	1	1	1	1	13.354.145	15.306.755	16.331.576	17.032.392	18.000.392						
IKRO.2100.EBD.955.1	Jumlah Opini Laporan Keuangan	Opini	1	1	1	1	1	1	2.026.240	2.228.844	2.451.728	2.651.728	2.751.728						
IKRO.2100.EBD.955.4	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah	2	2	2	2	2	2	567.760	770.364	847.400	899.400	977.400						
IKRO.2100.EBD.955.8	Jumlah Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Jumlah	4883	5000	5076	5190	5250	5365	534.000	736.604	810.264	910.264	980.264						
IKRO.2100.EBD.955.2	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2.935.000	3.671.986	4.039.184	4.098.000	4.598.000						
IKRO.2100.EBD.955.3	Jumlah Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Jumlah	109	95	94	93	92	91	545.000	747.604	887.000	967.000	987.000						
IKRO.2100.EBD.955.5	Jumlah Penerimaan PNPB dan BLU	Jumlah	5,824,101,297,935	5,353,492,146,000	5,321,896,328,300	5,533,499,826,150	5,723,394,856,363	5,922,435,873,175	1,933,735	5,015,014	5,120,000	5,130,000	5,230,000						
IKRO.2100.EBD.955.5	Jumlah Realisasi PNPB dan BLU	Jumlah	5,052,087,868,438	5,015,093,976,064	4,733,684,440,660	4,933,272,133,300	5,111,074,464,563	5,297,796,133,325	4,812,410	2,136,339	2,176,000	2,376,000	2,476,000						
2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana														Bagian Tata Usaha					
SK.2101.1	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi								10.371,72	11.927,48	13.018,11	14.319,91	15.751,89						
IKSK.2101.1.1	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	Nilai	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	2.381	2.738	3.012	3.313	3.644						
IKSK.2101.1.2	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,25	3,51	3,77	4,03	4,29	4,5	2.152	2.475	2.723	2.995	3.294						
IKSK.2101.1.3	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Nilai	4	4	4	4,5	4,5	4,5	1.877	2.159	2.375	2.612	2.874						
IKSK.2101.1.4	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,86	4,87	4,87	4,88	4,89	4,9	1.228	1.412	1.553	1.709	1.880						
IKSK.2101.1.5	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	74,73	77	79	81	83	85	957	1.101	1.211	1.332	1.465						
IKSK.2101.1.6	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB <i>General</i>	Nilai	100	98,25	98,5	98,75	99	99,25	897	1.032	1.083	1.191	1.311						
IKSK.2101.1.7	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Nilai	1	1,25	1,5	2	2,25	2,5	600	690	725	797	877						
IKSK.2101.1.8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	60,15	60,5	61	61,5	62	62,5	279	321	337	371	408						
IKRO.2101.EBA.960	2101.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	96	184	183	183	183	8.596	9.885	10.873	11.961	13.157						



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE						TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029						
IKRO.2103.EBA.962.4	Jumlah ASN yang memperoleh Layanan Kesehatan	Orang	340	340	340	340	340	340	340	0	0	0	0	0					
IKRO.2103.EBA.962.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan umum yang disediakan	Jumlah	5	5	5	5	5	5	5	36.804.300	36.804.300	36.804.300	36.804.300	36.804.300					
RO.2103.EBA.994	2103.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	12	12	12	12	12	12	12	645.957.905	645.957.905	645.957.905	645.957.905	645.957.905					
IKRO.2103.EBA.994.1	Jumlah Layanan Pengadaan yang diselenggarakan	Layanan	4	4	4	4	4	4	4	645.957.905	645.957.905	645.957.905	645.957.905	645.957.905					
IKRO.2103.EBB.951	2103.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	10	20	30	30	30	30	30	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000					
RO.2103.EBB.951.3	Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis <i>roadmap</i>	Unit	1	20	30	30	30	30	30	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000					
IKRO.2103.EBB.971	2103.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	Unit	1	30	40	40	40	40	40	177.750.000	177.750.000	177.750.000	177.750.000	177.750.000					
IKRO.2103.EBB.971.3	Jumlah Layanan Prasarana Internal	Jumlah	5	30	40	40	40	40	40	177.750.000	177.750.000	177.750.000	177.750.000	177.750.000					
7887 Pembinaan Administrasi Kehumasan dan Komunikasi Publik															Bagian Tata Usaha				
SK.7887.1	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi																		
IKSK.7887.1.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPIID	Nilai	94,52	95	95,53	95,55	95,58	96	96	332.439.000	1.332.439.000	2.332.439.000	3.332.439.000	4.332.439.000					
IKSK.7887.1.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	10	11	12	13	14	15	15	4.906.335.000	5.906.335.000	6.906.335.000	7.906.335.000	8.906.335.000					
RO.7887.EBA.958	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	5.641.918.000	8.641.918.000	11.641.918.000	14.641.918.000	17.641.918.000					
IKRO.7887.EBA.958.1	Jumlah satuan Kerja dengan penyelenggaraan PPIID	Satker	107	107	107	107	107	107	107	332.439.000	1.332.439.000	2.332.439.000	3.332.439.000	4.332.439.000					
IKRO.7887.EBA.958.1	Jumlah pemberitaan negatif tentang Kemenag yang <i>dicounter</i>	Pemberitaan	200	200	200	200	200	200	200	403.144.000	1.403.144.000	2.403.144.000	3.403.144.000	4.403.144.000					
IKRO.7887.EBA.958.2	Jumlah peningkatan konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Konten	260	300	340	380	420	460	460	4.906.335.000	5.906.335.000	6.906.335.000	7.906.335.000	8.906.335.000					
7888 Peningkatan Layanan Data dan Teknologi Informasi															Bagian Tata Usaha				
SK.7888.1	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi									62.139	848.375	1.018.151	1.221.661	1.465.993					
IKSK.7888.1.2	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2,72	2,72	3	3	3,5	3,5	3,5	0	0	0	0	0					
RO.788.EBA.963	7888.EBA.963 Layanan Data dan Teknologi Informasi									58.338	874.761	1.041.074	1.240.648	1.480.138					
IKRO.7888.EBA.963.1	Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis digital	Layanan	25	35	45	55	65	85	85	55.238	821.561	985.874	1.183.048	1.419.658					
IKRO.7888.EBA.963.2	Jumlah data Statistik yang dipublikasi	Dataset	3	5	7	9	12	15	15	3.100	53.200	55.200	57.600	60.480					
IKRO.7888.EBA.963.3	Jumlah satuan kerja yang menerapkan transformasi digital	Satker	N/A	4590	4590	4590	4590	4590	4590	3.801	45.614	48.977	53.013	57.855					
6708 Dukungan Manajemen Pendidikan															Bagian Tata Usaha				
SK.6708.1	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan									24.939.410.690	29.939.541.021	34.939.671.385	39.939.801.786	44.939.932.227					
IKSK.6708.1.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	90	90	90	90	90	90	90	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000					
IKSK.6708.1.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1,36	1,67	1,97	2	2,14	2,2	2,2	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000					
IKSK.6708.1.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	10	11	12	13	14	15	15	24.321.468.000	27.821.468.000	31.321.468.000	34.821.468.000	38.321.468.000					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE		TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKSK 6708.1.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	10	11	12	13	14	15	600.000.000	2.100.000.000	3.600.000.000	5.100.000.000	6.600.000.000		
IKSK 6708.1.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	90	90	90	90	90	90	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000		
IKSK 6708.1.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	90	90	90	90	90	90	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000		
IKSK 6708.1.7	Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian Agama oleh BKN minimal 85	Nilai	N/A	87,88	88,5	88,5	90	90	3.310,29	3.641,31	4.005,44	4.405,99	4.846,59		
IKSK 6708.1.8	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	92,72	92,84	93	93,17	93,34	93,51	17.099,380	17.099,380	17.099,380	17.099,380	17.099,380		
IKSK 6708.1.9	Persentase rancangan peraturan bidang pendidikan yang diselesaikan sesuai perencanaan	Persen	20	20	22	24	25	26	0	0	0	0	0		
RO.6708.EBD.952	6708 EBD 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2.917.626	2.917.626	2.917.626	2.917.626	2.917.626		
IKRO.6708.EBD.952.1	Jumlah satuan kerja yang memiliki realisasi anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian <i>output</i>	Unit	28	29	30	31	32	33	2.917.626	2.917.626	2.917.626	2.917.626	2.917.626		
RO.6708.EBA.960	6708 EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.674.050	1.674.050	1.674.050	1.674.050	1.674.050		
IKRO.6708.EBA.960.2	Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai peningkatan kinerja	Layanan	2238	2240	2242	2243	2246	2246	1.674.050	1.674.050	1.674.050	1.674.050	1.674.050		
RO.6708.EBA.958	6708 EBA 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1	24.321.468	27.821.468	31.321.468	34.821.468	38.321.468		
IKRO.6708.EBA.958.3	Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Jumlah	10	11	12	13	14	15	24.321.468	27.821.468	31.321.468	34.821.468	38.321.468		
RO.6708.CAN.001	6708 CAN 001 Sarana Bidang TIK	Unit	10	10	10	10	10	10	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000		
IKRO.6708.CAN.001.5	Jumlah infrastruktur dari layanan dukungan TIK yang terpenuhi	Jumlah	10	10	10	10	10	10	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000		
RO.6708.EBA.963	6708 EBA 963 Layanan Data dan Informasi	Jumlah	1	1	1	1	1	1	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000		
IKRO.6708.EBA.963.4	Jumlah satuan kerja yang memperoleh layanan peningkatan akses informasi dan publikasi program	Jumlah	1527	1532	1536	1539	1543	1548	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000		
RO.6708.EBC.954	6708 EBC 954 Layanan Manajemen SDM	Nilai	N/A	87,88	88,5	88,5	90	90	3.310.285	20.523.767	22.576.143	24.833.758	27.317.133		
IKRO.6708.EBC.954.7	Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian Agama oleh BKN minimal 85	Nilai	N/A	87,88	88,5	88,5	90	90	3.310.285	20.523.767	22.576.143	24.833.758	27.317.133		
RO.6708.EBD.955	6708 EBD 955 Layanan Manajemen Keuangan	Persen	40	50	60	70	80	90	800.000	960.000	1.152.000	1.385.000	1.662.000		
IKRO.6708.EBD.955.6	Persentase Jabatan Fungsional Keuangan Negara yang memenuhi standar	Jumlah	40	50	60	70	80	90	800.000.000	960.000.000	1.152.000.000	1.385.000.000	1.662.000.000		
RO.6708.EBA.957	6708 EBA 957 Layanan Hukum	Jumlah	1	1	1	1	1	1	2.391.500	2.391.500	2.391.500	2.391.500	2.391.500		
IKRO.6708.EBA.957.8	Jumlah layanan Hukum yang diselenggarakan sesuai standar	Jumlah	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0		
IKRO.6708.EBA.957.9	Jumlah rancangan peraturan bidang pendidikan yang diselesaikan sesuai perencanaan	Jumlah	20	20	22	24	25	26	0	0	0	0	0		
RO.6708.EBA.956	6708.EBA.956 Layanan BMN								1.578.390	1.578.390	1.578.390	1.578.390	1.578.390		
IKRO.6708.EBA.956.2	Jumlah Layanan BMN	Jumlah	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0		
RO.6708.EBA.994	6708.EBA.994 Layanan Perkantoran														
IKRO.6708.EBA.994.1	Jumlah Layanan Pengadaan yang diselenggarakan	Layanan	4	4	4	4	4	4	645.957.905	645.957.905	645.957.905	645.957.905	645.957.905		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

Lampiran II: MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA, RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI APBN (dalam ribuan)					ALOKASI NON APBN (dalam ribuan)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	Persentase peningkatan audiens MTQ	1	1	1	1	1	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	13.000.000	30.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	Persentase peningkatan audiens Pesparawi	1	1	1	1	1	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Persentase peningkatan audiens Pesparani	1	1	1	1	1	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Persentase peningkatan audiens Utsawa Dharmagita	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Persentase peningkatan audiens Swayamvara Tripitaka Gatha	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	1	1	1	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	270.224.000	270.224.000	270.224.000	270.224.000	270.224.000
Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	27.404.000	27.404.000	27.404.000	27.404.000	27.404.000



Lampiran III: METADATA INDIKATOR KINERJA

**RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2025-2029**

Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.1.1 : Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00
3	Konsep/Definisi	Kanwil dan Kemenag Kabupaten/Kota mendapat nilai 80 dalam IKUB
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase Kemenag Kab/Kota yang mendapat nilai IKUB diatas 80, maka semakin baik tingkat Kerukunan Umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (Jumlah Kabupaten dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi ÷ Jumlah total kabupaten) × 100%
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kabupaten dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi 2. Jumlah total kabupaten
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kategori nilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.1.2 : Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
3	Konsep/Definisi	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System (EWS) mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b : Jumlah total KUA Se Jateng
6	Nama Variabel Pembangun	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Implementasi Sistem Informasi EWS Berbasis KUA 2. Pelatihan Petugas KUA dalam Pemantauan Isu Keagamaan 3. Pembentukan Forum Komunikasi Keagamaan di Tingkat Kecamatan 4. Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Keagamaan 5. Rekomendasi Tindak Lanjut atas Potensi Gangguan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. KUA dengan Petugas Khusus EWS 2. KUA dengan Penyuluh/Penghulu 3. KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.1.3 : Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
3	Konsep/Definisi	Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredakan potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial.
4	Interpretasi	Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/ Kristen /Katolik/ Hindu/ Buddha /Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam /Kristen /Katolik /Hindu/ Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Perumusan Rekomendasi Early Warning System
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan: 1. Tingkat lokal (kabupaten/kota) 2. Tingkat provinsi 3. Tingkat nasional
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.1.4 : Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA
GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA
3	Konsep/Definisi	Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan audiens pada event keagamaan/ event keagamaan/ dibandingkan dengan jumlah audiens pada tahun sebelumnya
4	Interpretasi	Semakin meningkat persentase jumlah audiens maka semakin luas syiar agama pada umat
5	Metode / Rumus Perhitungan	1. Jumlah audiens event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan 2. Jumlah audiens event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah audiens tahun ini b = Jumlah audiens tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	i. Jumlah audiens tahun ini ii. Jumlah audiens tahun sebelumnya
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan
10	Klasifikasi	1. Berkurang = < 0% 2. Meningkat = 0%-5% 3. Meningkat Pesat = >5%
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.1.5 : Persentase peningkatan peserta event seni budaya

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan peserta event seni budaya
3	Konsep/Definisi	Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya
4	Interpretasi	Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat
5	Metode / Rumus Perhitungan	3. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan 4. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	iii. Jumlah peserta tahun ini iv. Jumlah peserta tahun sebelumnya
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
10	Klasifikasi	1. Berkurang = < 0% 2. Meningkat = 0%-5% 3. Meningkat Pesat = >5%
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.1.6 : Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
3	Konsep/Definisi	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan atau pendampingan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak lembaga agama dan sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan b : Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	a. Program Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan b. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lembaga Keagamaan c. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	i. Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan ii. Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Lembaga Keagamaan iii. Pendampingan Administrasi dan Keuangan Lembaga Keagamaan v. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.2.1 : Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
3	Konsep/Definisi	Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama: 1. Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik. 2. Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital. 3. Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat peningkatan kapasitas.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara produktif dan profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) 2. Jumlah total penyuluh agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agamanya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.2.2 : Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
3	Konsep/Definisi	pengukuran data kelompok sasaran yang dimiliki Penyuluh Agama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan
4	Interpretasi	bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Layanan bimbingan penyuluhan 2. Layanan advokasi 3. Layanan keagamaan lainnya
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.2.3 : Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi
3	Konsep/Definisi	indikator mengukur proporsi fasilitator bimbingan perkawinan agama (Bimwin) yang telah mengikuti pelatihan resmi dan memperoleh sertifikat dari Kementerian Agama atau lembaga yang berwenang.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin baik kualitas layanan bimbingan perkawinan agama karena difasilitasi oleh tenaga yang kompeten dan terstandar. Target $\geq 80\%$ mencerminkan kesiapan yang optimal
5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah fasilitator Bimwin tersertifikat b = Jumlah total fasilitator Bimwin aktif
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah fasilitator Bimwin tersertifikat Jumlah total fasilitator Bimwin aktif
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelatihan, sertifikasi, dan pendataan fasilitator bimbingan perkawinan agama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kab/kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.2.4 : Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah
3	Konsep/Definisi	BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan npenyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun adalah 22.122.887 anak. Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini"
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: A:Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator 2. Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/sekolah 3. Model Bimbingan bekerjasama dengan madrasah/sekolah/pondok pesantren dan lembaga
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Eselon I
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.2.5 : Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
3	Konsep/Definisi	Bimbingan Perkawinan (Bimwin) adalah program pembinaan pra-nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Program ini merupakan bentuk layanan keagamaan preventif dan edukatif yang bertujuan menyiapkan pasangan calon suami-istri agar siap secara mental, spiritual, sosial, dan ekonomi dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Semakin tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembinaan pra-nikah, semakin tinggi ketahanan keluarga. Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini"
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi calon pengantin mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: A:Jumlah Keluarga yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah Keluarga tahun berdasarkan data peristiwa nikah
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Keluarga yang mengikuti Bimbingan Perkawinan 2. Jumlah Keluarga tahun berdasar data peristiwa nikah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator 2. Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin/Keluarga 3. Bimbingan Perkawinan dan Pembinaan Keluarga Sakinah
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Eselon I
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.2.6 : Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan
3	Konsep/Definisi	Ketersediaan sekaligus perbaikan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk mempermudah aktivitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase Rumah Ibadah yang memenuhi standar sarana dan prasarana maka semakin mudah akses pelayanan dan kenyamanan untuk masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Rumah Ibadah yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana b = Rumah Ibadah Se Jateng
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Rumah Ibadah yang memenuhi standar sarana dan prasarana 2. Jumlah Rumah Ibadah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Bantuan Rumah Ibadah 2. Pembinaan Manajemen Rumah Ibadah
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Perhitungan Prioritas : 1. Lahan Kosong /Hibah sudah sertifikat 2. Rusak Ringan/Rusak Berat dan Tidak dapat ditanggulangi dengan anggaran Rehab 3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.2.7 : Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
3	Konsep/Definisi	Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Persentase
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.2.8 : Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang disediakan
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan adalah ukuran perubahan jumlah kitab suci yang tersedia dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan akses terhadap literatur kitab suci bagi masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan ini, semakin banyak buku keagamaan yang tersedia, yang dapat mendukung peningkatan pemahaman keagamaan dan literasi masyarakat. Jika persentase rendah atau negatif, hal ini menunjukkan stagnasi atau penurunan dalam penyediaan buku keagamaan, yang dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber bacaan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengadaan dan Distribusi Kitab Suci 2. Digitalisasi dan Akses Kitab Suci Online 3. Fasilitasi Cetak dan Penerjemahan Kitab Suci 4. Kemitraan dengan Penerbit dan Lembaga Keagamaan 5. Monitoring Kebutuhan dan Ketersediaan Kitab Suci
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kitab suci masing-masing agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.2.9 : Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang disediakan
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan adalah ukuran perubahan jumlah kitab suci yang tersedia dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan akses terhadap literatur kitab suci bagi masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan ini, semakin banyak buku keagamaan yang tersedia, yang dapat mendukung peningkatan pemahaman keagamaan dan literasi masyarakat. Jika persentase rendah atau negatif, hal ini menunjukkan stagnasi atau penurunan dalam penyediaan buku keagamaan, yang dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber bacaan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah buku keagamaan yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah buku keagamaan yang disediakan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah buku keagamaan yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah buku keagamaan yang disediakan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengadaan dan Distribusi buku keagamaan 2. Digitalisasi dan Akses buku keagamaan Online 3. Fasilitasi Cetak buku keagamaan 4. Kemitraan dengan Penerbit dan Lembaga Keagamaan 5. Monitoring Kebutuhan dan Ketersediaan buku keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan buku keagamaan masing-masing agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.2.10 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah dan BPJPH
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Rekomendasi hasil pemantauan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Rekomendasi ini diterbitkan oleh pengawas halal sebagai hasil evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal yang berlaku.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan proporsi rekomendasi yang berhasil diterbitkan dari seluruh hasil pemantauan yang dilakukan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam sistem jaminan produk halal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan 2. Jumlah total hasil pemantauan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemantauan dan Evaluasi Pengawas Halal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK.2.11 : Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional
3	Konsep/Definisi	Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana sosial, zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahiq yang selaras dengan data kemiskinan regsossek
4	Interpretasi	Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan dan Verifikasi Mustahik 2. Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional 3. Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional 4. Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik 5. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Mustahik zakat 2. Calon penerima dana sosial keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK : 2.12 : Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti
3	Konsep/Definisi	Advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf adalah tindakan pendampingan, fasilitasi, atau mediasi yang dilakukan oleh otoritas terkait (misalnya Kementerian Agama) dalam rangka menyelesaikan persoalan hukum atau administratif terhadap aset wakaf, baik berupa sengketa, mutasi, maupun permasalahan lainnya.
4	Interpretasi	Persentase ini menggambarkan tingkat respons dan efektivitas lembaga dalam menindaklanjuti persoalan-persoalan terkait aset wakaf. Semakin tinggi angkanya, semakin baik upaya penyelamatan aset wakaf dari segi legalitas dan fungsionalitasnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah advokasi pengamanan harta benda wakaf yang ditindaklanjuti b = Jumlah kasus advokasi pengamanan harta benda wakaf
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kasus wakaf yang ditindaklanjuti 2. Total kasus wakaf yang membutuhkan advokasi (mutasi/sengketa)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan dan Verifikasi Aset Wakaf 2. Pengembangan Model Investasi Wakaf Produktif 3. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah 4. Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Nazhir 5. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Wakaf
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis permasalahan: 1. Mutasi Nazhir 2. Sengketa hukum (perdata atau pidana) 3. Konflik kepemilikan tanah wakaf 4. Permasalahan administrasi wakaf
11	Level Estimasi	Nasional, provinsi, kabupaten/kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK 2.13 : Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan Wakaf

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan Wakaf
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi permohonan izin pembentukan Lembaga Amil Zakat dan Wakaf yang berhasil diproses dan diterbitkan izinnya oleh otoritas terkait dibandingkan dengan jumlah total permohonan yang diajukan pada periode tertentu. Indikator ini merefleksikan efektivitas layanan perizinan dalam mendukung tata kelola zakat dan wakaf yang profesional, transparan, dan sesuai regulasi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase layanan izin yang diterbitkan, semakin baik kualitas layanan perizinan dalam memfasilitasi pembentukan Lembaga Amil Zakat dan wakaf. Hal ini juga menunjukkan tingkat kesiapan dan kepatuhan pemohon terhadap persyaratan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah izin pembentukan LAZ dan Nazir Wakaf yang diterbitkan b = Total jumlah permohonan izin pembentukan LAZ dan Nazir Wakaf yang diterima
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah izin pembentukan LAZ dan Nazir Wakaf yang diterbitkan 2. Data jumlah permohonan izin pembentukan LAZ dan Nazir Wakaf yang diterima
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Layanan Perizinan Lembaga Amil Zakat dan Wakaf
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK : 2.14 : Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi akta ikrar wakaf yang berhasil diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dibandingkan dengan total permohonan atau proses ikrar wakaf yang diajukan pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan efektivitas layanan administrasi wakaf dan dukungan terhadap legalisasi aset wakaf sesuai ketentuan perundang-undangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase AIW yang diterbitkan, semakin baik kinerja layanan pencatatan dan legalisasi wakaf. Hal ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melegalkan perbuatan wakaf secara resmi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan b = Jumlah total proses ikrar wakaf yang diajukan/diproses
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah AIW yang diterbitkan 2. Data jumlah permohonan/proses ikrar wakaf
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis peruntukan wakaf: Tanah, Bangunan, Uang, Aset Produktif Lainnya
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK. 3.1 : Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
3	Konsep/Definisi	Persentase calon jamaah haji kategori lanjut usia (lansia), yaitu berusia 65 tahun ke atas, yang berhasil diberangkatkan ke tanah suci sesuai alokasi kuota khusus lansia yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
4	Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan keberhasilan sistem seleksi, alokasi kuota, dan kesiapan administratif dalam mewujudkan layanan haji yang inklusif dan berkeadilan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah calon jamaah lansia yang diberangkatkan pada tahun berjalan b : Total kuota jamaah lansia yang tersedia pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	Persentase jamaah haji lansia yang diberangkatkan sesuai kuota tahunan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan dan alokasi kuota jamaah lansia2. Verifikasi administrasi dan kesehatan calon jamaah lansia3. Pemantauan daftar antrean haji berdasarkan usia4. Penyiapan dan pemberangkatan calon jamaah lansia5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan afirmasi lansia dalam penyelenggaraan haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Lansia Prioritas Berangkat (Usia 65 Tahun ke Atas)2. Lansia dengan Pendamping3. Lansia Mandiri4. Lansia Gagal Berangkat (Pengganti Kuota)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK. 4.1 : Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
3	Konsep/Definisi	Persentase PLHUT yang telah memenuhi kriteria standar minimum sarana-prasarana dan standar pelayanan publik sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Agama. Standar ini mencakup fasilitas fisik, sistem layanan terintegrasi, serta kualitas SDM dan prosedur layanan kepada jemaah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin optimal penyelenggaraan layanan haji dan umrah terpadu, yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan kepastian layanan bagi masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana b : Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif
6	Nama Variabel Pembangun	Persentase PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi dan evaluasi standar pelayanan PLHUT 2. Monitoring pemenuhan standar sarana dan prasarana 3. Pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas SDM PLHUT 4. Audit dan supervisi kualitas layanan publik keagamaan 5. Pengembangan sistem layanan digital PLHUT
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. PLHUT dengan Sarana dan Prasarana Lengkap 2. PLHUT dengan Pelayanan Terstandar 3. PLHUT yang Terintegrasi secara Digital 4. PLHUT dalam Proses Pemenuhan Standar
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK. 4.2 : Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu
3	Konsep/Definisi	Persentase pengguna Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang menyatakan puas terhadap kualitas layanan administrasi haji dan umrah yang diterima, meliputi aspek kecepatan, ketepatan, kenyamanan, dan kemudahan layanan
4	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kepuasan menunjukkan bahwa kualitas layanan PLHUT memenuhi ekspektasi jamaah atau masyarakat dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas b : Jumlah total responden survei
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas 2. Jumlah total pengguna PLHUT yang menjadi responden survei
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei Kepuasan Layanan PLHUT 2. Monitoring dan Evaluasi Layanan PLHUT
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Kecepatan Layanan 2. Ketepatan Layanan 3. Kenyamanan Layanan 4. Kemudahan Akses Layanan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK. 5.1 : Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
3	Konsep/Definisi	Persentase petugas haji yang mencapai skor kinerja di atas batas minimal 75 berdasarkan hasil penilaian atas pelaksanaan tugas pelayanan, pembimbingan, dan perlindungan jemaah haji selama operasional haji
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak petugas haji yang melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 b = Jumlah total petugas haji yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 2. Total petugas haji yang dievaluasi kinerjanya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Evaluasi Kinerja Petugas Haji 2. Penilaian dan Pemantauan Pelaksanaan Tugas Petugas Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Petugas Kloter (TKHI, TPHI, TPIHI) 2. Petugas Non-Kloter (PPIH Arab Saudi) 3. Petugas PPIH Embarkasi/Debarkasi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029
IKSK. 5.2 : Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
3	Konsep/Definisi	Persentase calon jemaah haji yang telah mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji dan memperoleh sertifikat sebagai bukti kelulusan pelatihan manasik haji
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak calon jemaah haji yang telah memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai rukun dan ketentuan ibadah haji
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b = Jumlah total calon jemaah haji
6	Nama Variabel Pembangun	3. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji 4. Jumlah total calon jemaah haji pada tahun berjalan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	3. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji 4. Penerbitan Sertifikat Manasik Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	4. Jemaah Haji Reguler 5. Jemaah Haji Khusus
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG AGAMA TAHUN 2025-2029

IKSK. 6.1 : Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a) Lembaga penyelenggara haji khusus; b) Lembaga penyelenggara umrah
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi lembaga penyelenggara haji khusus dan umrah yang memperoleh akreditasi predikat A sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui mekanisme penilaian akreditasi berbasis kinerja, kepatuhan regulasi, serta kualitas layanan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin besar proporsi lembaga yang memberikan layanan dengan standar prima, akuntabel, dan sesuai regulasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah PIHK dan/atau PPIU yang memperoleh akreditasi A pada tahun berjalan b : Jumlah total PIHK dan/atau PPIU yang terdaftar aktif pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Persentase PIHK terakreditasi A 2. Persentase PPIU terakreditasi A
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Proses penilaian dan akreditasi PIHK dan PPIU 2. Monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah 3. Penerbitan sertifikat akreditasi 4. Pembinaan dan pengawasan reguler lembaga penyelenggara 5. Digitalisasi dan pelaporan akreditasi pada sistem informasi haji dan umrah
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Terakreditasi A 2. Lembaga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Terakreditasi A
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.7.1 : Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi peserta didik yang terdaftar dalam program pendidikan kesetaraan (setara SD, SMP, SMA) di lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program kesetaraan dalam mendukung hak pendidikan formal bagi santri atau peserta didik di lembaga keagamaan nonformal. Semakin tinggi angkanya, semakin efektif sistem pendidikan kesetaraan tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menyelesaikan pendidikan setara formal b = Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta didik kesetaraan yang lulus 2. Jumlah peserta didik kesetaraan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Revitalisasi pendidikan formal dan non formal 2. Penjaringan peserta didik pada jalur pendidikan non formal 3. Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang kesetaraan: SD, SMP, dan SMA
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.8.1 : Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan umum yang telah mengimplementasikan kurikulum pendidikan agama yang memuat penguatan nilai-nilai moderasi beragama (seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, penerimaan terhadap tradisi) sekaligus memuat muatan pelestarian lingkungan hidup dalam proses pembelajaran.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan umum telah menerapkan kurikulum agama yang tidak hanya mengajarkan ajaran pokok agama, tetapi juga mengintegrasikan nilai moderasi beragama dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak sekolah umum yang menanamkan sikap keberagaman yang moderat sekaligus mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan b = Total jumlah satuan pendidikan umum yang menjadi objek penilaian
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan 2. Total jumlah satuan pendidikan umum yang dinilai penerapan kurikulumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum agama pada satuan pendidikan umum oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan hasil pengembangan kurikulum pada laporan akademik satuan pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang satuan pendidikan umum: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel:
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.8.2 : Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan umum yang mengalami peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan karena adanya penguatan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan umum yang difasilitasi dan didukung dalam penguatan infrastruktur keagamaan guna meningkatkan mutu pembelajaran agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana b = Jumlah total satuan pendidikan umum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh dukungan sarana 2. Jumlah total satuan pendidikan umum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah	-
	sudah tersedia publikasi data?	
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.8.3 : Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi — Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
3	Konsep/Definisi	Persentase kenaikan jumlah peserta didik (siswa) yang terdaftar pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan partisipasi siswa pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang positif menunjukkan adanya peningkatan minat, akses, atau keberlanjutan layanan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan 2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan siswa melalui EMIS, SIMPATIKA, atau sistem data pendidikan lainnya yang dikelola kementerian/lembaga terkait Rekap laporan jumlah siswa dari satuan pendidikan keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.8.4 : Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi — Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase Anak Kelas 1 ula/MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/ Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD/TK/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha (TK/RA/BA)
3	Konsep/Definisi	Persentase peserta didik kelas 1 pada MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Muta Dhammasekha yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD), baik formal maupun nonformal.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian layanan PAUD sebagai fondasi kesiapan belajar anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak anak yang memperoleh stimulasi dan pembelajaran awal melalui PAUD.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD b = Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD 2. Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan riwayat pendidikan anak melalui sistem EMIS, PPDB, atau instrumen pendataan siswa baru 2. Laporan satuan pendidikan mengenai latar belakang pendidikan anak sebelum masuk kelas 1
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan satuan pendidikan: MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, Mula Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK. 8.5 : Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi — Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada Madrasah/Satuan Keagamaan lainnya
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan yang menyediakan layanan kesehatan sekolah, meliputi kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan berkala, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), pelayanan gizi, kesehatan reproduksi, dan layanan promotif atau preventif lainnya yang terintegrasi dalam program sekolah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah mengimplementasikan layanan kesehatan bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Persentase yang tinggi menunjukkan perhatian sekolah terhadap kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan Pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan melalui sistem EMIS, Dapodik, atau survei layanan kesehatan sekolah oleh kementerian/lembaga terkait. 2. Laporan satuan pendidikan tentang kegiatan UKS dan layanan kesehatan lainnya
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat dan lainnya
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK. 8.6 : Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi — Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren
3	Konsep/Definisi	Jumlah anak usia sekolah yang sebelumnya tidak bersekolah \drop out atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal) yang kemudian mengikuti program Pendidikan Kesetaraan (setara Paket A, B, atau C) yang diselenggarakan oleh pesantren.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur peran pesantren dalam memperluas akses pendidikan bagi anak yang tidak sekolah melalui jalur Pendidikan Kesetaraan. Angka yang tinggi menunjukkan kontribusi pesantren dalam menekan angka anak tidak sekolah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan
6	Nama Variabel Pembangunan	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Pendataan peserta Pendidikan Kesetaraan di pesantren melalui EMIS atau sistem pendataan lembaga nonformal lainnya 2. Laporan program Pendidikan Kesetaraan dari pesantren penyelenggara
8	Ukuran/Satuan	Orang
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang kesetaraan yang diikuti: setara Paket A/ sederajat, Paket B/ sederajat, Paket C/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK. 9.1 : Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:
a literasi membaca
b numerasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi
3	Konsep/Definisi	Rata-rata skor capaian peserta didik pada asesmen kompetensi tingkat nasional (AKM) dalam aspek literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks tertulis serta kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
4	Interpretasi	Nilai rata-rata ini mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi skor rata-rata, semakin baik penguasaan literasi membaca dan numerasi siswa. Indikator ini berguna untuk melihat efektivitas pembelajaran dan kesetaraan hasil belajar di berbagai daerah dan jenjang pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai rata-rata = $(\sum \text{ skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor literasi membaca peserta didik 2. Skor numerasi peserta didik 3. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Asesmen Kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	Rapor Pendidikan Kemendikdasmen
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.9.2 : Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dll).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan di satuan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan lingkungan sekitar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Rapat Penyusunan Program - Rapat Komite
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.9.3 : Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penerapan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.9.4 : Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi — Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada satuan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Jumlah total penghargaan atau pengakuan (berupa medali, piala, sertifikat, atau sejenisnya) yang diperoleh oleh siswa/peserta didik dari satuan pendidikan keagamaan formal (Madrasah, SMTK/SMAK, Pasraman, Sekolah Minggu Buddha, dll.) dalam kompetisi atau ajang di luar kegiatan intrakurikuler (disebut kegiatan ekstrakurikuler). Prestasi dihitung pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur mutu hasil kegiatan non-akademik/bakat minat dan kontribusi satuan pendidikan keagamaan terhadap pengembangan potensi siswa di bidang non-keagamaan maupun keagamaan (misalnya seni, olahraga, sains, atau lomba pidato keagamaan). Jumlah yang tinggi menunjukkan peran aktif lembaga dalam pembinaan siswa.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah Prestasi = Total Prestasi yang Dicapai
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah Prestasi yang Diraih Satuan Pendidikan Keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Verifikasi Prestasi Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Ekstrakurikuler)
8	Ukuran/Satuan	Jumlah (Satuan: Prestasi/Penghargaan)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Agama/Satuan Pendidikan (Madrasah / Kristen / Katolik / Hindu / Buddha), Tingkat Prestasi (Kab/Kota, Prov, Nas, Int), dan/atau Bidang Prestasi (Sains, Olahraga, Seni, Keagamaan).
11	Level Estimasi	Nasional, Jenis Satuan Pendidikan/Agama, Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.9.5 : Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan peningkatan capaian nilai-nilai karakter siswa yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh kegiatan kepramukaan dalam membentuk dan meningkatkan karakter siswa, terutama pada aspek disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan 2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pendidikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 2. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan kepramukaan 3. Fasilitasi peningkatan dan pendampingan kegiatan kepramukaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat. MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.9.6 : Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan komitmen dan upaya sistem pendidikan dalam merevisi dan menyempurnakan kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.9.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan dasar berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang dasar tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B 2. Total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaksanaan Akreditasi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: PAUD/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.9.8 : Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan kualitas unggul sesuai indikator mutu dan keunggulan tertentu (akademik, karakter, inovasi, dll).
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pembinaan Peningkatan Kompetensi Monitoring Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: PAUD/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah	-
	sudah tersedia publikasi data?	
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.9.9 : Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing (umumnya bahasa Inggris atau bahasa Arab), dalam proses pembelajarannya.
4	Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak madrasah yang memberikan layanan pendidikan bilingual, yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa siswa dan daya saing lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah madrasah
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Jumlah madrasah dengan program pendidikan bilingual 2. Total jumlah madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Pembinaan Peningkatan Kompetensi Monitoring Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.9.10 : Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi siswa pada satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam ajang kompetisi berskala nasional atau internasional di bidang akademik, non-akademik, atau keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak siswa yang aktif dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan kualitas pembinaan dan dukungan sekolah/madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Seleksi Kompetisi, Bimbingan Teknis
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.9.11 : Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menerapkan tata kelola satuan pendidikan secara partisipatif (melibatkan komunitas sekolah, komite, orang tua, dan pihak lain) dan memperoleh penilaian pada kategori baik dalam aspek pengelolaan tersebut.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak madrasah yang melaksanakan prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik b = Total jumlah madrasah yang dinilai pengelolaannya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai pengelolaan madrasah 2. Kategori penilaian pengelolaan 3. Jumlah madrasah dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pembinaan Pengelolaan satuan pendidikan Rapat Komite
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.9.12 : Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi materi ajar digital yang telah dikembangkan dan secara aktif dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan kesiapan dan adopsi teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran, serta sejauh mana materi ajar digital digunakan oleh pendidik dan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Menyusun materi ajar digital (modul, video, e-book)
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.10.1 : Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi — Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama pada satuan pendidikan umum, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti profesionalitas guru.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas guru agama melalui kepemilikan sertifikat pendidik. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah memenuhi standar kualifikasi profesional dan berhak memperoleh tunjangan profesi guru.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru agama
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik Total jumlah guru agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Proses sertifikasi pendidik bagi guru agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pendataan guru agama yang telah tersertifikasi dalam sistem informasi guru dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang tempat guru mengajar: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.10.2 : Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi — Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP
3	Konsep/Definisi	Perbandingan jumlah guru pada madrasah dengan jumlah siswa di madrasah tersebut, yang menunjukkan sejauh mana rasio ini memenuhi ketentuan rasio ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan guru di madrasah dalam melayani siswa secara optimal sesuai standar minimal yang diatur dalam SNP. Rasio yang memenuhi SNP mencerminkan terpenuhinya standar layanan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru) (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru madrasah 2. Jumlah siswa madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan jumlah guru madrasah oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan jumlah siswa madrasah pada sistem administrasi pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.10.3 : Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
3	Konsep/Definisi	Persentase tenaga kependidikan selain guru, seperti kepala madrasah/sekolah, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja sesuai ketentuan standar nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal kualifikasi pendidikan dan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin baik kualitas SDM pendukung pendidikan dalam menjalankan tugas layanan administrasi, manajemen, dan teknis penunjang proses belajar mengajar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi data kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan melalui sistem informasi pendidikan 2. Pendataan dan penilaian kesesuaian dengan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait 3. Pemberian bantuan pendidikan 4. Peningkatan pelatihan dan pendidikan administrasi dan teknis sesuai jabatan fungsional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.10.4 : Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi — Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama pada satuan pendidikan umum, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti profesionalitas guru.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas guru agama melalui kepemilikan sertifikat pendidik. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah memenuhi standar kualifikasi profesional dan berhak memperoleh tunjangan profesi guru.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru agama
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik Total jumlah guru agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Proses sertifikasi pendidik bagi guru agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pendataan guru agama yang telah tersertifikasi dalam sistem informasi guru dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang tempat guru mengajar: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.10.5 : Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG). AKG adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional guru sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta menguasai materi ajar dengan baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil 2. Total jumlah guru yang mengikuti AKG
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi dan publikasi hasil rapor AKG yang mencantumkan predikat kompetensi guru
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.10.6 : Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase Kepala Madrasah yang mendapatkan nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK). AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi hasil rapor AKK yang memuat predikat kompetensi Kepala Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.10.7 : Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
3	Konsep/Definisi	Persentase guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan tingkat penguasaan sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana guru dan tenaga kependidikan memiliki pemahaman dan sikap keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru dan tenaga kependidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai keberagamaan yang moderat, serta dapat menjadi teladan dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$Persentase = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat dimensi penilaian moderasi beragama 2. Pengolahan dan publikasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.10.8 : Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). AKP adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala madrasah, serta pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi pengawas madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan mutu madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil b = Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil 2. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil rapor AKP pengawas madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah binaan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.10.9 : Persentase guru yang meningkat jenjang karir

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase guru yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional lama ke jabatan fungsional yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional guru. Jenjang karir guru umumnya meliputi: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir guru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang terdorong untuk terus mengembangkan diri dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit guru 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.10.10 : Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional pengawas madrasah pada jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional pengawas.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir pengawas madrasah sebagai bentuk penghargaan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas pada satuan pendidikan 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional pengawas madrasah oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan 2. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.10.11 : Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama
3	Konsep/Definisi	Persentase pertumbuhan jumlah lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PPG agama adalah program pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan lulusan menjadi guru profesional pada bidang studi pendidikan agama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan jumlah lulusan program PPG agama dari tahun ke tahun. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah menempuh jalur profesional melalui PPG, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama pada semua jenjang satuan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $[(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru agama oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG 2. Pendataan kelulusan PPG agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029
IKSK.10.12 : Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah rekomendasi terkait pengadaan (penambahan) dan pemerataan distribusi guru pendidikan agama yang diterbitkan berdasarkan analisis rencana kebutuhan guru terhadap total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil perencanaan kebutuhan guru agama dengan menerbitkan rekomendasi formal untuk pengadaan dan pemerataan distribusi guru agama. Persentase yang tinggi menunjukkan proses perencanaan kebutuhan guru agama berjalan baik dan direspons dengan penerbitan rekomendasi kebijakan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	<p>Persentase = $(a / b) \times 100\%$</p> <p>Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti</p>
6	Nama Variabel Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana kebutuhan guru agama berdasarkan analisis data kebutuhan dan ketersediaan guru Penerbitan rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.11.1 : Nilai Kinerja Anggaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Keuangan
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Anggaran
3	Konsep/Definisi	Nilai yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam suatu instansi pemerintah, mencakup perbandingan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran serta pencapaian output dan outcome yang diharapkan
4	Interpretasi	Menggambarkan seberapa baik instansi dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa tepat waktu dan akurat pelaksanaan anggaran tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6	Nama Variabel Pembangun	1. Rencana Anggaran 2. Realisasi Anggaran 3. Output 4. Outcome
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Perencanaan Anggaran 2. Pelaksanaan Anggaran 3. Evaluasi Kinerja Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	NKA > 90% (Sangat Baik); NKA > 80% sampai dengan 90% (Baik); NKA > 60% sampai dengan 80% (Cukup); NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% (Kurang); NKA sampai dengan 50% (Sangat Kurang)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah	-
	sudah tersedia publikasi data?	
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.12.1 : Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat kualitas laporan kinerja satuan kerja Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik kepatuhan pelaporan kinerja Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021
6	Nama Variabel Pembangun	Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Laporan Kinerja Satuan Kerja
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Satker
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah	-
	sudah tersedia publikasi data?	
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.12.2 : Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik sistem tata kelola dan layanan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendampingan PMPZI 2. Penilaian Pendahuluan 3. Monitoring dan evaluasi PMPZI 4. Tindak lanjut hasil evaluasi ZI
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Satker
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal RB Nasional



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.13.1 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Keuangan
2	Nama Indikator	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran
4	Interpretasi	Kenaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah tanda positif yang mencerminkan peningkatan dalam kualitas pelaksanaan anggaran oleh suatu kementerian/lembaga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Nilai IKPA (penginputan capaian output, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP)
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b. baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; c. cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau d. kurang, apabila nilai IKPA < 70 .
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Wilayah 3. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Website Kemenkeu



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.13.2 : Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
3	Konsep/Definisi	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian tindak lanjut, semakin baik tingkat kepatuhan dan efektivitas organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan
6	Nama Variabel Pembangun	3. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), 4. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 5. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait tindak lanjut hasil pengawasan; 2. Pengembangan dashboard pemantauan kepatuhan; 3. Penguatan kerja sama dengan auditor internal dan eksternal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kementerian 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kantor Wilayah 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Satuan Kerja
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.13.3 : Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu di dibandingkan dengan Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN dan Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN pada Kementerian Agama, Eselon I Pusat, Kantor Wilayah
11	Level Estimasi	1. Kementerian Agama, 2. Eselon I, 3. Kantor Wilayah, 4 Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.13.4 : Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat implementasi sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh satuan kerja untuk memastikan laporan keuangan disusun secara andal, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak satuan kerja yang telah menerapkan PIPK secara memadai untuk mendukung akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Laporan PIPK
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengendalian Intern / Akuntabilitas Keuangan / Tata Kelola Pemerintahan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah	-
	sudah tersedia publikasi data?	
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.13.5 : Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengelolaan Barang Milik Negara / Tata Kelola Aset / Perencanaan Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.14.1 : Indeks Profesionalisme ASN

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	BKN
2	Nama Indikator	Indeks Profesionalisme ASN
3	Konsep/Definisi	Indeks profesionalisme ASN Kementerian Agama merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Capaian Indeks Profesionalisme ASN pada Kementerian Agama maka Semakin Meningkat Presentasi SMART dan Moderat Religius ASN Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN
6	Nama Variabel Pembangun	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survey / penilaian Indeks profesionalisme ASN Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Lingkup Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.14.2 :Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	KemenPAN RB dan BKN
2	Nama Indikator	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
3	Konsep/Definisi	Setiap satuan kerja wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Satuan Kerja yang melakukan penyusunan maka semakin meningkat Pemenuhan Kebutuhan ASNnya
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb
6	Nama Variabel Pembangun	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Usulan Formasi, Pemetaan ASN
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan di masing-masing satuan kerja
11	Level Estimasi	Nasional dan Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah	-
	sudah tersedia publikasi data?	
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.14.3 : Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama melibatkan Stakeholder KemenPAN RB
2	Nama Indikator	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
3	Konsep/Definisi	Predikat Pegawai Teladan merupakan bentuk penghargaan bagi pegawai Kementerian Agama yang diberikan setiap tahun. Pegawai teladan merupakan role model bagi pegawai ASN lainnya. Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi
4	Interpretasi	Semakin banyak partisipan yang disertakan maka semakin banyak role model dan reinforcement yang diperoleh
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag
6	Nama Variabel Pembangun	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemberian Reward bagi ASN
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
11	Level Estimasi	Nasional dan Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.15.1 : Persentase kasus hukum yang terselesaikan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
3	Konsep/Definisi	Indikator ini menunjukkan efektivitas sistem penanganan dan advokasi dalam menangani dan menyelesaikan kasus hukum, baik di tingkat peradilan pidana, perdata, administrasi, maupun kasus hukum lainnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan perkara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) * 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan naskah peraturan 2. Pelatihan/pembinaan/Sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kasus hukum: 1. Kasus Sengketa tanah 2. Kasus hukum ASN
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Unit Eselon I 3. PTKN 4. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah	Portal Satker
	sudah tersedia publikasi data?	
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.15.2 : Persentase rekomendasi izin orang asing

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Persentase rekomendasi izin orang asing
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi izin orang asing
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi rekomendasi yang diterbitkan oleh Kanwil Kemenag Jateng terkait izin orang asing, peneliti, rohaniawan, relawan, atau peserta kegiatan keagamaan lainnya dibandingkan dengan jumlah permohonan yang diajukan sesuai ketentuan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik layanan yang diberikan dan ketepatan pemberian rekomendasi izin bagi orang asing, mencerminkan transparansi, kepatuhan, dan dukungan terhadap hubungan keagamaan lintas negara dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketentuan hukum
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) * 100\%$ Keterangan: a. Jumlah izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah permohonan yang diterima
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah izin orang asing yang diterbitkan 2. Jumlah permohonan yang diterima
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Layanan perizinan kegiatan keagamaan orang asing, koordinasi dengan Ditjen Bimas dan Instansi terkait (imigrasi, Kemlu, BNPT)
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kasus hukum: 1). Kasus Sengketa tanah. 2). Kasus hukum ASN
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Unit Eselon I 3. PTKN 4. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK. 16.1 : Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat arsip yang telah dialihmedia (digitalisasi) dan dapat diakses dengan mudah melalui sistem elektronik, sebagai bagian dari transformasi tata kelola kearsipan modern.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin optimal dalam melakukan digitalisasi arsip serta memastikan aksesibilitasnya bagi pengguna internal maupun publik sesuai kewenangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: b. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah c. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penatakelolaan arsip, peningkatan kompetensi arsiparis
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Kearsipan / Transformasi Digital / Tata Kelola Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah	-
	sudah tersedia publikasi data?	
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK. 16.2 : Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
3	Konsep/Definisi	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap adalah Indikator yang menunjukkan sejauh mana pengembangan infrastruktur perkantoran, baik fisik maupun digital, telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam roadmap pengembangan instansi atau organisasi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau renovasi fasilitas perkantoran dengan target yang telah direncanakan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik keselarasan antara pembangunan sarana-prasarana dengan roadmap yang ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Sarana dan prasarana 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Laporan pembangunan, 2. roadmap pengembangan, data aset perkantoran 3. sistem manajemen infrastruktur
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	1. $\geq 80\%$ → Sebagian besar sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap dan berjalan optimal. 2. 60% - 79% → Pembangunan cukup sesuai roadmap, tetapi ada beberapa target yang belum terealisasi. 3. 40% - 59% → Pembangunan berjalan namun masih banyak yang tertunda atau tidak sesuai roadmap. 4. 20% - 39% → Sebagian kecil sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap, tetapi masih jauh dari target. 5. $< 20\%$ → Pengembangan sarana dan prasarana perkantoran masih sangat minim atau tidak sesuai roadmap.
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.17.1 : Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	KemenPAN RB
2	Nama Indikator	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau badan publik telah mengimplementasikan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan kesiapan, kualitas, dan efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan dapat diakses dengan mudah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kematangan, semakin efektif pula PPID dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Kebijakan dan Regulasi 2. Struktur Organisasi dan SDM PPID 3. Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik 4. Layanan Informasi Publik 5. Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi 6. Monitoring dan Evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan PPID pada Satuan Kerja 2. Pembinaan/Pelatihan 3. Monitoring dan Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Sangat Maju → PPID sudah sepenuhnya digital, transparan, responsif, dan memenuhi standar keterbukaan informasi. 2. Maju → PPID telah berjalan dengan baik tetapi masih memerlukan sedikit penyempurnaan dalam aspek tertentu. 3. Berkembang → PPID telah tersedia tetapi belum sepenuhnya efektif dalam penyelenggaraan layanan informasi. 4. Dasar → PPID baru terbentuk dan masih dalam tahap pengembangan sistem serta kapasitas SDM. 5. Belum Berkembang → PPID belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan banyak perbaikan.
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Unit Eselon I 3. Kanwil Kementerian Agama Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.17.2 : Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
3	Konsep/Definisi	Indikator yang mengukur pertumbuhan jumlah konten berbasis keagamaan dan pendidikan yang diterbitkan dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Konten ini dapat berupa artikel, video, podcast, modul pembelajaran, atau materi digital lainnya yang tersedia di berbagai platform, seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi pendidikan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin aktif produksi dan distribusi konten keagamaan dan pendidikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$Persentase = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan konten keagamaan dan pendidikan 2. Pengadaan sistem informasi 3. Melakukan monitoring dan Evaluasi 4. Pelatihan dan sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Konten Digital 2. Konten Cetak
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.18.1 : Indeks Pembangunan Statistik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	BPS
2	Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan statistik Kementerian/instansi berdasarkan ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data statistik. IPS digunakan untuk menilai sejauh mana suatu Kementerian/lembaga telah mengembangkan sistem statistik yang andal, akurat, dan relevan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data
4	Interpretasi	Semakin berkualitas Kementerian/Lembaga mampu menyediakan sistem statistik data yang akurat, berkualitas, relevan, dan tepat waktu maka semakin berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan dan pembangunan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Prinsip SDI 2. Kualitas Data 3. Proses Bisnis 4. Statistik 5. Kelembagaan; dan 6. Sistem Statistik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Penyelenggaraan satu data Kementerian Agama 2. Penyusunan data Statistik 3. Penguatan jabatan fungsional statistisi 4. Pengadaan sistem informasi satu data Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Menggunakan ukuran skala tingkat kematangan 1 sampai 5 dengan satuan poin tingkat kematangan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Pada Portal BPS



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.18.2 : Persentase data statistik yang dipublikasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase data statistik yang dipublikasi
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data statistik sektoral bidang agama dan pendidikan keagamaan yang berhasil dipublikasikan secara resmi melalui kanal informasi (website, laporan tahunan, publikasi cetak, e book, atau portal Satu Data Kemenag, dibandingkan dengan total data statistik yang tersedia
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin baik keterbukaan informasi dan tata kelola data, serta mendukung implementasi Satu Data Indonesia dan pengambilan kebijakan berbasis data.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$Persentase = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data statistik yang dipublikasikan b. Jumlah data statistik yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah data statistik yang dipublikasikan melalui Website dan media online (aplikasi digital kemenag), dll 2. Jumlah data statistik yang tersedia
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengumpulan dan pengolahan data sektoral, penyusunan laporan statistik, publikasi data melalui portal resmi, BPS, atau kanwil
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan / semesteran
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-
	(Disebutkan nama publikasinya)	



Tabel :
METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025-2029
IKSK.19.1 : Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2	Nama Indikator	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi anggaran pada bidang pendidikan digunakan secara efektif sesuai perencanaan dan berbanding lurus dengan capaian output program/kegiatan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin efektif pemanfaatan anggaran, artinya penggunaan anggaran bidang pendidikan menghasilkan capaian output yang sesuai target Renstra/Renja
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Realisasi pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output b. Jumlah total realisasi anggaran bidang pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Total realisasi anggaran bidang pendidikan 2. Realisasi anggaran sesuai target capaian output
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, monitoring capaian output dan evaluasi anggaran
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Indikator Efektivitas anggaran pendidikan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-



CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK. 1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	Persentase = (Jumlah Kabupaten dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi ÷ Jumlah total kabupaten) × 100%	KUB	KUB	Tahunan
		IKSK. 1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persentase = (a / b) x 100% Keterangan: a : Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b : Jumlah total KUA Se Jateng	Bidang Urais	Bidang Urais	Tahunan
		IKSK. 1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persentase peningkatan = ((a - b) / b) x 100% Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Kh onghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Kh onghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya	KUB, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	KUB, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/P ESPERANI/UTSAWA DHARMA GITTA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persentase = ((a - b) / b) x 100% Keterangan: a : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya	Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persentase = (a-b) / b] x 100% a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	Bidang Penaiszawa	Bidang Penaiszawa	Tahunan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan b : Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan	KUB, Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	KUB, Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK. 2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya	KUB, Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	KUB, Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Triwulan
		IKSK. 2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	$x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	$x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah fasilitator Bimwin tersertifikat b = Jumlah total fasilitator Bimwin aktif	Bidang Urais, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Urais, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	$\text{Rumusan: } (a/b) \times 100\%$ Keterangan: A:Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS	Bidang Urais	Bidang Urais	Tahunan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK	
		IKSK. 2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Rumusan: $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: A: Jumlah Keluarga yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah Keluarga tahun berdasarkan data peristiwa nikah	Bidang Urais, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Urais, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persentase: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Rumah Ibadah yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana b = Rumah Ibadah Se Jateng	KUB, Bidang Urais, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	KUB, Bidang Urais, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata	Bidang Urais	Bidang Urais	Tahunan
		IKSK. 2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Rumusan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya	Bidang Urais, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Urais, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Rumusan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah buku keagamaan yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah buku keagamaan yang disediakan pada tahun sebelumnya	Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penaiszawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan	Bidang Urais	Bidang Urais	Tahunan
		IKSK. 2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek	Bidang Penaiszawa	Bidang Penaiszawa	Tahunan
		IKSK. 2.12	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah advokasi pengamanan harta benda wakaf yang ditindaklanjuti b = Jumlah kasus advokasi pengamanan harta benda wakaf	Bidang Penaiszawa	Bidang Penaiszawa	Tahunan
		IKSK. 2.13	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah izin pembentukan LAZ dan Nazir Wakaf yang diterbitkan b = Total jumlah permohonan izin pembentukan LAZ dan Nazir Wakaf yang diterima	Bidang Penaiszawa	Bidang Penaiszawa	Tahunan
		IKSK. 2.14	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan b = Jumlah total proses ikrar wakaf yang diajukan/diproses	Bidang Penaiszawa	Bidang Penaiszawa	Tahunan
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota Rumus: $(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah calon jemaah lansia yang diberangkatkan pada tahun berjalan b : Total kuota jemaah lansia yang tersedia pada tahun berjalan	PHU	PHU	Tahunan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Rumus: $(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana b : Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif	PHU	PHU	Tahunan
		IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas b : Jumlah total responden survei	PHU	PHU	Tahunan
SK. 5	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK. 5.1	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b = Jumlah total calon jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan
		IKSK. 5.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b = Jumlah total calon jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
SK.6	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	IKSK. 6.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga Penyelenggara Haji Khusus b. Lembaga Penyelenggara Umrah	Rumus: $(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah PIHK dan/atau PPIU yang memperoleh akreditasi A pada tahun berjalan b : Jumlah total PIHK dan/atau PPIU yang terdaftar aktif pada tahun berjalan	PHU	PHU	Tahunan
SK.7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK. 7.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan Pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menyelesaikan pendidikan setara formal b = Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada tahun berjalan	Penmad, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
SK. 8	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK. 8.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan b = Total jumlah satuan pendidikan umum yang menjadi objek penilaian	Penmad, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKS	SUMBER DATA IKS	PERIODE PELAPORAN IKS	
		IKSK. 8.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana b = Jumlah total satuan pendidikan	Bidang Penmad, Bidang PD Pontren,, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad, Bidang PD Pontren,, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 8.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya	Penmad, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 8.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)	$\text{Persentase Anak Kelas 1 Alumni PAUD} = (A/B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah siswa kelas 1 yang memiliki riwayat pernah mengikuti PAUD B = Jumlah seluruh murid kelas 1	Penmad, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 8.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan Pendidikan	Penmad, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 8.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren Rumus = Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	PD Pontren	PD Pontren	Tahunan
SK.9	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	IKSK. 9.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. Literasi membaca b. numerasi Nilai rata-rata = $(\Sigma \text{ skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 9.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 9.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 9.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler Laporan jumlah prestasi dari kegiatan ekstrakurikuler	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas	Tahunan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK	
					Hindu, Bimas Buddha		
		IKSK. 9.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 9.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 9.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total satuan pendidikan	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 9.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas	Tahunan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
				unggul b = Total jumlah satuan pendidikan		Hindu, Bimas Buddha	
		IKSK. 9.9	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah satuan pendidikan	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 9.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa/santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa/santri	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 9.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik b = Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai pengelolaannya	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 9.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
SK.10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK. 10.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik b = Jumlah total guru (pada semua jenjang)	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK	
		IKSK. 10.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio dihitung dengan membagi jumlah total siswa dengan jumlah total guru dalam satu satuan pendidikan	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 10.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 10.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 10.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 10.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK	
		IKSK. 10.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 10.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil b = Total Jumlah semua pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP)	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 10.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 10.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu. b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
		IKSK. 10.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persentase peningkatan = $[(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun sebelumnya	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 10.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Penmad, PAI, PD Pontren, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Tahunan
SK.11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK. 11.1	Nilai Kinerja Anggaran	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
SK. 12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK. 12.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 12.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
SK. 13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK. 13.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 13.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 13.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu di bandingkan dengan Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 13.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 13.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
SK.14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK. 14.1	Indeks Profesionalisme ASN	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 14.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 14.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK. 15.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persentase = $(a / b) * 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 15.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah rekomendasi izin orang asing	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
SK. 16	Meningkatnya	IKSK. 16.1	Persentase	Persentase = $(a / b) \times 100\%$	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
	kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa		Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Keterangan: a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi			
		IKSK. 16.2	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
SK. 17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK. 17.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 17.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
SK. 18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK. 18.1	Indeks Pembangunan Statistik	Pengumpulan data (misalnya, wawancara atau survei) dan kemudian mengklasifikasikannya ke dalam salah satu dari empat skala pengukuran: nominal, ordinal, interval, dan rasio.	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 18.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persentase = $((a - b) / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan
SK.19	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK. 19.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Tahunan

Halaman Ini Kosong